

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR BERSIH
DI DESA WAWOOSU DAN DESA MATAIWOI
KECAMATAN KOLONO KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Konsentrasi Manajemen Prasarana Perkotaan

Oleh :

ELMI SUMIYARSONO
NIM: L4D 008 012



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR BERSIH
DI DESA WAWOOSU DAN DESA MATAIWOI
KECAMATAN KOLONO KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

ELMI SUMIYARSONO

NIM: L4D 008 012

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 19 Maret 2010

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Maret 2010

Tim Penguji:

Ir. Hadi Wahyono, MA - Pembimbing
Ir. Agung Sugiri, MPSt - Penguji I
Dr. Ir. Robert Kodoatie - Penguji II

Mengetahui Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program
Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam Tesis Saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan Saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis ini ternyata ditemukan duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka Saya bersedia menerima sangsi untuk dibatalkan kelulusan Saya dan Saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggungjawab.

Semarang, Maret 2009

ELMI SUMIYARSONO
NIM. L4D 008 012

*Tidak ada simpanan yang lebih berguna daripada ilmu.
Tidak ada sesuatu yang lebih beruntung daripada adab.
Tidak ada kawan yang lebih bagus daripada akal.
Tidak ada benda ghaib yang lebih dekat daripada **maut**.*

*Sesungguhnya sebagian perkataan itu ada
yang lebih keras dari batu, lebih tajam dari tusukan jarum,
lebih pahit daripada jadam dan lebih panas daripada bara.
Sesungguhnya hati adalah ladang,
maka tanamkanlah ia dengan perkataan yang baik
karena jika tidak tumbuh semuanya (perkataan yang tidak baik)
niscaya tumbuh sebagiannya.*

*Jesis ini Aku persembahkan untuk:
Bapak dan Ibuku Jercinta: Ht. Achmad Moeniri dan Hj. Siti
Kusmiyati Istriku Jersayang Dyan Nindyawati dan
Buah Hatiku Nasywa Puti Maulidya*

RIWAYAT HIDUP PENULIS



ELMI SUMIYARSONO, dilahirkan di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang 24 Mei 1974 anak ke Tiga dari enam bersaudara pasangan H. Ach. Moeniri dan Hj. Siti Kusmiyati.

Penulis menyelesaikan pendidikan SDN I Labuhan pada tahun 1986, Lulus dari SMPN Sreseh tahun 1989 dan SMAN 1 Sampang tahun 1992. Selepas SMA mengenyam pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan surabaya lulus pada tahun 1995.

Pada tahun 1996 Penulis diangkat menjadi PNS di Departemen Kesehatan ditempatkan di Kabupaten Unaaha Propinsi Sulawesi Tenggara (sekarang berubah menjadi Kabupaten Konawe). Pada tahun 2000 melanjutkan pendidikan pada jenjang S1 jurusan Teknik Lingkungan di UPN “Veteran” Jawa Timur, lulus tahun 2005 dan pada tahun yang sama Penulis ditempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

Menikah di Kediri tanggal 16 Januari 2006 dengan Dyan Nindyawati, ST yang bekerja sebagai PNS di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tenggara dan dikarunia satu Putri Nasywa Puti Maulidya (Chaca) yang dilahirkan pada 17 April 2007.

Pada tahun 2008 mendapatkant beasiswa dari Pusbitek BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum, untuk mengikuti pendidikan di Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Gelar Magister Teknik (MT) diraih setelah menyelesaikan studi pada Maret 2010 dengan judul Tesis ”Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Provinsi Sulawesi Tenggara”.

ABSTRACT

Central government through a special allocation fund has built a clean water supply infrastructure which is intended as an aid for low-income communities and located in remote areas. However, the operation and maintenance are left entirely to the local community. The reality shows that there is much successfully built infrastructure was damaged hence it is no longer work, due to the lack of operational funds and funds for the rehabilitation of related sectors, while it is also no funds to maintain governmental organizations and the lack of public awareness to maintain the infrastructure developed. Therefore the benefit received by the public with the existence of such infrastructure is not optimal and unsustainable, the example is the case of Mataiwoi Village. But there are also the local villagers who succeed in doing maintenance hence the infrastructure that has been successfully built is continued to be the function as planned as occurs in Wawoosu Village.

The purpose of this research is to mechanisms and causes of successes and failures of development and management of water supply infrastructure in Wawoosu and Mataiwoi Village of Kolono District of South Konawe Regency.

The research uses descriptive qualitative research method with case study approach because the research is conducted on natural objects; natural objects are objects that develops as it is, not manipulated by the researcher and the researcher's presence did not affect the dynamics of the object. Sampling is conducted by purposively data sources, gathering techniques in this study are: field observation and interview techniques, data analysis is inductive / qualitative, and the results of this research will be more emphasis on "meaning" instead of 'generalizations'.

In this study results finding that the successes and failures of development and management of fresh water after development in Mataiwoi and Wawoosu Villages of Kolono District is affected by: the availability of budget development, the selection of appropriate technology and the step of development process and management that adjusts the capacity of local communities.

Recommendations from this research are: the application of appropriate technology to achieve development success both in quality, quantity and the sustainability of development results in the service of this village regards to the water supply system adjusted to existing conditions and level of knowledge and experience of local communities, prior to the proposal and determination regarding the allocation of costs or scale an area development program should be preceded by an initial planning / pre design therefore the budget plot is in accordance with demand, and the last it should be both central and local governments more serious to promote development programs which is more participatory.

Keywords: participation, development, management

ABSTRAK

Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) telah membangun Prasarana Penyediaan Air Bersih sebagai bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berada di daerah yang terpencil. Namun untuk pengoperasian dan pemeliharaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat. Realitanya tidak sedikit prasarana yang sudah berhasil dibangun mengalami kerusakan sehingga tidak lagi berfungsi, hal ini disebabkan tidak tersedianya dana operasional dan dana rehabilitasi dari sektor terkait, selain itu juga tidak ada dana swadaya masyarakat untuk memelihara dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana terbangun. Sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pembangunan prasarana tersebut tidak optimal dan tidak berkelanjutan, contoh kasus di Desa Mataiwoi. Namun ada juga masyarakat desa setempat yang berhasil melakukan pemeliharaan sehingga prasarana yang sudah berhasil dibangun tetap berfungsi sesuai yang direncanakan seperti yang terjadi di Desa Wawoosu.

Untuk itu tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan penyebab keberhasilan dan kegagalan pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan studi kasus karena penelitiannya dilakukan pada objek yang alamiah (*natural object*); objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah: observasi lapangan dan teknik wawancara, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian ini akan lebih ditekankan pada “makna” dari pada “generalisasi”.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keberhasilan dan kegagalan pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih pasca pembangunan di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono dipengaruhi sangat dipengaruhi oleh: Ketersediaan Anggaran Pembangunan, Pemilihan Teknologi Tepat Guna dan Tahapan Proses Pembangunan dan Pengelolaan yang menyesuaikan dengan kapasitas masyarakat setempat.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu: Penerapan teknologi tepat guna agar mencapai keberhasilan pembangunan baik secara kualitas, kuantitas dan keberlanjutan pelayanan hasil pembangunan dalam hal ini sistem penyediaan air bersih di desa disesuaikan dengan kondisi eksisting dan tingkat pengetahuan dan pengalaman masyarakat desa setempat, sebelum dilakukannya pengusulan dan penetapan mengenai alokasi atau besaran biaya suatu program pembangunan di daerah hendaknya didahului dengan perencanaan awal/pradesain sehingga plotting anggaran sesuai dengan

kebutuhan, dan yang terakhir hendaknya pemerintah baik pusat maupun daerah lebih serius lagi untuk menggalakkan program-program pembangunan yang lebih partisipatif.

Kata kunci: partisipasi, pembangunan, pengelolaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Magister Teknik Manajemen Prasarana Perkotaan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Tesis ini berjudul : *“PARTISIPASI MASYARAKAT DIDALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA AIR BERSIH DI DESA WAWOOSU DAN DESA MATAIWOI KECAMATAN KOLONO KABUPATEN KONAWA SELATAN”*.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi (PUSBITEK) BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum yang telah memberi beasiswa kepada Saya untuk melanjutkan pendidikan ini.
2. Bapak Hasto Agoeng Saputroe, S.ST, MT. selaku Kepala Balai Peningkatan Keahlian Pengembangan Wilayah dan Teknik Konstruksi Departemen pekerjaan Umum Semarang.
3. Dr. Ir. Joesron Ali Syahbana, MSc. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Dipenogoro;
4. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA selaku Dosen Pembimbing dengan kesabarannya memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Ir. Agung Sugiri, MPSt dan Bapak Dr. Ir. Robert Kodoatie selaku Dosen Penguji 1 dan 2 yang telah memberikan banyak masukan untuk kesempurnaan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pengampu mata Kuliah pada Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Konsentrasi Manajemen Prasarana Perkotaan Universitas Diponegoro yang selalu memberikan dorongan dalam penyelesaian tugas ini.
7. Mbak Luluk, Mas Imam, dan Pak Karjoko terimakasih atas semua bantuannya terhadap saya selama ini.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi Penulis untuk melaksanakan tugas belajar ini.
9. Kedua orang Tuaku, berkat ridho dan keikhlasan doanya sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan moril dan doa.
10. Istri dan anakku tercinta, kesabaran kalianlah yang selama ini memotivasi saya sehingga mampu melewati semua kendala untuk menyelesaikan studi ini,

11. Teman-teman angkatan ke-IV pada Program Modular Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Konsentrasi Manajemen Prasarana Perkotaan yang selalu menjadi inspirasi dalam menyelesaikan tugas dan semua pihak yang telah membantu baik langsung dan tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri bagi saran-saran perbaikan agar dapat menjadi lebih sempurna dan terutama lagi agar Tesis ini dapat memberikan arahan yang tepat dalam penulis melakukan penelitian.

Semarang, Maret 2010

P e n u l i s

Elmi Sumiyarsono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.3.3 Manfaat	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4.1 Ruang Lingkup Materi	7
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah	8
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Pendekatan dan Metode Penelitian	13
1.6.1 Pendekatan Penelitian	13

1.6.2 Metode Penelitian.....	13
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.3.1 Observasi Lapangan.....	15
1.6.3.2 Teknik Wawancara	15
1.6.4 Kebutuhan Data	16
1.6.5 Teknik Pengolahan Data.....	17
1.6.6 Teknik Analisis	18
1.6.7 Keaslian Penelitian	19
1.7 Sistematika Penulisan.....	25

BAB II. KAJIAN LITERATUR PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN

PRASARANA PENYEDIAAN AIR BERSIH.....	27
2.1 Partisipasi Masyarakat	27
2.1.1 Pengertian Partisipasi	27
2.1.2 Model Logika Yang Mendasari Partisipasi	32
2.1.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat	34
2.1.4 Keuntungan/Pentingnya Partisipasi Masyarakat.....	40
2.1.5 Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat	40
2.2 Sistem Penyediaan Air Bersih.....	41
2.3 Sistem Pelayanan Air Bersih.....	44
2.4 Tujuan Pengelolaan Prasarana Air Bersih.....	46
2.5 Persepsi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih	47
2.6 Prinsip Manajemen Dalam Pengelolaan Air Bersih.....	48
2.7 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam keberhasilan	

Program.....	49
2.8 Rangkuman Kajian Teori.....	51
BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	53
3.1 Geografis	53
3.1.1 Letak	53
3.1.2 Batas Wilayah.....	53
3.1.3 Luas Wilayah	53
3.1.4 Curah Hujan.....	54
3.1.5 Suhu Udara	54
3.2 Gambaran Umum Kecamatan Kolono	54
3.2.1 Kondisi Fisik Wilayah	54
3.2.2 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya.....	55
3.2.3 Potensi dan Masalah	56
3.3 Gambaran Umum Pengembangan Prasarana Penyediaan	
Air Bersih di Kecamatan Kolono.....	57
3.3.1 Obyek Studi	57
3.3.1.1 Desa Wawoosu	57
3.3.1.2 Desa Mataiwoi	58
3.3.2 Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Bersih	
Di Kabupaten Konawe Selatan	59
3.3.2.1 Proses pembangunan Prasarana	
Penyediaan Air Bersih	59
3.3.2.2 Profil Penyediaan Air Bersih	60
A. Desa Wawoosu	60

B. Desa Mataiwoi	61
------------------------	----

BAB IV. PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN

PRASARANA AIR BERSIH	63
-----------------------------------	-----------

4.1 Kajian Mekanisme Partisipasi Masyarakat

Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana

Penyediaan Air Bersih	65
-----------------------------	----

4.1.1 Pemikiran Pada Setiap Tahapan Pembangunan

Sebagai Pendorong Keberhasilan	66
--------------------------------------	----

4.1.2 Tenaga Dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Bentuk Partisipasi yang Paling Diminati Masyarakat	70
---	----

4.1.3 Uang Sebagai Konsekuensi Pemakaian Air

Pada Tahap Pengelolaan.....	74
-----------------------------	----

4.2 Kajian Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana

Penyediaan Air Bersih	77
-----------------------------	----

4.2.1 Pemilihan Teknologi Tepat Guna Sebagai

Pendorong Keberhasilan Dalam Pengelolaan

Prasarana Penyediaan Air Bersih	77
---------------------------------------	----

4.2.2 Ketersediaan Dana Pembangunan.....

4.2.3 Integritas Kelompok Pengguna dan Pemelihara

Sebagai Kunci Keberhasilan dan Kegagalan

Pengelolaan	85
-------------------	----

4.3 Kajian Komprehensif Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan

Air Bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi.....87

BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN.....93

DAFTAR PUSTAKA .97

LAMPIRAN 99.....

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Keaslian Penelitian.....	21
TABEL II.1	: Logika Proses partisipasi Masyarakat.....	33
TABEL II.2	: Kisi – kisi Penelitian	52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR I.1	: Peta Administrasi Kabupaten Konawe Selatan.....	8
GAMBAR I.2	: Peta Administrasi Kecamatan Kolono.....	9
GAMBAR I.3	: Peta Administrasi Desa Wawoosu	10
GAMBAR I.4	: Peta Administrasi Desa Mataiwoi	11
GAMBAR I.5	: Skema kerangka Pemikiran.....	12
GAMBAR II.1	: Tipologi Penilaian Masyarakat Tentang Partisipasi Masyarakat dari Arnstein	36
GAMBAR III.1	: Proses Pelaksanaan Pembangunan.....	54
GAMBAR IV.1	: Pekerjaan Penggalian Jalur Pipa	54
GAMBAR IV.2	: Prasarana Penyediaan Air Bersih di Desa Wawoosu.....	80
GAMBAR IV.3	: Prasarana Penyediaan Air Bersih di Desa Mataiwo	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem penyediaan air bersih pada dasarnya merupakan komponen suatu daerah dan bentuk pelayanan publik yang penyediaannya seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas, karena pembangunan utilitas umum adalah salah satu tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah (Rondinelli, 1990). Berdasarkan pendapat tersebut, penyediaan air bersih merupakan syarat mendasar bagi suatu daerah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakatnya. Penyediaan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga/domestik merupakan usaha yang secara langsung dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kabupaten Konawe Selatan sebagai kabupaten yang baru terbentuk didalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat pada umumnya menggunakan sistem penyediaan air bersih dengan teknologi yang relatif sederhana.

Di Kabupaten Konawe Selatan pelayanan penyediaan air bersih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, kesulitan di dalam penyediaan prasarana air bersih sudah berlangsung sejak lama. Persoalannya antara lain: keterbatasan dana dari pemerintah, peningkatan penduduk yang terus berlangsung, euforia Otonomi Daerah yang cenderung kebablasan dari Kabupaten/Kota menjadi beberapa penyebab perkembangan infrastruktur kalah cepat dibandingkan dengan dinamika pertumbuhan pembangunan yang ada.

Sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan penyediaan air bersih di Perdesaan maka perlu dibangun suatu sistem penyediaan air bersih yang memenuhi syarat secara kualitas maupun kuantitas serta terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan dibangunnya prasarana penyediaan air bersih oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi penyakit yang berkaitan dengan pencemaran air serta meningkatkan kelestarian sumber daya alam.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, pemerintah pusat melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan mulai dari tahun 2004–2008 telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun prasarana penyediaan air

bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah terutama di daerah- daerah rawan air bersih yang belum terjangkau pelayanan PDAM.

Pada Tahun Anggaran 2008 Kecamatan Kolono merupakan salah satu dari 5 (lima) Kecamatan yang mendapat bantuan pembangunan prasarana air bersih melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini dikarenakan hampir 60% masyarakat di Kecamatan Kolono belum mendapatkan akses pelayanan air bersih. Untuk tahun anggaran 2008 dari 24 (dua puluh empat) desa yang ada di Kecamatan Kolono hanya 4 (empat) desa yang mendapatkan bantuan pembangunan prasarana penyediaan air bersih yaitu: Desa Waworano, Desa Wawoosu, Desa Batu Putih, dan Desa Mataiwoi.

Pasca pembangunan yaitu setelah selesainya masa pemeliharaan yang menjadi tanggungjawab kontraktor pelaksana prasarana terbangun akan diserahkan kepada Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP) yang dibentuk dari dan oleh masyarakat setempat yang mempunyai tugas untuk mengelola prasarana penyediaan air bersih yang telah di bangun. Hal ini disebabkan tidak tersedianya dana operasional dan dana rehabilitasi dari instansi terkait.

Dari 4 (empat) desa yang mendapatkan bantuan prasarana semuanya diwajibkan untuk membentuk Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP), namun kenyataannya terkadang hanya menjadi pelengkap persyaratan, sedangkan untuk pelaksanaannya baik berupa pertemuan atau kegiatan rutin dalam pemeliharaan prasarana kurang maksimal bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Hal ini terjadi dikarenakan rasa memiliki masyarakat terhadap prasarana kurang, yang terkadang menganggap bahwa prasarana air bersih sama dengan prasarana lainnya seperti jalan dan irigasi, sehingga kewajiban untuk melakukan pemeliharaan adalah tanggung jawab pemerintah.

Konsep partisipasi telah lama menjadi bahan kajian dan telah meluas sehingga penggunaannya terkadang dipakai untuk visi misi suatu daerah. Konsep partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah tepat, karena sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dengan lingkungannya. Ada dua unsur pokok mengapa partisipasi itu penting. *Pertama* alasan *etis*, yaitu dalam arti pembangunan demi manusia berpartisipasi sebagai subjek, *kedua* alasan *sosiologis*, yaitu bila pembangunan diharapkan berhasil dalam jangka panjang

tidak bisa tidak ia harus menyertakan sebanyak mungkin orang, kalau tidak pembangunan pasti akan macet (Kodotie. 2003).

Sehubungan dengan pendapat tersebut, pembangunan harus bertolak dari kenyataan yang ada meliputi sikap mental maupun struktur masyarakat. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk menyadari kebutuhannya dan berusaha menghindari segala hambatan untuk mencapai kebutuhan tersebut. Penyadaran masyarakat tidak dapat dengan indoktrinasi, tetapi melalui aktivitas mereka sendiri. Untuk itu harus dihindarkan anggapan bahwa masyarakat itu bodoh, sebab mereka banyak mengetahui apa yang mereka butuhkan.

Masyarakat juga diharapkan dapat menyadari akan kebutuhan pokok mengenai air bersih. mereka harus diberikan pengetahuan dan pemahaman pentingnya air bersih melalui media sosialisasi atau program pemerintah yang lebih menitikberatkan kepada peningkatan partisipasi masyarakat setempat. sehingga mereka lebih banyak memiliki tanggungjawab untuk mengelola dan mempertahankan atau meningkatkan lebih baik.

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat pada tahap pasca konstruksi, yaitu apakah nilai-nilai dari pembelajaran lewat pendekatan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat diserap oleh masyarakat dan ditindaklanjuti sampai tahap pemeliharaan sehingga pembangunan prasarana penyediaan air bersih dapat berkelanjutan. Menurut Bintarto (1983), bahwa tiap-tiap desa mempunyai *geographical setting dan human effort* serta letak yang berbeda – beda. Sehingga tingkat keadaan kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama. Hal tersebut juga terjadi di dua desa lokasi penelitian, walaupun dari segi letak secara geografis kedua desa tersebut berdekatan dengan mata pencaharian masyarakat pada umumnya adalah petani dan berkebun serta pemilihan sistem penyediaan air bersih yang relatif sangat sederhana. Karena semaksimal mungkin disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat mampu untuk mengoperasikan, memelihara dan melakukan perbaikan apabila ada kerusakan. Namun didalam pelaksanaannya tidak semua prasarana yang pengoperasian dan pemeliharaannya diserahkan kepada kelompok masyarakat setempat berhasil, dalam artian bisa terpelihara dan berfungsi sesuai dengan perencanaan.

Seperti yang terjadi di Desa Mataiwoi, sistem penyediaan air bersih yang berhasil dibangun tidak mampu memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat dikarenakan pasokan air ke hidran umum terkadang terhenti. Hal ini disebabkan adanya kerusakan di beberapa bagian sistem, mulai dari kurang maksimalnya fungsi bak penangkap air untuk menangkap air dikarenakan tingginya endapan lumpur serta banyaknya sambungan pipa distribusi yang mengalami kebocoran, tanpa ada usaha dari KPP dan masyarakat untuk menguras endapan lumpur di bak penangkap dan bak penampung dan memperbaiki sambungan-sambungan pipa yang mengalami kebocoran sehingga bagian-bagian penting dari sistem prasarana tersebut berfungsi kembali seperti semula. Selain itu kurang terjaganya kelestarian dan keberlanjutan fungsi prasarana terbangun dikarenakan masyarakat pada umumnya memperlakukan prasarana penyediaan air bersih sama dengan prasarana lainnya yang dibangun pemerintah sehingga tanggungjawab untuk memelihara dan melakukan perbaikan terhadap kerusakan prasarana merupakan tanggung jawab pemerintah.

Namun ada juga KPP yang cukup berhasil menjalankan perannya yaitu untuk menggalang dan mengkoordinir partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif menyumbangkan tenaga, waktu dan pendanaan di dalam upaya untuk tetap menjaga dan merawat prasarana penyediaan air bersih mulai dari bak penangkap, bak penampung, pipa-pipa distribusi sampai dengan sambungan rumah, sehingga prasarana tetap beroperasi dan berfungsi maksimal sesuai dengan perencanaan. Bahkan cakupan pelayanannya berkembang ke lain desa seperti yang terjadi di Desa Wawoosu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas kiranya menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai latar belakang yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan partisipasi masyarakat desa didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih pasca pembangunan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana di Kecamatan Kolono.

1.2 Permasalahan

Dengan keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah didalam pembangunan prasarana penyediaan air bersih di pedesaan, sehingga biaya untuk pengoperasian dan pemeliharaan menjadi tanggungjawab dari masyarakat desa

setempat, dengan harapan nantinya dalam diri masyarakat akan tumbuh rasa memiliki sehingga timbul kesadaran untuk mengelola prasarana yang sudah dibangun. Apa yang diharapkan belum tentu sesuai dengan kenyataan di Lapangan. Kenyataan di Lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan berbeda, partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan prasarana penyediaan air bersih tidak semuanya berhasil, contoh kasus di Desa Mataiwoi kondisi prasarana sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian yang berakibat pada menurunnya tingkat pelayanan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kurang maksimalnya tingkat pelayanan ini dapat dilihat dari belum bisa terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat secara kontinyu, air bersih sudah tidak bisa lagi mengalir ke perkampungan. Hal ini disebabkan kurang terpeliharanya prasarana yang menjadi tanggung jawab KPP. Namun ada juga desa yang berhasil menggalang partisipasi masyarakat untuk turut serta berperan aktif untuk memelihara dan merawat prasarana bahkan sekarang malahan mampu mengembangkan cakupan pelayanan ke desa lainnya seperti yang terjadi di Desa Wawoosu.

Dari empat desa penerima bantuan pembangunan prasarana penyediaan air bersih di Kecamatan Kolono hanya dipilih dua desa untuk dijadikan objek penelitian yaitu Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi, Alasan dipilihnya dua desa tersebut adalah:

1. Desa Wawoosu merupakan satu-satunya desa yang berhasil mengelola bahkan mengembangkan cakupan pelayanan prasarana penyediaan air bersih yang telah berhasil dibangun.
2. Desa Mataiwoi mewakili dua desa lainnya yang gagal di dalam pengelolaan prasarana air bersih yang telah berhasil dibangun.
3. Lokasi dua desa tersebut yaitu Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi relatif berdekatan yang dihubungkan oleh jalan propinsi dengan mata pencaharian masyarakat relatif sama yaitu pada umumnya sebagai petani sehingga karakteristik masyarakat tidak jauh berbeda namun tingkat partisipasi masyarakat di keempat desa tersebut berbeda-beda.

Dari permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan?.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Dengan latar belakang yang menggambarkan kondisi berbeda mengenai tingkat keberhasilan pengelolaan terutamanya di dalam pengoperasian dan pemeliharaan prasarana penyediaan air bersih yang sudah dibangun antara Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi. Desa Wawoosu berhasil didalam mengelola prasarana yang telah dibangun bahkan mampu mengembangkan cakupan pelayanannya kedesa tetangga, sementara Desa Mataiwoi gagal untuk mengelola prasarana penyediaan air bersih yang telah berhasil di bangun. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme dan penyebab keberhasilan dan kegagalan pelibatan masyarakat di dalam pembangunan dan pemeliharaan prasaran penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk mencapai maksud tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji mekanime pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono.
2. Mengkaji hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan masyarakat desa didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono.
3. Menyusun rekomendasi bagi penyempurnaan program Pemerintah Pusat untuk bantuan prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat kurang mampu yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.3.3. Manfaat

Penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji konsep program bantuan Pemerintah Pusat untuk penyediaan prasarana penyediaan air bersih yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu diperdesaan yang belum terlayani oleh PDAM didalam pemenuhan kebutuhan air bersihnya. Program bantuan tersebut didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), salah satu lokasi yang di pilih

adalah Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sangat mekanistik sehingga mengesampingkan peran serta masyarakat desa setempat terutamanya didalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Dengan maksud untuk memperjelas dan mempersempit permasalahan yang di bahas, penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan sebagai berikut:

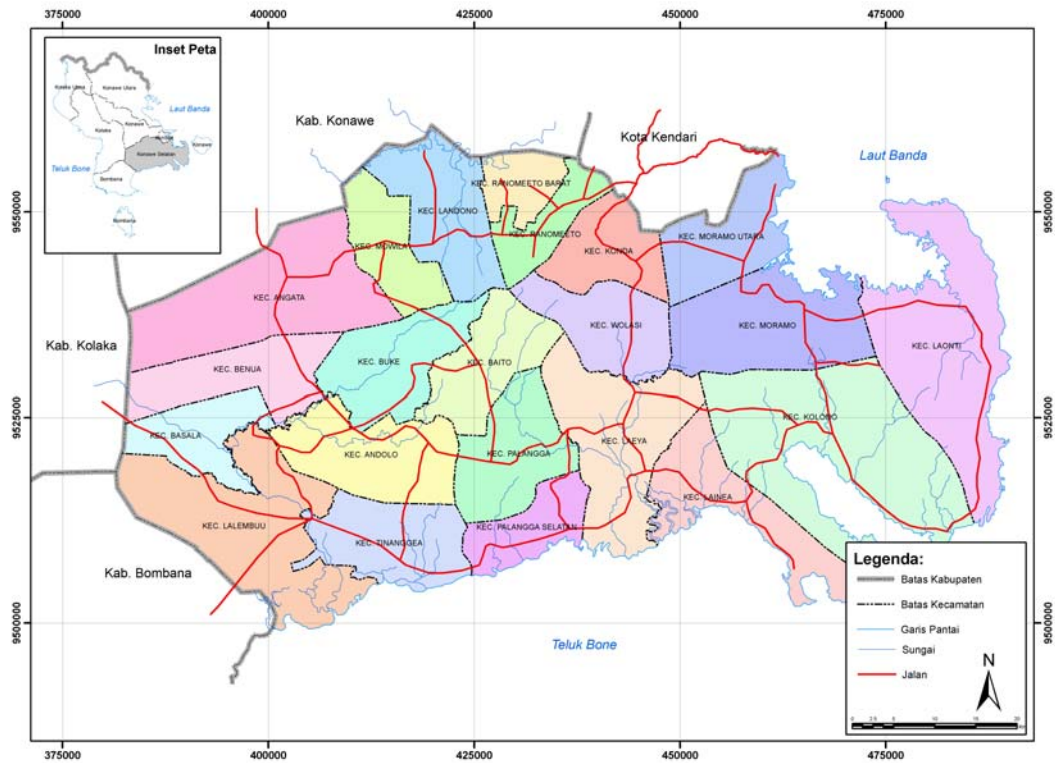
1. Penelitian ditekankan pada pembahasan mengenai partisipasi masyarakat desa didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.
2. Partisipasi masyarakat di dalam penelitian ini merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembagunan dan pengelolaan prasarana yang telah dibangun untuk menjamin keberlanjutan fungsinya dalam rangka mendukung aktifitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Prasarana dimaksud adalah prasarana penyediaan air bersih yang telah dibangun melalui program bantuan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.
4. Mengkaji mekanisme pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah di Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi wilayah desa :

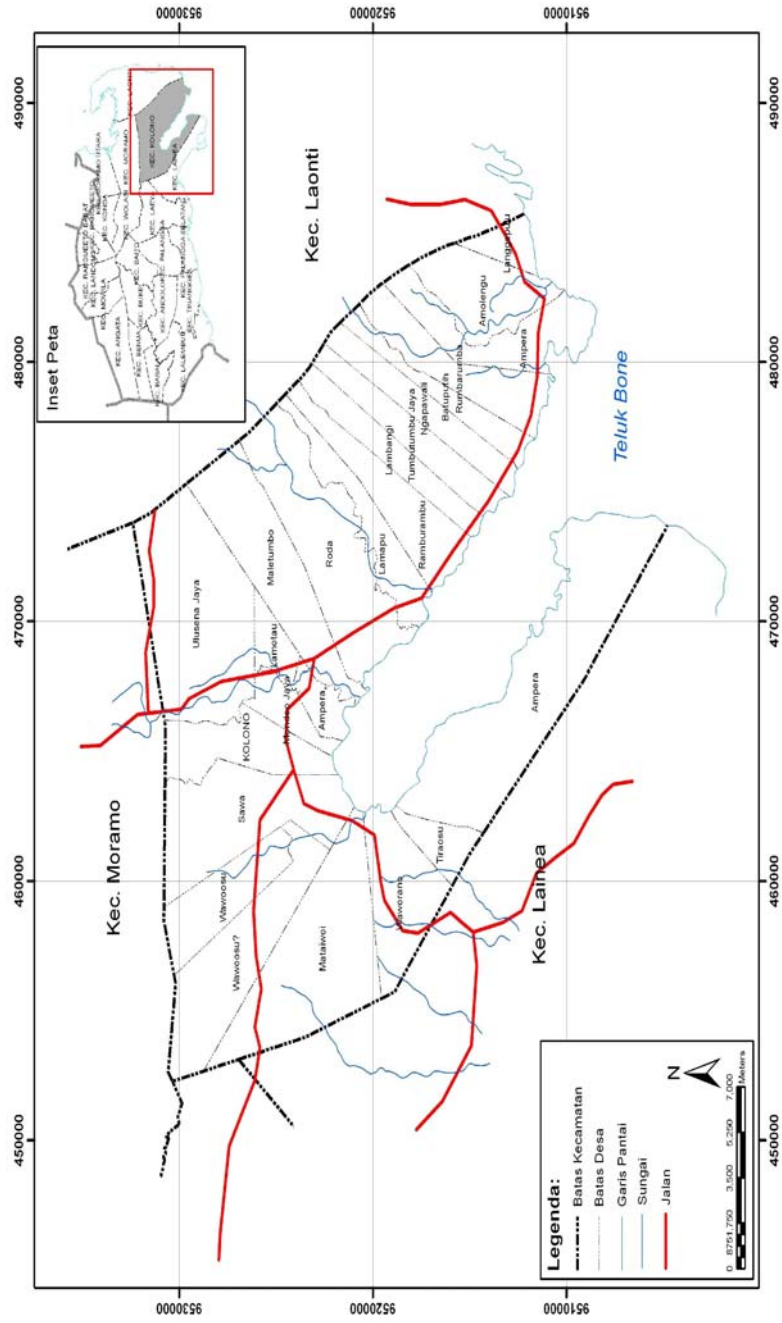
1. Desa Wawoosu
2. Desa Mataiwoi

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ruang lingkup wilayah studi ini, dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Kolono dan Desa Wawoosu serta Desa Mataiwoi.



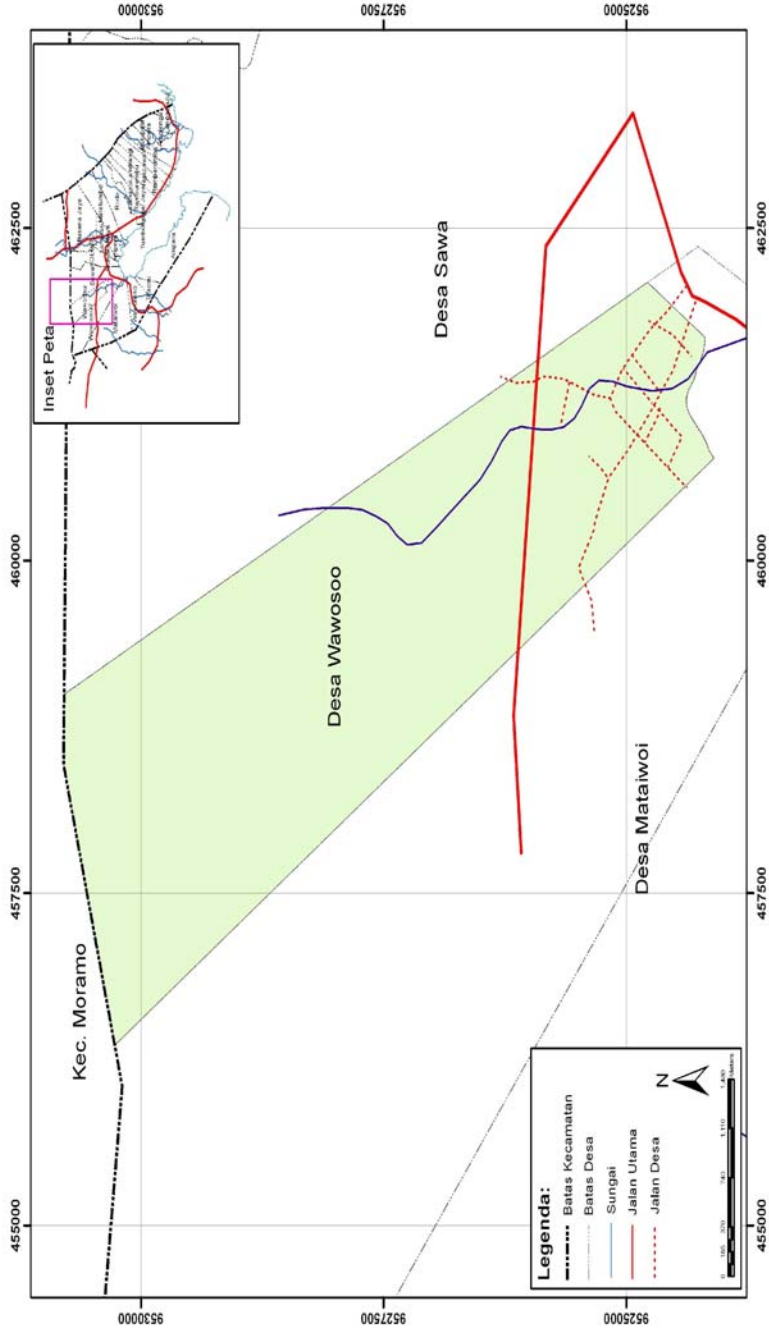
Sumber: Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2008

GAMBAR 1.2
PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN KONAWE SELATAN



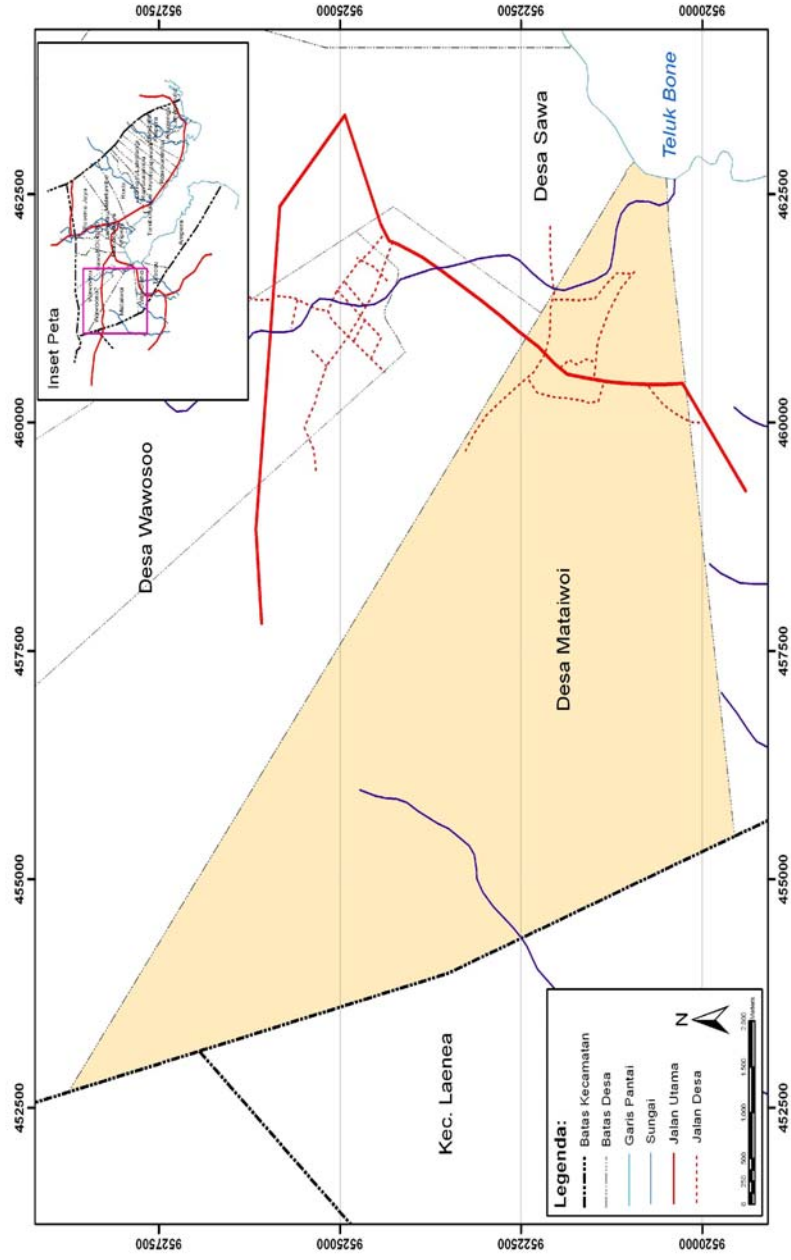
Sumber: Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2008

GAMBAR 1.2
PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KOLONO



Sumber: Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2008

GAMBAR 1.3
PETA ADMINISTRASI DESA WAWOOSU

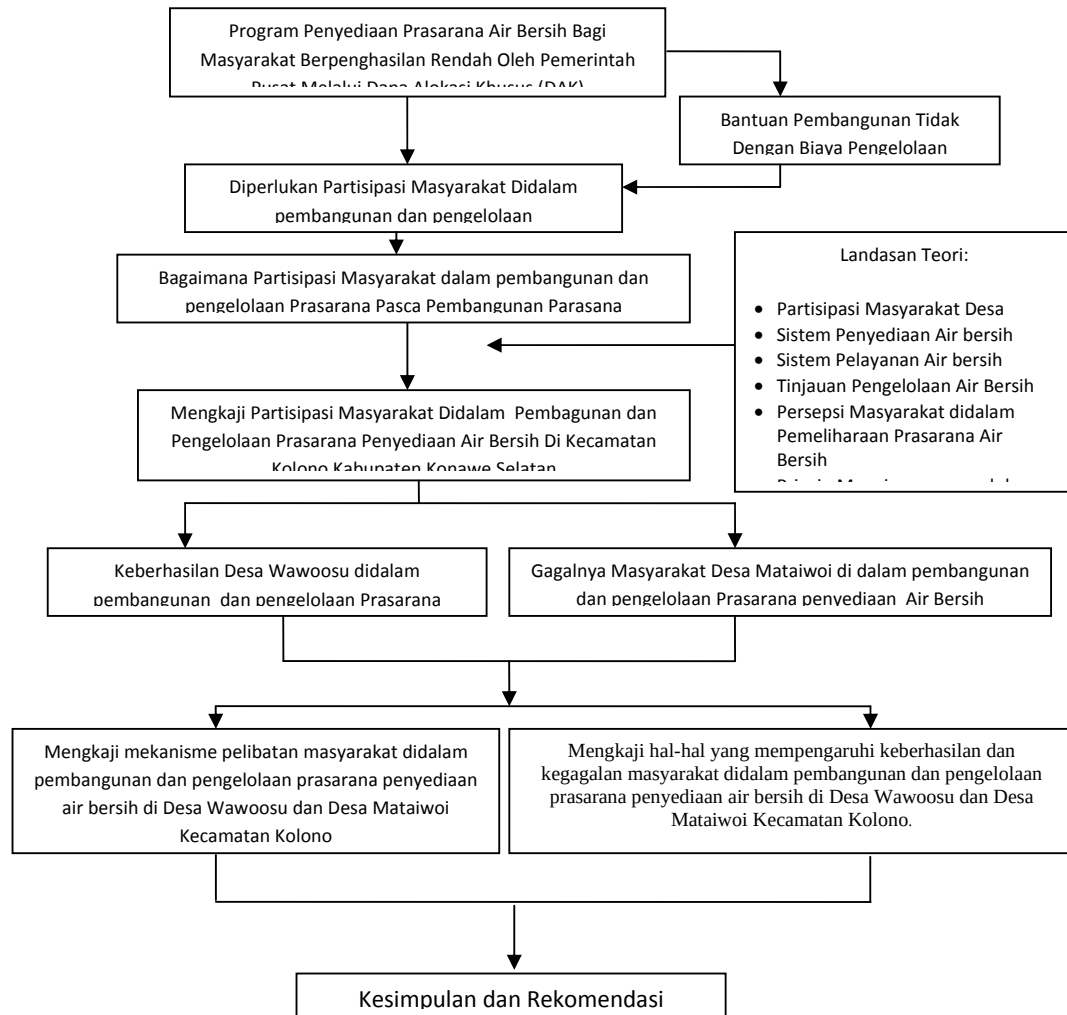


Sumber: Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2008

GAMBAR 1.4
PETA ADMINISTRASI DESA MATAIWOI

1.5 Kerangka Pemikiran

Dari semua uraian diatas maka Kerangka Pemikiran didalam penelitian adalah sebagai berikut:



Sumber: Penulis 2010

GAMBAR 1.5

1.6 Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah *kualitatif deskriptif*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme dan penyebab keberhasilan dan kegagalan pelibatan masyarakat didalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono. Tujuan tersebut menggambarkan bahwa penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat secara mendalam, oleh karena itu pendekatan penelitian yang dilakukan ini didasarkan pada kondisi empirik yang ditemukan di lapangan yang menggambarkan suatu fenomena berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti dan mempunyai keterkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan (Yin,1996).

Pendekatan deskriptif bertujuan memaparkan data hasil penelitian (Silalahi, 2009). Studi deskriptif dimaksudkan untuk melihat Penelitian dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi di Desa Waworano dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dalam hal Pemeliharaan Prasarana Penyediaan Air Bersih dari data dan informasi yang didapatkan dalam penelitian.

1.6.2 Metode Penelitian

Dengan dasar pendekatan penelitian seperti yang telah dijelaskan, maka penelitian ini difokuskan sebagai penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana: multi sumber bukti dimanfaatkan (Yin,1996). Lebih lanjut Yin menyampaikan bahwa untuk mengintrodusir studi kasus itu lebih banyak berkuat pada atau berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan "*how*" (bagaimana) dan "*why*" (mengapa) dalam kegiatan

penelitian. Pada dasarnya pertanyaan mengapa lebih *exploratif* dari kasus yang diteliti, yaitu berupa penelitian yang terbuka dan mencari-cari sementara pengetahuan peneliti terhadap yang diteliti masih terbatas. Dalam penelitian ini pertanyaan bagaimana akan mencari mekanisme dari partisipasi yang ada di masyarakat. Pertanyaan mengapa bersifat *explanatori* dari kasus yang diteliti.

Dalam penelitian lebih ditekankan kepada mekanisme pelibatan masyarakat dan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan peran serta masyarakat didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih. Hal ini disesuaikan dengan fakta dan fenomena yang terjadi dimana suatu problem atau situasi tertentu dipahami dengan amat mendalam dan dapat mengidentifikasi kasus yang kaya dengan informasi (Patton, 2009).

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Bukti atau data untuk keperluan studi kasus bisa berasal dari enam sumber yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamat langsung, observasi partisipasi dan perangkat-perangkat fisik (Yin, 2009).

Teknik pengumpulan data secara umum dibagi menjadi dua, yaitu: pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada objek penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan (*observasi*) langsung maupun wawancara (*Interview*) serta penyebaran angket/kuesiner, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan peneliti dengan cara tidak langsung ke objek penelitian, tetapi melalui penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian (Singaribun, 1995).

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas dua cara, yaitu:

1.6.3.1 Observasi Lapangan

Menurut Sugiono (2004), observasi digunakan apabila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam. Teknik observasi dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan guna melihat langsung kondisi empiris peran serta masyarakat didalam Pemeliharaan Prasarana Penyediaan Air Bersih. Observasi ini termasuk didalamnya mengkaji berbagai sumber data sekunder yang ada atau kepustakaan yang tersedia seperti dokumen perencanaan, laporan, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen penting lainnya yang mendukung tujuan penelitian. Observasi lapangan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan informasi, pemahaman lebih detail atas objek penelitian diantaranya beberapa *best practice* dan *failed story* mengenai pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih baik di dalam maupun luar negeri.

1.6.3.2 Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*Trangulasi*); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan oleh kepustakaan. Salah satunya adalah cara pembagian menurut Patton (1980) sebagai berikut: (a) wawancara pembicaraan informal, (b) pendekatan menggunakan petunjuk

umum wawancara, dan (c) wawancara baku terbuka. Untuk pembagian wawancara yang dilakukan oleh Patton didasarkan atas perencanaan pertanyaannya.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara terhadap informasi kunci yang dianggap mengetahui dengan persis permasalahan yang diteliti dan untuk memperoleh informasi mengenai apa saja yang melatarbelakangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana pasca pembangunan di Kecamatan Kolono.

Sasaran wawancara adalah informan kunci yaitu orang yang sangat berpengetahuan dan bisa menyampaikan gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah atau berguna dalam memahami apa yang sedang terjadi (Patton, 2006). Dalam hal ini informasi kunci yaitu pihak yang terkait langsung dengan penelitian, terdiri atas:

1. Pihak Pemerintah
 - Dalam hal ini Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan.
 - Kepala Desa beserta perangkat desa, desa-desa lokasi penelitian.
2. Masyarakat dan Tokoh Masyarakat

Masyarakat yang tinggal di desa lokasi penelitian dan tokoh masyarakat yang mengetahui kondisi fisik prasaran air bersih serta aktifitas sosial budaya masyarakat desa setempat.
3. Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP)

Kelompok Pengguna dan Pemelihara dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat desa setempat terdiri dari beberapa orang, biasanya sekitar 3 – 5 orang yang terdiri dari: Ketua, Bendahara dan Anggota yang memiliki pengalaman teknis untuk melakukan perawatan dan perbaikan prasarana yang rusak.

1.6.4 Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan:

1. Data yang akan digunakan untuk mengkaji mekanisme pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi.
2. Data yang akan digunakan untuk mengkaji hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan masyarakat di dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono.

Data sekunder adalah data primer yang telah di olah atau di analisa. Data ini nantinya akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel ataupun diagram-diagram yang dapat menguraikan dan menjelaskan kondisi materi kajian. Data sekunder ini diperoleh dari dinas/instansi yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.

1.6.5 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah mengubah data yang sudah berhasil didapat menjadi sebuah informasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah untuk mendapatkan data yang siap dianalisis (*getting data ready for analysis*). Kualitas pengolahan data menentukan kualitas data yang akan di analisis dan karenanya menentukan kualitas hasil analisis data. Tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Penyuntingan/edit data, yaitu proses memeriksa kembali kualitas data, yang diperiksa kembali adalah kelengkapan, konsistensi, ketepatan, keseragaman dan relevansi. Apabila data yang didapat menunjukkan ada cacat yang disebabkan tidak terpenuhinya satu atau beberapa dari syarat data maka harus dilakukan pengumpulan data ulang ke lapangan untuk mendapatkan data yang diharapkan.
2. Pengkodean data, yaitu satu tahap kunci dari penelitian kualitatif. Pengkodean adalah suatu proses pengklasifikasian tanggapan atau jawaban menjadi kategori yang lebih bermakna. Mengkode berarti memberi angka pada tiap kategori jawaban sehingga tiap jawaban yang telah disusun dalam suatu kategori tertentu memiliki kod tersendiri berupa angka. Kategori akan lebih bermakna jika untuk setiap kategori dari tiap jawaban diberi bentuk simbol (biasanya angka).

1.6.6 Teknik Analisis

Berdasarkan *research question* dan tujuan penelitian ini maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan strategi penelitian studi kasus karena data yang diperoleh adalah data kualitatif yang berupa kumpulan yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi, pertanyaan penelitian dan data yang dikumpulkan menjadi dasar dalam metode kualitatif.

Pada penelitian kualitatif, menurut Lincoln dan Guba (1985), penelitian ini sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor konseptual. Jadi, maksud *sampling* dalam hal ini ialah menjangkau sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*). Dengan demikian tujuannya bukan memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik.

Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2009) dikatakan bahwa kegiatan analisis terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan ini terjadi secara terus-menerus selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan dapat diverifikasi.
2. Penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang akan dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian-penyajian tersebut.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, lamanya waktu untuk mendapatkan kesimpulan akhir bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan

lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan.

Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode analisis studi kasus yang difokuskan berdasarkan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknis analisis. Adapun teknik analisisnya adalah sebagai berikut: pertama-tama kajian untuk mengetahui mekanisme pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi dengan teknik kajian naratif. Tujuannya adalah mengkaji mekanisme partisipasi masyarakat desa setempat didalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahapan pengelolaan prasarana terbangun. Selanjutnya adalah kajian untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan partisipasi masyarakat didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi. Teknik kajian naratif dengan melihat pentingnya untuk menyesuaikan anggaran pembangunan, teknologi tepat guna, dan proses tahapan pembangunan dengan kapasitas masyarakat desa setempat.

1.6.7 Keaslian Penelitian

Sejauh yang Peneliti ketahui, kajian tentang partisipasi masyarakat didalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Mataiwoi dan Desa Wawoosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan, pasca pembangunan yang dilaksanakan oleh kontraktor melalui program bantuan yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu terutama diperdesaan yang belum terlayani oleh PDAM, program ini merupakan bantuan Pemerintah Pusat yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) belum ada peneliti yang mengangkat dalam bentuk tesis. Adapun penelitian dengan tema yang sama pernah dilakukan oleh Wan Evrizal dengan lokasi di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, Edison Tandungan dengan lokasi di Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, Ibrahim Surotinodjo dengan lokasi di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Gorontalo, dan Linda Donarika Marbun dengan lokasi di Kelurahan Sumur Pacing dan Manis Jaya Kota Tangerang.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya tidak mempunyai topik, lokasi dan aspek penelitian yang sama dengan yang penulis teliti yaitu untuk mengkaji partisipasi

masyarakat didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan hal tersebut maka keaslian dari penelitian dalam rangka penyusunan tesis berjudul Partisipasi masyarakat di Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan apabila terdapat kesamaan adalah pada kajian pustaka atau teori yang melandasi penelitian ini. Tabel keaslian penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

TABEL I.1

KEASLIAN PENELITIAN

Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metodologi/ Alat	Sasaran Penelitian
Wan Evrizal (2006)	Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana Pasca Pelaksanaan Program P2D di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi serta usaha-usaha masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) yang dikerjakan langsung masyarakat di Kecamatan Bantan	Metode Kuantitatif dan Kualitatif dengan Pendekatan Partisipatif dan Deskriptif Analitik	1. Mengidentifikasi Karakteristik Masyarakat Dalam Pemeliharaan Prasarana P2D Di Kecamatan Bantan. 2. Menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dalam pemeliharaan prasarana P2D berupa: usulan, saran, kritik, tenaga, uang/dana dan bahan/material dan frekuensi kehadiran, keaktifan berdiskusi dan kegiatan fisik, keterlibatan dalam pengambilan keputusan. 3. Menganalisis keterkaitan/korelasi faktor internal yang terdiri dari: usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, jenis pekerjaan, serta faktor eksternal, peran kepala desa, konsultan dan tokoh masyarakat yang ada di masyarakat.

				4. Merumuskan usulan dan merekomendasikan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca pelaksanaan P2D di Kecamatan Bantan.
Edyson Tandungan (2007)	Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Rutin Jalan Pada wilayah Laeya Kabupaten Konawe Selatan	Mengetahui tingkat dan bentuk peran serta masyarakat disekitar ruas jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan di wilayah Kecamatan Laeya kabupaten Konawe Selatan.	Metode Analisis Pendekatan Kuantitatif	1. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat peran serta masyarakat dalam pemeliharaan rutin jalan. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk peran serta masyarakat dalam pemeliharaan rutin jalan.
Ibrahim Surotinojo (2007)	Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana Sanitasi di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Gorontalo	Mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi tingkat masyarakat masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam	Pendekatan Deskriptif Kualitatif	1. Mengidentifikasi dan menganalisa bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sanitasi oleh masyarakat (Sanimas). 2. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Program Sanimas.

		pemeliharaan sanitasi di Desa bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo		
Linda Danorika Marbun (2010)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Prasarana Pasca Program NUSSP Di Kelurahan Sumur Pacing Dan Manis Jaya Kota Tangerang	Mengkaji partisipasi masyarakat di kelurahan sumur pacing dan manis jaya dalam pemeliharaan pasca program NUSSP serta mengkaji hal-hal yang mempengaruhi partisipasi tersebut	Pendekatan Kualitatif dengan Fokus Penelitian Studi Kasus	1. Mengkaji mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca program NUSSP. 2. Mengkaji hal-hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca program NUSSP. 3. Mengkaji sejauh mana hasil dari partisipasi masyarakat di tiap lokasi penelitian dalam pemeliharaan prasarana pasca program NUSSP.
Elmi Sumiyarsono (2010)	Partisipasi Masyarakat di Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih di Desa Wawoosu Dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan	Mengkaji mekanisme dan penyebab keberhasilan dan kegagalan pelibatan masyarakat di dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa	Pendekatan Kualitatif dengan Fokus Penelitian Studi Kasus	1. Mengkaji mekanisme pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono kabupaten Konawe Selatan. 2. Mengkaji hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan

		Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan		air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono kabupaten Konawe Selatan. 3. Menyusun rekomendasi bagi penyempurnaan program bantuan pembangunan prasarana penyediaan air bersih yang diperuntukkan buat masyarakat miskin oleh Pemerintah Pusat yang di danai dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
--	--	--	--	---

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri atas sub bab dan sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup substansial dan ruang lingkup spasial, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan studi berdasarkan literatur yang digunakan. Secara garis besar pada bab ini berisikan partisipasi masyarakat di dalam upaya pemeliharaan prasarana air bersih.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Pada bab ini menguraikan mengenai gambaran kondisi fisik prasarana penyediaan air bersih, gambaran umum wilayah dan karakteristik penduduk di wilayah studi.

BAB IV ANALISA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAGUNAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR BERSIH

Bab ini berisi mengenai analisa-analisa yang dilakukan untuk mencapai tujuan studi. Terdapat dua analisa dalam studi ini, yaitu: Analisis mekanisme partisipasi masyarakat desa dalam Pembangunan dan Pemeliharaan prasarana penyediaan air bersih dan analisis mengenai hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dari hasil analisa pada Bab sebelumnya dan akan disimpulkan pada Bab ini. Kesimpulan akan digambarkan tentang pencapaian studi dan sekaligus memberikan gambaran mengenai mekanisme pelibatan masyarakat desa didalam setiap tahapan proses pembangunan dan pengelolaan prasarana serta hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan partisipasi masyarakat didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih di Kecamatan Kolono. Saran terhadap berbagai pihak juga akan menjadi keluaran. Bab V. Saran tersebut akan dihasilkan dari analisa terakhir mengenai perumusan rekomendasi mengenai program penyediaan air bersih bagi masyarakat kurang mampu yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB II
KAJIAN LITERATUR
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA
PENYEDIAAN AIR BERSIH

2.1 Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Definisi partisipasi dalam pembahasan ini diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. sedangkan masyarakat mengambil sebagian kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dan masyarakat mendapat manfaat atau keuntungan dari pembangunan tersebut. Dalam hubungannya dengan pembangunan, definisi partisipasi menurut PBB (dalam Slamet, 1994) adalah sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda (a) didalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakat dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut, (b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela; dan (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek. Oleh karena itu, pelibatan seseorang dalam berpartisipasi harus dilakukan pada proses-proses perencanaan, pelaksanaan dan operasional.

Sementara partisipasi masyarakat menurut Godschalk (dalam Yulianti, 2000) merupakan pengambilan keputusan secara bersama-sama antara masyarakat dan perencana, sedangkan menurut Salusu (1998) partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada

keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang.

Pengertian partisipasi menurut Sutarto (1980) adalah turut sertanya seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Pengertian tersebut menekankan pada keikutsertaan seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Bentuk partisipasi yang merupakan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan setidaknya terdapat dua tipe partisipasi, Koentjaraningrat (1980) menyatakan bahwa:

1. Partisipasi dalam aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan.
2. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan.

Bentuk partisipasi lain yang lebih lengkap dikemukakan oleh Bryan dan White dalam Ndraha (1983) dimana disamping ada partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan juga terdapat partisipasi untuk pemanfaatan suatu proyek. Selain pendapat tersebut, Simanjuntak (1982) mengemukakan pendapat bahwa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat perlu adanya klasifikasi dari partisipasi tersebut. Selanjutnya dikatakan Bryan dan White dalam Ndraha (1983) bahwa partisipasi dapat berbentuk:

1. Partisipasi buah pikiran.
2. Partisipasi harta dan uang.
3. Partisipasi tenaga atau gotong-royong.
4. Partisipasi sosial.
5. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten.

Jadi partisipasi adalah juga berfungsi dari manfaat di samping pengorbanan atau resiko, beberapa pengertian partisipasi diatas dapat di bangun dan diurutkan menjadi tahap-tahap terjadinya suatu resiko. Pada tahap pertama partisipasi merupakan proses perencanaan untuk menentukan program-program dan proyek-proyek apakah yang akan dibangun.

Tahap kedua partisipasi adalah keikutsertaan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tahap ini dalam pembangunan adalah implementasi dari program-program dan proyek-proyek yang telah disetujui atau diputuskan dalam tahap pengambilan keputusan. Tahap pelaksanaan ini dapat berupa keikutsertaan secara fisik seperti pemberian tenaga maupun pemberian sumbangan uang dan bahan-bahan material untuk pembangunan.

Tahap ketiga partisipasi adalah tahap pemanfaatan yakni tahap dimana masyarakat memperoleh hasil-hasil dari program dan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Tahap penerimaan hasil ini merupakan perwujudan dalam partisipasi. Oleh sebab itu, pada tahap penerimaan hasil diharapkan diikuti oleh tumbuhnya tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga agar hasil pembangunan dapat dirasakan dan mampu memberikan manfaat sesuai fungsinya, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan tahapan-tahapan partisipasi diatas, maka dapat di rumuskan pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan seseorang dalam pembangunan secara sadar baik dalam tahap perencanaan, implementasi dan pemanfaatan dalam menerima hasil-hasil pembangunan.

Berbicara partisipasi masyarakat berarti akan selalu berkait dengan upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas yang telah di rencanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut merupakan energi yang mendorong bergeraknya roda pembangunan atau kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang di laksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab, demikian antara lain yang di jelaskan Soelaiman (1985). Secara konseptual partisipasi masyarakat merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat, dengan demikian ia berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial.

Pendapat lainnya tentang partisipasi masyarakat, dikemukakan oleh Cary dalam Iskandar (1994) bahwa tekanan utama partisipasi warga masyarakat adalah pada

kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama, yang tumbuh dari kepentingan dan masalah-masalah bersama, yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri. Partisipasi tidak lain adalah hasil dari konsensus sosial warga masyarakat akan arah perubahan sosial yang mereka harapkan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan peningkatan mutu dari gotong-royong tradisional yang bersifat spontanitas. Kesukarelaan dan bersifat insidental, kepada suatu usaha perencanaan yang memerlukan pemikiran dan keputusan yang rasional. Pimpinan dan orang-orang yang di pimpinnya harus pula peka atau tanggap terhadap aspirasi kebutuhan dan pikiran-pikiran yang hidup dimasyarakat, sehingga perumusan rasional tadi pada hakikatnya merupakan penjabaran dari apa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Stuart Chapin, Faisal K. Dan Joseph F. Stepanek dalam Iskandar (1994) mencatat ada Lima aspek yang terkait dengan tipe-tipe masyarakat, yaitu dari hasil penilaian masyarakat tentangan yang rendah hingga ke penilaian masyarakat tentangan yang tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Keanggotan seseorang dalam organisasi atau kelompok kegiatan masyarakat.
2. Intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat.
3. Intensitas seseorang dalam memberikan sumbangan dana atau keuangan bagi kepentingan bersama.
4. Keanggotaan dalam berbagai kepanitiaan yang dibentuk dalam masyarakat.
5. Posisi kepemimpinan seseorang dalam berbagai organisasi/ kelompok kegiatan.

Berdasarkan pendapat tersebut, nampaknya partisipasi masyarakat lebih dititikberatkan kepada aktivitas seseorang dalam suatu organisasi sebagai pencerminan daripada partisipasi. Sedangkan menurut Rozen Berg dalam Tjokrowinoto (1984), partisipasi merupakan “keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pikirannya bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggungjawab terhadap organisasi tersebut”.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat dinyatakan dalam bentuk pemikiran, keterampilan/keahlian, tenaga, harta benda atau uang (Keith Davis dalam

Santoso (1988) sejalan dengan itu, Surbakti (1984) mengemukakan bahwa kegiatan yang dapat di golongkan sebagai partisipasi antara lain:

1. Ikut mengajukan usul-usul mengenai suatu kegiatan.
2. Ikut serta bermusyawarah di dalam mengambil keputusan tentang alternatif program yang di anggap paling baik.
3. Ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan termasuk di sini memberi iuran atau sumbangan materiil.
4. Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan.

Dengan demikian ukuran peran serta masyarakat lebih tepat bila dijelaskan secara kualitatif. Dalam hal ini partisipasi dapat di definisikan kedalam sebuah tipologi yang memperlihatkan adanya perbedaan penilaian masyarakat tentang intensitas keterlibatan masyarakat (Whyte dalam Bourne, 1984). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyerahan tanggungjawab dapat di bedakan menjadi (Hamdee dan Goethert, 1997):

1. Tidak ada sama sekali (*none*): *outsider* semata-mata bertanggungjawab pada semua pihak, dengan tanpa keterlibatan masyarakat.
2. Tidak langsung (*indirect*): sama dengan tidak ada partisipasi tetapi informasi merupakan sesuatu yang spesifik.
3. Konsultatif (*consultative*): *outsider* mendasar atas informasi dengan tidak langsung di peroleh dari masyarakat.
4. Terbagi (*shared*): masyarakat dan *outsider* berinteraksi sejauh mungkin secara bersamaan.
5. Pengendalian penuh (*full control*): masyarakat mendominasi *outsider* membantu ketika di perlukan.

Penilaian masyarakat tentang partisipasi di mana masyarakat memegang kendali merupakan tujuan ideal. Kualitas keterlibatan di tunjukan oleh manfaat kegiatan yang di ambil dalam kerangka kegiatan keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pengertian partisipasi yang mengandung makna pengambilalihan sebagian kegiatan. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak skala dan jumlah kegiatan yang diambil alih, semakin tinggi partisipasi masyarakat. Dalam lingkungan wilayah, semakin banyak indi vidu berpartisipasi, maka semakin tinggi partisipasi dalam wilayah tersebut.

Dalam hubungan dengan pembangunan, khususnya pembangunan di kelurahan, hal ini berarti keterlibatan mental, emosional, energi seseorang yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir, perasaan dan lain-lainnya bagi tercapainya tujuan secara bersama-sama dengan penuh tanggungjawab terhadap desa di mana mereka tinggal. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dalam hal sejauh mana partisipasi, prakarsa dan swadaya masyarakat yang bersangkutan telah berhasil di penilaian masyarakat tentangkan dan dibina, di samping hal-hal fisik dari padanya yang diharapkan.

Pada tahap pembangunan biasanya peranan pemerintah biasanya besar. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha pemerintah. Bahkan di negara yang menganut sosialisme yang murni, seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggungjawab Pemerintah. Namun dalam keadaan negara berperan besarpun, partisipasi masyarakat di perlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan (Kartasmita, 1997).

Pada kenyataannya, kontribusi masyarakat di samping swasta, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah sendiri, di pandang sebagai suatu sumbangan pokok dalam pembangunan. Seringkali dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat tersebut belum sepenuhnya memuaskan, namun hasil suatu proyek yang telah di hasilkan dari partisipasi masyarakat, jelas lebih menguntungkan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat, di bandi ngkan dengan proyek tanpa melibatkan masyarakat setempat. Hal ini berarti, bahwa masyarakat tidak hanya di lihat sebagai objek dalam setiap pembangunan, tetapi lebih lebih dari itu, sasarannya adalah membuat masyarakat sebagai subjek dalam hal ini mitra pembangunan dalam suatu proses yang berawal dari perencanaan atau penyusun program sampai pada pelaksanaan bahkan operasi pemeliharaan.

Pembangunan daerah disadari merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, sedangkan pemerintah Pusat dan Propinsi berperan sebagai pendukung dan pembina. Sebagai konsekuensinya, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang penting dari suatu program pembangunan.

2.1.2 Model Logika yang Mendasari Strategi Partisipatori

Partisipasi dalam pembangunan, menurut Lund (dalam Mikkelsen, 2003), akan menghadapi dua pandangan yang berasal dari dua logika, logika yang didasarkan pada efisiensi dan logika yang didasarkan pada proses pemberdayaan. Kedua metode tersebut dapat dijelaskan seperti uraian di bawah ini.

TABEL 2.1

LOGIKA PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT

Strategi	Efisiensi	Pemberdayaan
Perumusan Dasar	Pembangunan melalui kemitraan <i>Top Down</i> dengan masyarakat (jangkauan kebawah yang inklusif)	Pembangunan alternatif yang di rumuskan oleh masyarakat dan organisasi setempat (jangkauan ke atas yang integratif)
Asumsi Normatif	Masyarakat miskin harus dapat memenuhi kabutuhan dasar mereka seperti yang di tentukan oleh negara	Masyarakat miskin harus memperoleh proyek pembangunan yang mereka sendi ri butuhkan
Asumsi Deduktif	Masyarakat berpartisipasi sebelumnya dalam proses pembangunan. Karena itu mereka harus di buat mampu untuk lebih berpartisipasi lagi	Berarti bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka.
Asumsi teoritis sebab akibat	1. Tujuan pembangunan dapat di capai secfara harmonis dan konflik di antara kelompok-kelompok sosial dapat di rendam melalui pola demokrasi setempat. Karena itu partisipasi masyarakat setempat adalah mungkin. 2. Partisipasi masyarakat berdampak positif terhadap pembangunan. 3. partisipasi masyarakat merupakan alat positif untuk memobilisasi sumber-sumber setempat (manusia dan alam) dengan tujuan melaksanakan program pembangunan tertentu.	1. Tujuan pembangunan dapat di capai secara harmonis dan konflik antara kelompok-kelompok masyarakat dapat di rendam melalui pola demokrasi setempat. Karena itu partisipasi masyarakat adalah mungkin. 2. Pembagunan menjadi positif bila ada partisipasi masyarakat. 3. Pembangunan masyarakat merupakan hal yang mutlak perlu untuk mendapat partisipasinya, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan kesejahteraan yang di tetapkan oleh masyarakat itu sendi ri memiliki untuk memaksa

	4.a Kurangnya partisipasi merupakan suatu ekspresi dari ketidakmampuan untuk berpartisipasi : kurangnya dana, pendid di kan dan sumber-sumber lain, serta tingkat organisasi rendah. 4.b Atau juga berarti bahwa rancangan program kurang di sesuaikan pada kebutuhan kelompok sasaran. Dalam hal ini perencanaan dan pelaksanaan prosedur yang menyimpang atau teknologi yang tidak tepat (hambatan operasional untuk berpartisipasi). Jadi hal itu menunjukkan perlunya perbaikan pada pendidikan, teknik, administrasi dan keuangan.	pemerintahnya. 4.a Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berarti penolakan secara (secara internal di kalangan anggota masyarakat itu dan secara eksternal terhadap pemerintah atau pelaksana proyek). 4.b Atau hal itu menunjukkan adanya struktur sosial yang tidak memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi (hambatan struktural untuk berpartisipasi). Jadi ini merupakan konflik sosia yang harus di atasi melalui musyawarah mufakat, kompromi atas kebijakan yang bertentangan itu menghilangkan struktur yang tidak memungkinkan partisipasi melalui reformasi politik.
--	---	---

Sumber: Mikkelsen, 2003

2.1.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi dalam beberapa tingkatan, dari yang bertingkat non partisipasi sampai pada kekuasaan warga. Menurut Arstein dalam Panudju, (1999) penilaian masyarakat tentang partisipasi atau peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah digolongkan menjadi delapan tipologi penilaian masyarakat. Secara garis besar tipologi masyarakat tentang partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Manipulation* atau Manipulasi

Merupakan tingkatan penilaian masyarakat tentang partisipasi ini yang paling rendah karena masyarakat hanya dipakai namanya saja sebagai anggota dalam berbagai badan penasehat. Tidak ada peran nyata, karena hanya diselewengkan sebagai publikasi oleh penguasa.

2. *Therapy* atau Terapi

Pada tingkatan ini masyarakat diperlakukan seolah-olah seperti proses penyembuhan pasien penyakit jiwa dalam group terapi. Masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, namun hal tersebut hanya ditujukan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari pada mendapat informasi atau usulan-usulan.

3. *Information* atau Pemberi Informasi

Merupakan tahap pemberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan. Biasanya hanya di berikan secara utuh satu arah, dari penguasa kerakyatan, tanpa adanya kemungkinan umpan balik, sehingga kecil kesempatan rakyat untuk mempengaruhi rencana bagi kepentingan masyarakat, biasanya dilakukan melalui media berita, pamflet, poster dan tanggapan atas pertanyaan.

4. *Consultation* atau Konsultasi

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka apabila konsultasi di sertai dengan cara-cara partisipasi yang lain, maka tingkat keberhasilannya akan rendah, mengingat tidak adanya jaminan terhadap ide-ide masyarakat. Tahap ini biasanya di lakukan dengan cara pertemuan lingkungan, survey tentang pola pikir masyarakat dan dengan pendapat publik.

5. *Placation* atau Perujukan

Pada penilaian ini masyarakat mulai mempunyai pengaruh, meskipun dalam berbagai hal masih ditentukan oleh penguasa. Beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu di masukkan sebagai anggota dalam badan kerjasama. Usulan-usulan dari masyarakat berpenghasilan rendah dapat di kemukakan, tetapi sering tidak diperhitungkan karena kemampuan dan kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit bila dibandingkan dengan anggota-anggota instansi pemerintah lainnya.

6. *Partnership* atau Kemitraan

Pada penilaian masyarakat tentang ini: atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara masyarakat dengan pihak penguasa. Disepakati juga pembagian tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan, dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

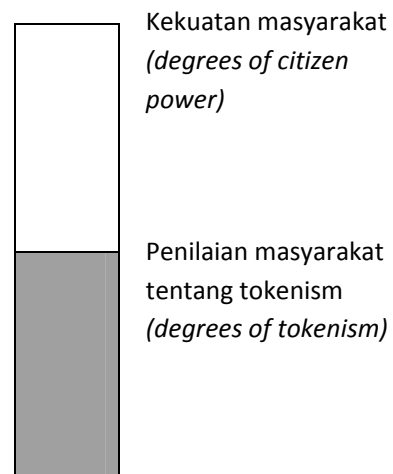
Setelah adanya kesepakatan tersebut maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.

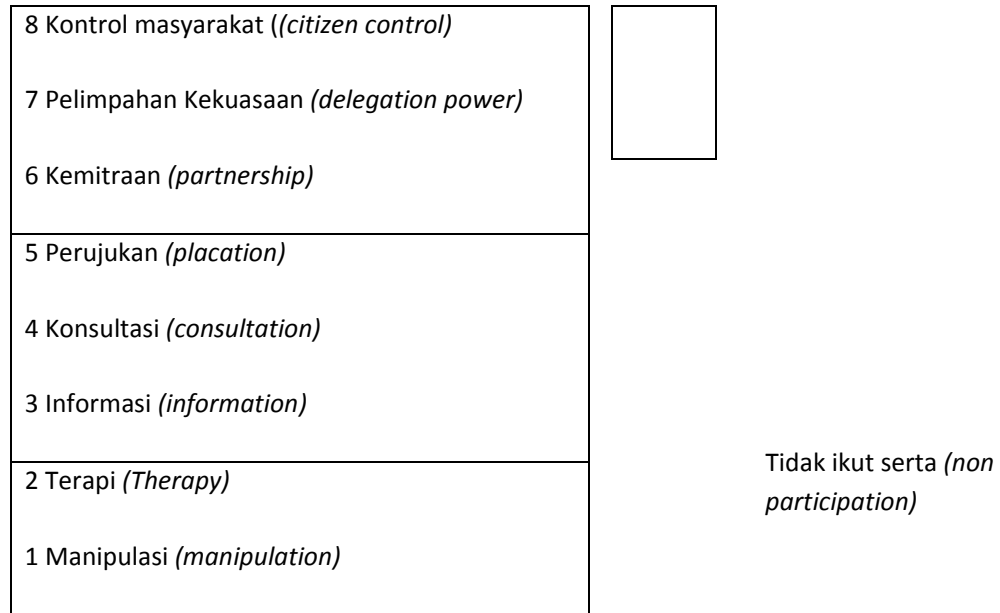
7. *Delegated Power* atau Pelimpahan Kekuasaan

Pada penilaian ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat berhak menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan masalah, pemerintah harus mengadakan tawar-menawar tanpa adanya tekanan.

8. *Citizen Control* atau Masyarakat yang Mengontrol

Pada penilaian ini, masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengukur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh dibidang kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga dapat menghubungi sumber-sumber dan tanpa perantara pihak ketiga.





Sumber : Panudju (1999)

GAMBAR 2.1
TIPOLOGI PENILAIAN MASYARAKAT TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DARI ARNSTEIN

Dari kedelapan tipologi tersebut, menurut Arnstein secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Tidak ada peran serta atau *non participation* yang meliputi *manipulation* dan *therapy*
2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau *degrees of tekonomism* yang meliputi *informing*, *consultation* dan *placation*.
3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau *degrees of citizen power* yang meliputi *partnership*, *delegated power* dan *citizen control*.

Berbeda dengan yang terdahulu yang telah di jelaskan, maka secara tegas Bintaro, (1983) mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat

dapat berarti keterlibatan dalam proses menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Serta keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab pelaksanaan pembangunan juga keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi masyarakat sebagai partisipasi vertikal dan horisontal. Partisipasi vertikal terjadi dalam kondisi tertentu dimana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana masyarakat berbeda dalam posisi bawahan pengikut atau klien. Partisipasi horisontal terjadi karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa dimana setiap anggota kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu sama lain dalam usaha bersama, maupun dalam rangka kegiatan dengan pihak lain. Dari pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa dampak partisipasi masyarakat yang ditumbuhkan dari atas, masyarakat cenderung lebih bersifat pasif, dan jika partisipasi itu bersifat horisontal, maka akan menumbuhkan sifat aktif dan mandiri.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan, sekaligus juga sebagai objek atau sasaran dari pembangunan, bukan saja mereka memberi tetapi juga sebagai pelaksana, penerima hasil dan mereka juga memelihara dan memperbaiki kerusakan prasarana air bersih yang berhasil dibangun. Namun demikian, persoalan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan seringkali berlangsung tidak efektif. Cukup banyak kendala yang timbul yang sering kali tidak mampu diantisipasi. Soelaiman (1985) menyebutkan beberapa hambatan atau kendala yang sebenarnya apabila di dayagunakan dengan baik akan menjadi faktor pendukung keberhasilan partisipasi, yaitu sebagai berikut:

1. Sikap sosial yang membudaya seperti paternalistik, feodal, superioritas/dominasi, yang memandang pegawai pemerintah bukan sebagai abdi negara tapi sebagai penguasa/raja.
2. Struktur dan pranata sosial yang berlapis-lapis cenderung mementingkan kesadaran akan kelasnya saja, tetapi kurang menghargai kelas atau kelompok lain.
3. Adanya sikap ketergantungan dan pasrah kepada nasib sebelum berusaha keras.
4. Kekecewaan yang mendalam pada masyarakat akibat adanya kesenjangan.
5. Kemiskinan atau penghasilan rendah, sehingga waktu dan tenaga tercurah habis untuk mencari nafkah.

6. Mobilisasi penduduk yang cukup tinggi, terutama adanya urbanisasi.
7. Program-program yang tidak berorientasi pada kebutuhan lokal.

Berdasarkan pendapat tersebut, sebenarnya persoalan pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat ditentangkan, manakala pimpinan organisasi beserta pengurusnya mampu membatasi atau mengurangi dan bahkan meniadakan hambatan-hambatan yang telah disebut di atas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya penggerakkan di segala aspek/bidang materiil (sarana prasarana penunjang), sebagaimana telah di uraikan terdahulu. Sedangkan menurut Midgley (1986) menyimpulkan terdapat empat pelaku yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat, yakni: pemerintah, pelaksana, fasilitator dan masyarakat itu sendiri. Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam berpartisipasi:

1. Hasil dari keterlibatan, artinya dalam berpartisipasi seseorang tidak akan antusias dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kegiatan jika dia merasa bahwa partisipasinya tidak mempunyai akibat bermakna pada hasil akhirnya.
2. Adanya kepentingan khusus yang berpengaruh secara langsung, masyarakat akan bersedia berpartisipasi jika individu tersebut merasa terkait (terlibat) dan mendapat keuntungan baik sebagai individu maupun kelompok dimana ia menjadi anggotanya sesuai keinginan dan kebutuhan mereka yang dapat dirasakan manfaatnya.

Keinginan masyarakat sebelum terlibat dalam proses partisipasi menurut Dusseldorp (1981) masyarakat sadar bahwa:

1. Situasi sekarang tidak memuaskan dan dapat atau harus diperbaiki.
2. situasi sekarang dapat diubah dan diperbaiki melalui kegiatan manusia.
3. Masyarakat merasa dapat dan harus berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4. masyarakat dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat, dan ada rasa percaya diri.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat tergantung pada kemauan individu yang meliputi tiga hal (PY. Chinchankar, 1984), yaitu: a) Mau membantu keuangan dari sumber sendiri, dalam bentuk tunai atau barang, b) Mau berbagi resiko dan tanggungjawab, c) Mau mengelola kekuatan dari sumber-sumber yang ada dengan persetujuan bersama.

Keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan kaitannya dengan partisipasi, menurut Dusseldorp (1981) terdapat dua bentuk partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yakni: a) Partisipasi bebas dan b) Partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara suka rela di dalam suatu kegiatan partisipasi tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan keyakinan tanpa di pengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain.

Sedangkan partisipasi terbujuk adalah jika seseorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakini melalui penyuluhan atau oleh pengaruh orang lain sehingga berpartisipasi secara sukarela di dalam kelompok aktivitas tertentu. Adapun partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara, yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum dan terpaksa keadaan sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dengan derajat pemaksaan yang berbeda-beda, misalnya anggota masyarakat wajib memelihara fasilitas sosial dan utilitas umum, hal ini tertuang di dalam peraturan/instruksi menteri dalam negeri. Partisipasi terpaksa karena kondisi ekonomi terjadi bila seseorang yang tidak turut di dalam suatu kegiatan akan mendapatkan kesulitan dalam aspek sosial ekonomi, misalnya bila seseorang tidak turut serta dalam pemeliharaan prasarana lingkungan di kampungnya maka ia akan disisihkan dari pergaulan tetangganya.

Jadi secara garis besar untuk mencapai tujuan yang melibatkan partisipasi masyarakat mencakup pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan tindakan (*action*) dari masyarakat itu sendiri.

Munculnya paradigma pembangunan partisipatoris mengindikasikan adanya dua perspektif: Pertama, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapat dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Kedua adalah membuat umpan balik (*feedback*) yang pada hakikatnya merupakan bagian tak terlepas dari kegiatan pembangunan.

Sejalan dengan hal itu, J. Pretty dan Guijt (1992) dalam Mikkelsen (2003) menjelaskan tentang implikasi praktis dari pendekatan partisipatoris, yaitu pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran, disamping bantuan pembangunan.

2.1.4 Keuntungan/ Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Menurut Conyers (1984), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi mempunyai sifat yang penting. Pertama, partisipasi masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai lokasi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek- proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, lalu Ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep "*man centred development*" yaitu suatu pembangunan yang di pusatkan pada kepentingan manusia, yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar alat pembangunan itu sendiri. Karena dalam proses pembangunan akan jauh lebih baik, bila sejak awal sudah mengikut sertakan masyarakat pemakai hasil pembangunan (Yudohusodo dalam Yulianti, 2000). Dengan demikian hasilnya akan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

2.1.5 Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat

Hambatan atau kendala dalam partisipasi tergantung kepada situasi setempat, ada kendala penting dalam partisipasi (Bappenas, 2001) yaitu :

1. Waktu, masyarakat akan meluangkan waktunya untuk proyek apabila mereka merasa bahwa proyek berguna.
2. Menyusun dan membuat pandangan mereka sendiri, partisipasi akan menjadi kendala apabila dalam forum-forum masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk menyalurkan pandangan mereka.
3. Sikap profesional, sikap dari para pelaksana (pendamping dan aparat pemerintah) harus berpihak kepada masyarakat. Mereka harus percaya kepada kemampuan masyarakat dan dapat membagi pengetahuannya.

Belajar dari pengalaman, semua kelompok masyarakat berbeda. Para pelaksana harus fleksibel dan mau belajar dari pengalaman serta mencoba beberapa metode dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kapasitas dari masyarakat dan institusi dapat berubah dengan sendirinya, mendapat pengakuan, dukungan dan menambah kepercayaan masyarakat.

2.2 Sistem Penyediaan Air Bersih

Sistem adalah gabungan beberapa komponen atau objek yang saling berkaitan. Dalam setiap organisasi sistem perubahan pada suatu komponen dapat menyebabkan perubahan komponen lainnya. Dalam sistem mekanis, komponen berhubungan secara “mekanis” misalnya komponen dalam mesin mobil. Dalam sistem “tidak mekanis” misalnya dalam interaksi sistem tata guna lahan dan jaringan air minum, komponen yang ada tidak dapat berhubungan secara mekanis, akan tetapi perubahan pada salah satu komponen lainnya (sistem jaringan), sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip sistem “mekanis” sama saja dengan sistem “tidak mekanis”.

Air bersih dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan paling esensial, sehingga perlu memenuhinya dalam jumlah dan kualitas yang memadai, selain untuk dikonsumsi air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan, karena melalui air dapat timbul berbagai jenis penyakit terutama penyakit perut, sehingga dengan adanya ketersediaan bersih dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang memadai, akan menjamin terciptanya kesehatan bagi masyarakat (Sutrisno, 2006).

Dalam tinjauan aspek teknis, penyediaan air bersih dibedakan menjadi dua sistem (Chatib, 1996), yaitu:

1. Sistem Penyediaan Air Bersih Individual (*Individual Water Supply System*).

Sistem penyediaan air bersih individual adalah sistem penyediaan air bersih untuk penggunaan pribadi atau pelayanan terbatas. Sumber air yang digunakan dalam sistem ini umumnya berasal dari air tanah. Hal ini disebabkan air tanah memiliki kualitas yang lebih baik dibanding sumber lainnya. Sistem penyediaan ini biasanya tidak memiliki komponen transmisi yang dibangun oleh pengembang untuk melayani suatu lingkungan perumahan yang dibangunnya. Berdasarkan uraian tersebut, yang termasuk dalam sistem ini adalah sumbu gali, pompa tangan dan sumbu bor (untuk pelayanan suatu lingkungan perumahan tertentu)

2. Sistem Penyediaan Air Bersih Komunitas (*Community/Municipality Water Supply System*)

Sistem penyediaan air bersih komunitas atau perkotaan adalah suatu sistem penyediaan air bersih untuk masyarakat umum atau skala kota, dan untuk pelayanan yang menyeluruh, termasuk untuk keperluan rumah tangga (domestik), sosial maupun industri. Pada umumnya sistem ini merupakan sistem yang lengkap dan menyeluruh bahkan kompleks, baik dilihat dari segi teknis maupun sifat pelayanannya. Sumber air yang digunakan umumnya air sungai atau danau yang memiliki kuantitas cukup besar. Sistem ini juga dapat mempergunakan beberapa macam sumber sekaligus dalam satu sistem sesuai kebutuhannya.

Sistem penyediaan air bersih meliputi berbagai peralatan seperti: tangki air bawah tanah, tangki air di atas atap, pompa-pompa, perpipaan dan sebagainya. Dalam peralatan ini, air minum harus dapat dialirkan ke tempat-tempat yang dituju tanpa mengalami pencemaran. Hal-hal yang menyebabkan pencemaran antara lain:

- a. Masuknya kotoran, tikus, serangga ke dalam tangki.
- b. Terjadinya karat dan rusaknya bahan tangki dan pipa.
- c. Terhubungnya pipa air bersih dengan pipa lainnya.
- d. Tercampurnya air minum dengan air jenis kualitas lainnya.
- e. Aliran balik (*backflow*) air jenis kualitas air ke dalam pipa air minum.

Pada saat ini sistem penyediaan air bersih yang banyak digunakan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sistem sambungan langsung
2. Sistem tangki atap
3. Sistem tangki tekan
4. Sistem tanpa tangki (*booster system*)

Tangki-tangki yang digunakan untuk menyimpan air minum haruslah dibersihkan secara teratur, agar kualitas air dapat dijaga (Noerbambang, 1993).

Secara umum terdapat lima sumber air yang dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat desa/kota, yaitu (Nace, 1976):

1. Air hujan, yaitu hasil dari kondensasi uap air yang jatuh ke tanah.
2. Air tanah, yaitu air yang mengalir dari mata air, sumur artesis atau diambil melalui sumur buatan.
3. Air permukaan, yaitu air sungai atau danau.
4. Desalinasi air laut, atau air tanah payau/asin.
5. Hasil pengolahan air buangan.

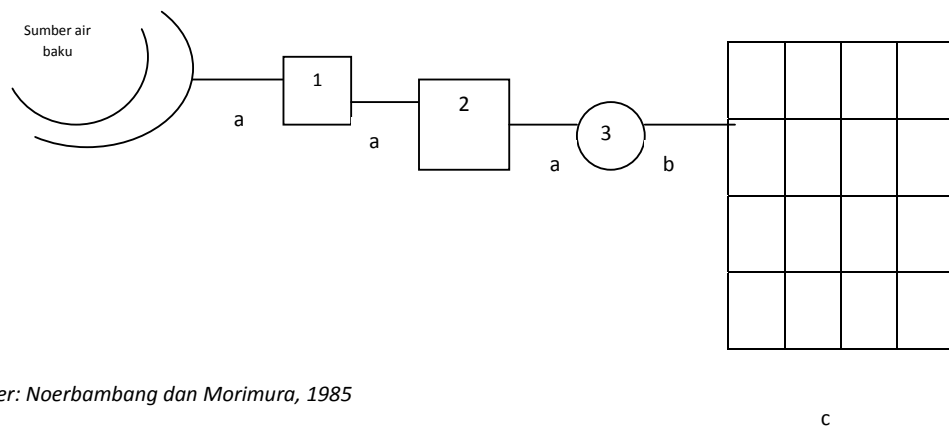
Dari kelima sumber diatas, air yang sering dimanfaatkan untuk air bersih adalah air tanah dan air permukaan ini menjadi pilihan utama, disebabkan kedua sumber tersebut mudah didapat, jumlahnya besar dan secara kualitas relatif lebih baik dan memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sebagai air bersih.

Disamping itu juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya air. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Noerbambang dan Morimura, 1985):

1. Kondisi meteorologi (suhu, tekanan atmosfer, angin dan lain-lain), mempengaruhi presipitasi dan evaporasi.
2. Kondisi topografi.
3. Intensitas curah hujan
4. Kondisi geologi (batuan)
5. Medan (*fisiografi*).

2.3 Sistem Pelayanan Air Bersih

Dalam pemanfaatan sumber daya air dikenal dengan system pelayanan umum , sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam pelayanan umum ini dikenal tiga sistem penyediaan air bersih (Noerbambang dan Morimura, 1985), dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut



Sumber: Noerbambang dan Morimura, 1985

GAMBAR 2.2

SISTEM PELAYANAN AIR BERSIH

Keterangan:

- (a) jaringan transmisi
- (b) Jaringan di stribusi
- (c) Pelanggan
- 1 Intake
- 2 IPA (instalasi pengolahan air)
- 3 Reservoir

Dari gambar di atas dapat di jelaskan Sistem Pelayanan Air Bersih, sebagai berikut:

1. Sistem Pengolahan Air Baku (*intake*)

Sistem ini juga disebut dengan Instalasi Pengolahan Air (IPA) merupakan instalasi pengolahan, dari air baku menjadi air yang siap untuk didistribusikan kepada pihak konsumen air bersih.

2. Sistem Jaringan Transmisi

Merupakan suatu sistem transportasi air baku ke sistem pengolahan air baku ketempat penampungan (*reservoir*). Cara pengangkutannya bisa dengan cara gravitasi atau dengan pemompaan.

3. Sistem Jaringan Distribusi

Adalah sistem penyaluran air bersih dari reservoir sampai kedaerah-daerah pelayanan. Sistem distribusi jaringan merupakan sistem yang paling penting dalam penyediaan air bersih, hal ini mengingat:

- a. Baik buruknya sistem pelayanan air bersih dinilai dari baik tidaknya sistem distribusi, artinya masyarakat hanya mengetahui air sampai ke pelanggan dan masyarakat tidak melihat bagaimana prosesnya
- b. Lebih 60% investasi untuk sistem penyediaan air bersih di pergunakan untuk sistem distribusi ini, bahkan jika daerah pelayanannya cukup luas sampai mencapai 90%.

Dalam sistem distribusi air bersih, ada beberapa hal yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Air harus sampai pada masyarakat pengguna dengan kualitas baik tanpa ada kontaminasi.
2. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setiap saat dan dalam jumlah yang cukup.
3. Sistem dirancang sedemikian rupa sehingga kebocoran pada sistem distribusi dapat dihindari, hal ini penting karena menyangkut efektifitas (*service user*) pelayanan dan efisiensi pengelolaan (*service provider*).
4. Tekanan air dapat menjangkau daerah pelayanan, walaupun dengan kondisi air bersih yang cukup kritis.

Menurut hirarkinya, pipa-pipa yang digunakan dalam distribusi adalah:

1. Pipa Induk

Pipa ini merupakan pipa distribusi pada jaringan terluar yang menghubungkan blok-blok pelayanan. Pipa ini tidak bisa digunakan untuk melayani kapling rumah. Pipa yang digunakan disini adalah pipa yang mempunyai ketahanan tinggi.

2. Pipa Cabang

Pipa cabang di pakai untuk menyadap air langsung dari pipa induk dialirkan kesuatu blok pelayanan. Jenis pipa ini sebaiknya sama dengan pipa induk .

3. Pipa Service

Pipa ini melayani sambungan langsung dengan rumah.

2.4 Tinjauan Pengelolaan Prasarana Air Bersih

Konsep pengelolaan air bersih dan sumber air bersih pada dasarnya mencakup upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air berupa menyalurkan air yang tersedia dalam konteks ruang, waktu, jumlah dan mutu pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan masyarakat (Kodoatie, 2002).

Kegiatan pengelolaan air bersih semakin diperlukan, karena semakin tinggi tuntutan akan pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkualitas baik. Hal ini memunculkan potensi konflik kepentingan antara masyarakat sebagai pengguna, sehingga perlu diantisipasi dengan kegiatan pengelolaan, agar penyediaan air bersih lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan penyediaan air bersih, diperlukan suatu organisasi yang bertugas menyelenggarakan tugas manajemen/pengelolaan. Organisasi tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem apabila didalamnya terjadi kegiatan masukan-proses-keluaran. Untuk menjalankan fungsinya sebagai suatu sistem, diperlukan komponen-komponen untuk saling berinteraksi secara selaras, komponen tersebut disebut sebagai subsistem.

Subsistem yang diperlukan dalam sistem penyediaan air bersih dapat dijabarkan sebagai berikut (Simatupang, 1995):

- Subsistem organisasi dan manajemen, meliputi aspek bentuk organisasi, struktur organisasi, personalia (kualitas dan kuantitas), tata laksana kerja dan pendidikan serta latihan.
- Subsistem teknik operasional, meliputi aspek tingkat penyediaan, lingkup wilayah yang terlayani, pos-pos penampungan air, pengaliran air beserta prasarana pendukungnya.
- Subsistem pembiayaan dan retribusi/iuran, meliputi aspek sumber pendanaan, struktur pembiayaan, pola dan prosedur penarikan iuran dan struktur penentuan tarif iuran.
- Subsistem pengaturan, meliputi aspek pembentukan aturan-aturan sebagai mekanisme kontrol terhadap sistem.

2.5 Persepsi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih

Persepsi merupakan istilah Bahasa Indonesia yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris *perceive* di mana dalam kamus lengkap praktis Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia artinya melihat atau mengamati. Pengertian persepsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut kamus tata ruang, persepsi merupakan tanggapan atau pengertian yang terbentuk langsung dari suatu peristiwa atau pembicaraan yang terbentuk langsung dari suatu peristiwa atau pembicaraan yang terbentuk dari suatu proses yang diperoleh dari panca indera.

Berikut adalah faktor yang mempengaruhi persepsi individu dalam menciptakan suatu persepsi masyarakat:

- Objek yang menjadi pengamatan akan berbeda pada setiap orang berdasarkan penerimaan rangsangan indera terhadap objek tersebut.
- Kedalam pengamatan terhadap objek yang diamati tersebut berdasarkan identifikasi melalui wujud objeknya.

- Faktor pribadi yang ditentukan oleh pengalaman, tingkat kecerdasan, kemampuan mengingat dan sebagainya.

Persepsi masyarakat yang terbentuk tersebut tidak lepas dari unsur yang terjadi akibat interaksi antar masyarakat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi persepsi individu dalam membentuk persepsi masyarakat dalam studi ini ditentukan oleh objek yang diamati dan kedalaman terhadap pengamatan yang dilakukan terhadap tingkat pelayanan air bersih. Bahwa persepsi antar individu dengan individu lainnya dalam masyarakat juga akan mempunyai perbedaan sesuai dengan status sosial ekonominya, salah satu syarat fungsional dari suatu sistem sosial adalah proses adaptasi yaitu penyesuaian sistem terhadap tuntutan (kenyataan) kondisi lingkungan, dengan memfungsikan sejumlah faktor fisik dan non fisik.

Persepsi dapat diartikan sebagai pengamatan yang secara langsung dikaitkan dengan suatu makna. Proses yang melandasi persepsi berawal dari adanya informasi dan lingkungan. Tidak semua rangsangan (informasi) diterima dan disadari oleh individu, melainkan diseleksi berdasarkan orientasi nilai yang dimilikinya dan juga pengalaman pribadi (Irwanto, 1996).

2.6 Prinsip Manajemen dalam Pengelolaan Air Bersih

Dalam kegiatan layanan air bersih, perlu memperhatikan prinsip-prinsip manajemen, karena dalam menjalankan organisasi dibutuhkan manajemen/pengelolaan. Manajemen/pengelolaan sumber daya air di definisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/ manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan (Grigg, 1996). Jika mengacu pada teori manajemen, maka dalam proses pengelolaan terdapat berbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan, meliputi:

1. Penetapan tujuan (*goal setting*)
2. Perencanaan (*planning*)
3. *Staffing*
4. *Directing*
5. *Supervising*

6. Pengendalian (*controlling*)

Keenam tahapan tersebut di atas dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan layanan air berbasis masyarakat. Namun pada prakteknya, tahapan itu dapat dipandang sebagai proses yang dinamis, mengingat karakteristik masyarakat sebagai subjek dan objek dipengaruhi oleh lingkungan.

Dalam pengelolaan air bersih ada tiga aspek yang pengendalian (Soenarto dalam Kodoatie, 2002). Dalam memanfaatkan air bersih, perlu disertai dengan pelestarian/konservasi, agar pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Konservasi dalam hal ini tidak hanya diartikan sebagai kegiatan menyimpan air saja atau disebut sebagai konservasi dari segi suplai, tetapi lebih mengarah kepada pengurangan atau pengefisienan penggunaan air yang sering disebut sebagai konservasi dari segi kebutuhan. Konservasi air yang baik merupakan gabungan dari kedua konsep tersebut, yaitu menyimpan air dikala berlebihan, menggunakannya sesedikit mungkin untuk keperluan tertentu yang produktif. Sehingga konservasi air domestik berarti menggunakan air sesedikit mungkin untuk mandi, mencuci, menggelontor toilet dan penggunaan-penggunaan rumah tangga lainnya (Suripin, 2002).

2.7 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Program

Seperti yang disampaikan (Manaf, 2009) dalam Perencanaan Tata Ruang Partisipatif dalam Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas: Tantangan, Kendala dan Potensi yang disampaikan di dalam seminar Nasional Dies Natalis Planologi ITB.

“Perencanaan dalam Era Demokrasi dan Otonomi Daerah bahwa: perencanaan pembangunan partisipatif (demokratis) ini lebih berorientasi pada pengembangan kemampuan masyarakat (*people empowerment*) untuk pengalihan peran dan kedudukan masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan (*sicial transformation process*). Dengan demikian, salah satu ciri atau prinsip pokok dari praktik perencanaan tata ruang partisipatif (demokratis) adalah pemberian wewenang yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pengguna akhir (*end user*) untuk terlibat secara aktif di dalam pengambilan keputusan terutama di dalam pemanfaatan dan mengelola sumber daya kunci (*key resources*) pembangunan (*assets*) yang tersedia dilingkungan huniannya secara bertanggung jawab (*accountable*) dan transparan.” Lebih lanjut Asnawi manaf menyampaikan bahwa

“untuk mencapai pembangunan permukiman yang berkelanjutan di tempuh dengan tiga jalur, yaitu: (1) Orientasi pada perubahan perilaku (*attitude*), (2) Orientasi pada pengelolaan oleh masyarakat sendiri (*self community management*), serta (3) Orientasi pada inovasi dan kreatifitas masyarakat (*entrepreneurship*)”.

Dalam implementasinya program pembangunan perdesaan lebih menekankan kepada pendekatan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) dengan beberapa ciri, antara lain: demokratis, partisipatif, transparatif dan akuntabilitas.

Dalam kaitan hal tersebut, Budi hardjo (2001) mengingatkan bahwa kecuali program-program tersebut tidak kalah pentingnya adalah jaminan rasa aman dan konteks mikro pengakuan terhadap keberadaan maupun kegiatan ekonomi orang miskin yang dituding sebagai tak terencana (*unplanned*) dan semrawut (*chaostic*) selanjutnya dikatakan sebetulnya yang bisa menjadi ujung tombak penanggulangan kemiskinan perkotaan adalah akses terhadap lahan untuk perumahan dan juga terciptanya rasa aman bertempat tinggal (*security of tenure*), karena kebanyakan lingkungan permukiman mereka yang kumuh, *informal settlemens* dan *extra legal*. Lebih jauh ditekankan perlunya peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka, dalam proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, implementasi pemantauan dan evaluasi dalam meningkatkan perilaku, menyerap informasi dan komunikasi.

Sementara itu Tjokrowinoto (1994), mengemukakan sedikitnya ada enam ciri-ciri program yang baik, antara lain: 1) Tujuan harus jelas, 2) Peralatan yang baik untuk mencapai tujuan, 3) Konsistensi kebijakan, 4) Pengukuran biaya dan manfaat, 5) Hubungan dengan pembangunan yang lainnya dan 6) manajemen yang baik. Selain ciri-ciri tersebut terdapat pendekatan yang disebut pendekatan kesesuaian (*the fit model*) yang dikemukakan oleh Korten dan Alfonso (Soetrisno, 2001) model ini berasumsi bahwa keberhasilan suatu program ditentukan oleh adanya kesesuaian antara tiga komponen, yaitu:

1. Kesesuaian antar kelompok sasaran dengan organisasi, artinya artikulasi kepentingan kelompok sasaran haruslah mendapat saluran di dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

2. Kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, ini berarti bahwa output suatu program harus dengan *felt need* kelompok sasaran.
3. Kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, ini berarti bahwa output suatu program harus sesuai dengan *felt need* kelompok sasaran.

Pengertian terhadap tujuh dimensi tersebut sangat berguna untuk mengamati arah keberhasilan program yang di rencanakan. Khususnya mengenai dimensi partisipasi lebih jauh dapat di pahami bahwa menurut Davis (Sastrosaputro, 1986) dalam bukunya *human relations at work*, mengemukakan partisipasi sebagai keterlibatan mantal/pikiran dan emosi perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan

Guna memahami tahap-tahap partisipasi disini di kemukakan oleh Ndraha (1990) mengetengahkan enam tahap partisipasi, yaitu (1) Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*), sebagai salah satu titik awal perubahan sosial, (2) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi penilaian terhadap informasi baik menerima maupun menolak, (3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan, (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, (5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, (6) partisipasi dalam menilai pembangunan sejauh mana kesesuaian yang di rencanakan.

2.8 Rangkuman Kajian Teori

Berdasarkan kajian teori di atas, maka hal-hal yang perlu di amati dalam penelitian ini adalah:

4. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan perasaan dari seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari perencanaan, evaluasi pelaksanaan sampai pada tahap operasi dan pemeliharaan. Masyarakat mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka sehingga dengan demikian muncul *sense of belongingness* dari masyarakat terhadap hasil-hasil dari pembangunan.

5. Terdapat empat pelaku yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat, yakni: pemerintah, pelaksana, fasilitator dan masyarakat itu sendiri.
6. Pemeliharaan prasarana adalah usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk menjaga agar aset prasarana yang sudah di bangun selalu dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dioperasikan secara optimal dan terjaga kelestariannya.
7. Sistem penyediaan air bersih adalah: gabungan dari beberapa komponen mulai dari Bak penangkap, bak penampung, bak pengolah, pipa transmisi, pipa distribusi, hidran umum, sambungan rumah beserta kelengkapannya yang saling mempengaruhi fungsi masing-masing komponen untuk pemenuhan kebutuhan air bersih manusia.

Berdasarkan rangkuman teori diatas didapat kisi-kisi penelitian yang menjadi panduan penulis dalam menggali data untuk kelengkapan analisis baik melalui observasi, wawancara maupun data dokumentasi dan arsip. Adapun kisi-kisi penelitian ini adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
KISI-KISI PENELITIAN

SASARAN	MASYARAKAT	PERANAN	LINGKUNGAN
1. Mengkaji mekanisme pembangunan dan	- Bagaimana mekanisme pelibatan	- Apa saja kontribusi yang di bisa di	- Adakah kesepakatan yang di bangun oleh

pengelolaan prasarana penyediaan air bersih pasca pembangunan yang di laksanakan oleh kontraktor	masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih - Sejauh mana tanggungjawab masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana	berikan masyarakat sebagai bentuk partisipasinya di dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana?	masyarakat desa yang akan di gunakan sebagai pedoman di dalam tahap pengelolaan prasarana?
2. Mengkaji hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan masyarakat di dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih	- bagaimana peran masyarakat di dalam setiap tahapan proses pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih?	- Hal-hal apa saja yang mempengaruhi masyarakat di dalam berpartisipasi di dalam setiap tahapan pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih?	- Apakah budaya, agama dan adat istiadat dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana penyediaan air bersih?

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Geografis

3.1.1 Letak Letak

Kota Andoolo merupakan Ibukota Kabupaten Konawe Selatan Ibukotanya, secara Geografis terletak berada dibagian Selatan Katulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 3^o.58.56' dan 4^o.31.52' Lintang Selatan, membujur dari Barat ke timur antara 121.58' dan 123.16' Bujur Timur.

3.1.2 Batas Wilayah

Batas wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kabupten Konawe dan Kota Kendari.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka.

3.1.3 Luas Wilayah

Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe Selatan, 451.421 km² atau 11,83 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara sedangkan untuk wilayah perairan (laut) ±9.368 Km². Sedangkan untuk Kecamatan Kolono mempunyai luas wilayah 335 km² atau sekitar 7,42 persen dari luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang terletak di Kawasan Timur.

Selain jazirah Tenggara pulau Sulawesi, terdapat pula pulau kecil yaitu pulau Cempedak, menurut Kecamatan wilayah terluas adalah kecamatan Angata 74.191 Km² (16,44 persen), Tinanggea 67.768 (15,01) kemudian berturut Kecamatan Moramo 53.142 Km² (11,77 persen), Kecamatan Andoolo 40,843 Km² (9,05 persen), Kecamatan

Palangga 38,750 Km² (8,58 persen), dan lima kecamatan lainnya memiliki luas wilayah kurang dari 8 persen.

3.1.4 Curah Hujan

Di kabupaten Konawe Selatan tahun 2007 mencapai 2.366 mm dalam 203 kali Hari Hujan (HH) atau lebih tinggi dari tahun 2006 1.747 mm dalam 195 Hari Hujan (HH).

Curah hujan di Kabupaten Konawe Selatan dibagi atas dua bagian, yaitu:

1. Pola curah hujan tahunan antara 0 – 1500 mm terdapat di bagian Selatan yang meliputi Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lainea dan Palangga.
2. Pola curah hujan tahunan antara 1500 – 1900 mm terdapat dibagian tengah dan bagian utara meliputi Kecamatan: Moramo, Ranomeeto, Landono dan Angata.

3.1.5 Suhu Udara

Suhu udara dipengaruhi oleh beberapa factor. Perbedaan ketinggian dari permukaan laut mengakibatkan perbedaan suhu untuk masing-masing tempat dalam suatu wilayah.

Secara keseluruhan, Kabupaten Konawe Selatan merupakan daerah yang bersuhu tropis. Menurut data yang diperoleh dari Pangkalan Udara Wolter Monginsidi, selama tahun 2007 suhu udara maksimum 32^o C dan minimum 21^o C. Tekanan udara rata-rata 1.009,1 milibar dengan kelembaban udara rata-rata 78 persen. Kecepatan angin berjalan normal yaitu 4m/sec.

3.2 Gambaran Umum Kecamatan Kolono

3.2.1 Kondisi Fisik Wilayah

Kecamatan Kolono secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan memiliki luas wilayah 335 Km² atau sekitar 7,42 persen dari wilayah administrasi Kabupaten Konawe Selatan dan terdiri dari 26 (dua puluh enam) desa dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lainea
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Moramo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Laonti
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tinanggea

Topografi Kecamatan Kolono adalah relatif tidak datar dan didominasi oleh perbukitan dengan suhu berkisar 26 – 34 °C. Sebagian wilayahnya berada di pesisir pantai.

Penggunaan tanah di Kecamatan Kolono sebagian besar dipergunakan untuk pertanian yaitu berupa : persawahan 10 (sepuluh) persen dan perkebunan 35 (tiga puluh lima) persen dari luas wilayah di Kecamatan Kolono.

Dengan kondisi alam yang demikian, Kecamatan Kolono sekitar 90 (sembilan puluh) persen sarana transportasi menggunakan jalan darat dengan kualitas jalannya masih perkerasan, untuk menghubungkan antar desa diwilayah Kecamatan Kolono, sementara yang 10 (sepuluh) persen menggunakan transportasi laut.

Sementara untuk penyediaan air bersih sekitar 40 (empat puluh) persen masyarakat berusaha secara individu dan 60 (enam puluh) persen masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan air bersih didapat dari prasarana yang dibangun oleh pemerintah dengan sistem gravitasi namun pengelolaannya diserahkan penuh kepada masyarakat setempat.

3.2.2 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Jumlah penduduk Kecamatan Kolono sebesar 10.333 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 2.276 dan terdiri dari 5.675 jiwa perempuan dan 4.658 jiwa laki-laki dengan kepadatan penduduk mencapai 25 Jiwa/Km².

Mata pencahariaan penduduk Kecamatan Kolono sebagian besar adalah petani tanaman jangka panjang (coklat, kopra) dan petani jangka pendek, nelayan. Petani menyebar hampir diseluruh wilayah Kecamatan Kolono sementara nelayan hanya berada dipesisir pantai.

Penduduk Kecamatan Kolono terdiri dari bermacam-macam suku, antara lain: Suku Tolaki selaku suku asli, suku Jawa dan suku Bugis Makasar. Suku Tolaki menempati populasi yang besar yaitu sekitar 70 (tujuh puluh) persen dari jumlah penduduk Kecamatan Kolono, sedangkan suku Jawa sekitar 17 (tujuh belas) persen dan sisanya yaitu sekitar 13 (tiga belas) persen adalah suku Bugis Makasar.

Berdasarkan tingkat pendidikan di kecamatan Kolono, sebagian besar masyarakatnya buta huruf, hanya sekitar 25 (dua puluh) persen masyarakatnya yang lulus SD, tamat SMP sekitar 10 (sepuluh) persen, tamat SMA sekitar 5 (lima) persen dan Akademi/Perguruan Tinggi sekitar 1 (satu) persen.

Sebelum adanya otonomi daerah, sebagian besar masyarakat Kolono hanya sanggup menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SD, kadangkala ada tidak tamat SD, hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Tapi sekarang dengan tidak adanya biaya sekolah (SPP) dari tingkat SD sampai SLTA di Kabupaten Konawe Selatan yang berjalan hampir 3 (tiga) tahun, orang tidak lagi memikirkan biaya sekolah anak-anak mereka, sekarang orang tua sibuk terus mendorong anak mereka untuk terus sekolah.

3.2.3 Potensi dan Masalah

Kecamatan Kolono merupakan wilayah yang cukup strategis karena merupakan pintu gerbang untuk memasuki kawasan hutan lindung Labuan Beropa, beberapa sumber tambang terutama nikel yang belum dieksplorasi, potensi untuk pengembangan mutiara juga belum maksimal walaupun sudah ada investor Jepang yang sudah membudidayakannya selama 7 (tujuh) tahun.

Permasalahan yang ada di Kecamatan Kolono adalah permasalahan prasarana jalan yang kurang memadai, hanya sebagian kecil yang sudah diaspal selebihnya adalah perkerasan. Demikian juga dengan prasarana penyediaan air bersih yang belum optimal pemanfaatannya oleh masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya peran serta masyarakat untuk ikut memelihara prasarana terbangun.

Mengenai sumber daya manusia juga menjadi permasalahan utama, karena secara umum kondisi masyarakat berada di bawah garis kemiskinan dan terbelakang

dalam hal pendidikan formal. Kebanyakan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan nelayan memiliki pendidikan dan penghasilan yang rendah merupakan kendala khusus pada pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

3.3 Gambaran Umum Pengembangan Prasarana Penyediaan Air Bersih Perdesaan di Kecamatan Kolono

Kecamatan Kolono yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) desa, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 telah mendapatkan bantuan prasarana air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah dari Dana Alokasi khusus (DAK) di beberapa desa, diantaranya adalah Desa: Wawoosu, Waworano, Mataiwoi dan Batu Putih.

3.3.1 Obyek Satuan Kajian

3.3.1.1 Desa Wawoosu

Desa Wawoosu merupakan desa eks transmigrasi dari Jawa, sehingga mayoritas penduduk di desa ini adalah suku Jawa, sementara suku Tolaki (suku asli Sulawesi Tenggara) dan Bugis Makasar sangat sedikit. Desa Wawoosu merupakan salah satu desa di Kecamatan Kolono yang menerima bantuan Pemerintah Pusat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun anggaran 2008 dengan sistem gravitasi menggunakan Sambungan Rumah (SR).

Posisi Desa Wawoosu terletak di jalan poros Kecamatan, memiliki luas 65 Km² dengan jumlah penduduk 1590 jiwa, 325 KK, 850 jiwa laki – laki dan 740 jiwa perempuan. Sebagian besar penduduk Desa Wawoosu adalah petani baik yang berkebun ataupun yang bersawah. Sementara tingkat pendidikannya sebagian besar tidak lulus SD.

Kondisi sarana dan prasarana perdesaan di Desa Wawoosu sudah banyak mengalami kerusakan, salah satu sarana penunjang yang perlu untuk dibiayai adalah prasarana air bersih, prasarana air bersih yang ada sekarang merupakan bantuan dari

Dinas Transmigrasi yang dibangun pada tahun 1984 sehingga sudah banyak yang mengalami kerusakan mulai dari bak penangkap, pipa distribusi dan hidran umum yang ada di desa sudah tidak berfungsi sama sekali. Selama ini untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat tetap mengandalkan prasarana tersebut namun dengan cara melubang pipa-pipa distribusi yang melintas di depan rumah masing-masing, dengan kondisi seperti ini menyebabkan penggunaan air oleh masyarakat menjadi tidak terkontrol sehingga merugikan yang lain, karena debit air sudah sangat berkurang sehingga tidak bisa lagi untuk mengalir ke tempat yang lebih jauh.

3.3.1.2 Desa Mataiwoi

Sama halnya dengan Desa Wawoosu, Desa Mataiwoi adalah salah satu desa di Kecamatan Kolono yang menerima bantuan Pemerintah Pusat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terletak berdekatan dengan Desa Waworano dan berada di jalan poros Kecamatan, memiliki luas 75 Km² dengan jumlah penduduk 478 Jiwa, 158 KK, 212 Jiwa laki – laki dan 266 Jiwa perempuan. Sebagian besar penduduk Desa Mataiwoi adalah suku Tolaki yaitu sekitar 70 persen sementara sisanya adalah suku pendatang terutama suku Bugis Makasar, mata pencaharian penduduk mayoritas adalah petani baik yang berkebun coklat dan kelapa ataupun yang bersawah. Sementara tingkat pendidikannya sebagian besar tidak lulus SD.

Sebelum dibangunnya Prasarana Penyediaan Air Bersih oleh pemerintah pusat melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus sebenarnya di Desa Mataiwoi pernah turun bantuan proyek serupa yaitu dari proyek Sintesa pada tahun 1995, sistem yang digunakan untuk mengalirkan air dan melayani masyarakat adalah dengan cara gravitasi dan menggunakan hidran umum, karena kurangnya masyarakat untuk memelihara prasarana tersebut sehingga banyak mengalami kerusakan baik pada bak penangkap air, bak penampung, sambungan-sambungan pipa distribusi banyak mengalami kebocoran terutama pada sambungannya dan hidran umum, sampai akhirnya prasarana tersebut sama sekali tidak berfungsi.

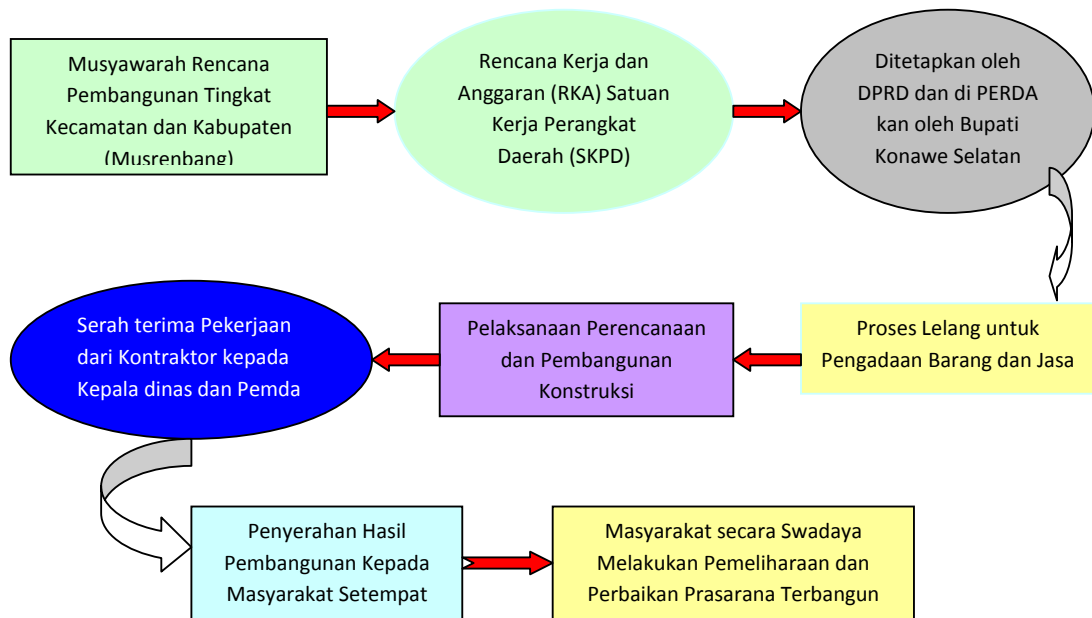
Semenjak prasarana air bersih tersebut tidak berfungsi, untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya masyarakat Desa Mataiwoi kembali memanfaatkan air sumur

dan sebagian lagi mengkonsumsi air sungai. Bahkan masyarakat di dusun I di musim kemarau panjang untuk memenuhi kebutuhan airnya rela berjalan kaki ke dusun sebelahnya sejauh 500 meter. Hal ini dikarenakan sumur-sumur di dusun mereka kering.

3.3.2 Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Konawe Selatan

3.3.2.1 Proses Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Bersih

Proses pelaksanaan pembangunan prasarana penyediaan air bersih di Kabupaten Konawe Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis 2010

GAMBAR 3.1

PROSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Dari gambar diatas dapat dijelaskan mengenai Proses pembangunan prasarana penyediaan air bersih di Kabupaten Konawe Selatan pada umum sama, yaitu dimulai dari penjangkaran usulan didalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari seluruh desa pada tingkat Kecamatan dilanjutkan ke tingkat Kabupaten, kemudian di rangking sesuai dengan skala prioritas dan dimasukkan kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), setelah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Konawe Selatan kemudian di PERDA kan oleh Bupati Konawe Selatan, selanjutnya disusunlah Daftar Isian Proyek dan Anggaran (DIPA) masing-masing SKPD. Setelah terbentuk DIPA maka masing-masing SKPD dalam hal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pelelangan bagi penyedia jasa konsultansi dalam hal ini konsultan perencana untuk mendesain dan menyusun Detail Engeeniering Design (DED), tahap selanjutnya adalah pelelangan terbuka untuk jasa konstruksi guna mendapatkan pelaksana pembangunan konstruksi. Pada saat pelaksanaan pembangunan fisik pengawasan dilakukan oleh Konsultan Pengawas dan Direksi dari Dinas Pekerjaan Umum, ketika pekerjaan fisik sudah selaesai atau mencapai 100 persen dilakukanlah proses serah terima pekerjaan pertama atau Profesional Hand Over (PHO) dari pelaksana pekerjaan kepada pengguna barang/jasa dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum, tahap selanjutnya adalah penyerahan asset dari Dinas Pekerjaan Umum Kepada Sekretariat Daerah bagian Asset, dari pemerintah Daerah kemudian diserah terimakan kepada masyarakat desa setempat untuk dikelola secara swadaya.

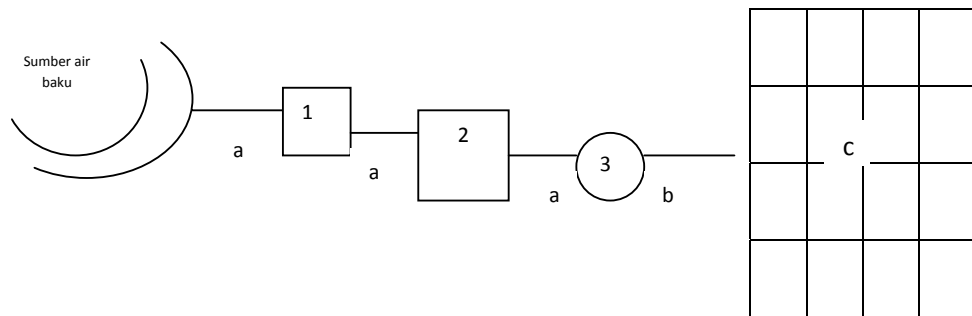
3.3.2.2 Profil Sistem Penyediaan Air Bersih

A. Desa Wawoosu

Sistem penyediaan air bersih di Desa Wawoosu pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) program penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk Tahun Anggaran 2008.

Besarnya biaya yang digunakan sekitar Rp. 275.000.000,00, jenis kegiatannya adalah rehabilitasi dan Peningkatan, untuk kegiatan rehabilitasi diantaranya: bak penangkap (*intake*), mengganti pipa transmisi yang sudah rusak, merehabilitasi bak penampung air (*reservoir*), dan mengganti jaringan pipa. Sedangkan kegiatan peningkatan adalah meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan yang awalnya menggunakan Hidran Umum (HU) sebanyak 5 (lima) buah diganti menggunakan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 125 sambungan.

Sistem penyediaan air bersih di Desa Wawoosu menggunakan sistem gravitasi, artinya air bersih dari mata air yang berhasil ditampung di bak penangkap (*intake*) dialirkan ke bak pengolahan air sebelum dialirkan kepada masyarakat dengan memanfaatkan beda ketinggian, untuk lebih jelasnya maka sistem penyediaan air bersih di desa Wawoosu bisa digambarkan seperti diagram dibawah ini:



Sumber: Noerbambang dan Morimura, 1985

c

GAMBAR 3.1

SISTEM PELAYANAN AIR BERSIH

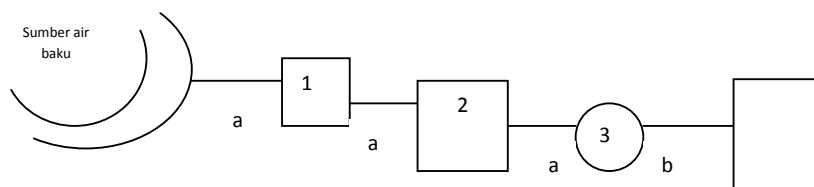
Keterangan:

- (d) jaringan transmisi
- (e) Jaringan distribusi
- (f) Pelanggan (Sambungan ke rumah)
- 4 Intake
- 5 IPA (instalasi pengolahan air)
- 6 Reservoir

B. Desa Mataiwoi

Sistem penyediaan air bersih di Desa Mataiwoi pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) program penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk Tahun Anggaran 2008.

Besarnya biaya yang digunakan sekitar Rp. 270.000.000,00, jenis kegiatannya adalah pembangunan baru diantaranya: pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dan distribusi, bangunan pelengkap diantaranya : bak penangkap (*intake*), bak pengolah air (pengolahan sederhana) dan hidran umum. Sistem penyediaan air bersih di Desa Mataiwoi menggunakan sistem gravitasi, artinya air bersih dari mata air yang berhasil ditampung di bak penangkap (*intake*) dialirkan ke bak pengolahan air sebagai upaya untuk membersihkan air dari kotoran-kotoran yang berasal dari potongan-potongan ranting dan dedaunan serta mengendapkan pasir atau lumpur sehingga air menjadi relatif lebih jernih sebelum dialirkan kepada masyarakat dengan memanfaatkan beda ketinggian, untuk lebih jelasnya maka sistem penyediaan air bersih di desa Mataiwoi bisa digambarkan seperti diagram dibawah ini:



Sumber: Noerbambang dan Morimura, 1985

c

GAMBAR 3.2
SISTEM PELAYANAN AIR BERSIH

Keterangan:

- (a) jaringan transmisi
- (b) Jaringan distribusi
- 1. Intake
- 2. IPA (instalasi pengolahan air)
- 3. Reservoir
- 4. Hidran Umum

BAB IV

PARTISIPASI

MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN

PRASARANA AIR BERSIH

Pembangunan sektor air bersih di pedesaan dimaksudkan untuk membantu masyarakat pedesaan agar mempunyai akses terhadap air bersih yang aman dan layak, khususnya masyarakat miskin. Prasarana air bersih yang sudah dibangun oleh pemerintah, selanjutnya akan diserahkan kepada masyarakat desa setempat yang telah membentuk Kelompok Pengguna Pemelihara (KPP) untuk mengelolanya. Minimnya partisipasi atau kepedulian masyarakat dan keterbatasan kemampuan KPP baik secara teknis maupun manajerial, diduga akan mempengaruhi keandalan sistem penyediaan air bersih dipedesaan. Adapun keandalan pelayanan diindikasikan dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas air yang diterima oleh masyarakat pelanggan.

Melalui beberapa program pemerintah berusaha meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dipedesaan, salah satunya adalah pembangunan prasarana penyediaan air bersih yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada umumnya proyek-proyek/program yang digagas oleh Pemerintah Daerah lebih banyak mengesampingkan peran serta masyarakat lokal, pelibatan masyarakat lokal boleh dikata sangat minim, minimnya pelibatan masyarakat lokal disebabkan keterlibatan Kepala Desa hanya pada tahap pengusulan program yaitu pada saat Musrenbang. Sementara pada tahap perencanaan diserahkan sepenuhnya kepada konsultan perencana, terkadang masalah berawal dari sini dikarenakan pihak perencana datang bertanya kepada masyarakat hanya untuk ditunjukkan lokasi mata air dan jalur terdekat dan paling memungkinkan untuk dilalui pipa, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam, misalnya: mengenai kendala masyarakat didalam pemeliharaan sarana air bersih yang sudah dibangun tidak optimal dimanfaatkan oleh masyarakat, keinginan-

keinginan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan prasarana air bersih, kondisi debit air dari mata air sepanjang tahun.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak ketiga yaitu kontraktor, pada tahap ini pelibatan masyarakat setempat hanya sebatas pekerja kasar dan jumlahnya relatif sedikit, itupun atas inisiatif dari masyarakat meminta kepada kontraktor untuk dijadikan tenaga kerja.

Tahap terakhir adalah tahap pemanfaatan yakni tahap untuk masyarakat memanfaatkan hasil-hasil dari program pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan. Tahap pemanfaatan hasil pembangunan ini akan menjadi titik tolak perwujudan partisipasi masyarakat secara utuh yaitu untuk mengelola prasarana sesuai keinginan masyarakat agar tetap berkelanjutan. Oleh sebab itu, pada tahap pemanfaatan prasarana yang telah dibangun ini diharapkan diikuti oleh tumbuhnya tanggung jawab dari diri masing-masing anggota masyarakat untuk memelihara dan menjaga agar proyek-proyek yang telah berhasil dibangun sehingga manfaatnya tetap dapat dinikmati secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu persyaratan sebelum prasarana yang berhasil dibangun bisa diserahkan dari Pemda kepada masyarakat adalah terbentuknya KPP yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat melalui musyawarah desa, KPP mempunyai tugas dan tanggungjawab operasional, pemeliharaan dan perbaikan prasarana air bersih.

Tidak adanya alokasi biaya dari instansi terkait untuk operasional dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun menyebabkan masyarakat harus berinisiatif menggalang dana secara swadaya tanpa harus bergantung kepada pemerintah. Inisiatif untuk menggali dana secara swadaya merupakan sebuah pembelajaran bagi masyarakat untuk mulai mengikis paradigma lama bahwasanya seluruh biaya pembangunan, operasional sampai kepada pemeliharaan merupakan tanggungjawab pemerintah, diganti dengan paradigma baru bahwa pemerintah dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki tidak akan mampu untuk membiayai biaya operasional dan pemeliharaan terhadap semua prasarana/sarana publik yang telah dibangun, untuk itu kepedulian masyarakat yang diaplikasikan dalam bentuk-bentuk partisipasinya didalam pengelolaan khususnya bagi pengguna dan pemanfaat langsung

prasarana/sarana yang telah dibangun sangat penting agar prasarana tetap mampu berfungsi sesuai peruntukannya dan senantiasa terpelihara untuk keberlanjutannya.

4.1. Kajian Mekanisme Partisipasi Masyarakat didalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme partisipasi masyarakat didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih pasca pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Program pembangunan prasarana penyediaan air bersih di dua desa lokasi penelitian adalah murni proyek sehingga mekanisme pelaksanaan program pembangunan prasarana air bersih ini terkesan mekanistik dalam artian mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik harus mengikuti petunjuk operasional yang telah ditetapkan, dengan demikian pelaksanaan pembangunan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi dilaksanakan sepenuhnya oleh kontraktor pelaksana pemenang didalam proses tender, namun demikian tidak menutup kemungkinan masyarakat desa setempat dapat turut berpartisipasi didalam pembangunan dengan menjadi tenaga kerja.

Pasca pembangunan konstruksi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara prasarana air bersih oleh pemerintah daerah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa setempat, selanjutnya masyarakat akan mendelagasikan beban tanggungjawab untuk mengelola diserahkan sepenuhnya kepada KPP yang telah dibentuk sebelumnya, dengan adanya KPP diharapkan pengelolaan terhadap prasarana terbangun menjadi maksimal sehingga tujuan dari dibangunnya prasarana air bersih yaitu untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat desa terealisasi sesuai rencana. Namun demikian peran serta/keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat desa setempat didalam pengelolaan tetap diharapkan agar keandalan sistem penyediaan air bersih tetap berlanjut, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat.

4.1.1. Pemikiran Pada Setiap Tahapan Pembangunan sebagai Pendorong Keberhasilan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan didapat bahwasanya pelaksanaan pembangunan fisik sampai pada pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di lokasi penelitian terjadi dalam beberapa tahap, yaitu: tahap sebelum pengusulan program pembangunan, tahap pengusulan program pembangunan, tahap survei dan perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan tahap pengelolaan hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat berupa sumbangsih pemikiran didalam program pembangunan penyediaan air bersih terjadi pada beberapa tahapan, yaitu: tahap sebelum pengusulan program pembangunan, tahap pengusulan program pembangunan, tahap survei dan perencanaan dan yang terakhir adalah tahap pengelolaan hasil pembangunan

Tahap sebelum pengusulan program pembangunan sarana/prasarana yang terjadi di dua desa lokasi penelitian, didalam tahapan ini kepala desa dibantu oleh aparatur desa bersama-sama tokoh masyarakat dan masyarakat desa melakukan survei lapangan untuk melakukan inventarisir prasarana/sarana yang ada di desa, dari proses inventarisir ini diharapkan didapat data akurat mengenai kondisi sarana/prasarana yang masih baik dan sarana/prasarana yang sudah saatnya untuk direhabilitasi atau ditingkatkan kualitas bangunan ataupun cakupan pelayanannya.

Hasil pengamatan di lapangan kemudian dijadikan bahan untuk dibawa dan dibahas di dalam musyawarah kecil yang dihadiri oleh sebagian masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa dan kepala desa, tujuannya adalah untuk menampung usulan-usulan, saran maupun pendapat dari seluruh peserta musyawarah untuk menentukan sarana/prasarana yang akan dijadikan prioritas utama untuk dibangun baru, yang akan direhabilitasi atau ditingkatkan cakupan pelayanannya.

Untuk lebih jelasnya perhatikan kutipan wawancara dibawah ini,

“Sebelum kami putuskan prasarana/sarana apa saja yang akan menjadi prioritas usulan dimusrenbang tingkat kecamatan, kami perangkat desa dibantu tokoh-tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat desa mencoba untuk menginventarisir didalam musyawarah desa”, (PI.1/DW.1)

Tahapan ini berakhir ketika musyawarah desa telah memutuskan sarana/prasarana yang akan menjadi prioritas usulan untuk diusulkan di acara Musrenbang tingkat Kecamatan.

Selanjutnya memasuki tahap pengusulan program, tahap pengusulan program terjadi pada saat acara Musrenbang tingkat kecamatan, di dalam Musrenbang tingkat kecamatan ini seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Kolono termasuk Kepala Desa Wawoosu dan Kepala Desa Mataiwoi menyampaikan atau mengusulkan program-program pembangunan sesuai dengan hasil inventarisir dan keputusan musyawarah yang telah dilakukan didesanya mengenai sarana/prasarana yang menjadi prioritas untuk di bangun atau di rehabilitasi.

Tanggung jawab Kepala Desa di dalam tahap pengusulan program ini hanya sebatas di musrenbang tingkat kecamatan, selanjutnya usulan-usulan yang berhasil di jaring di tingkat kecamatan tersebut akan dibawa di acara Musrenbang tingkat Kabupaten.

Untuk lebih jelasnya perhatikan wawancara berikut ini:

“Kami sudah beberapa kali mengusulkan kegiatan-kegiatan atau program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada setiap acara Musrenbang tingkat kecamatan, namun baru tahun 2008 ini usulan kami baru terealisasi, itupun kami ketahui ketika kontraktor pelaksana datang ke desa untuk melapor bahwa akan ada proyek rehabilitasi dan peningkatan prasaran penyediaan air bersih”, (PI.1/DW.1).

“Setelah Musrenbang tingkat Kecamatan Kolono, kami hanya menunggu pak, apakah usulan kami untuk merehabilitasi prasarana air bersih diakomodir oleh Pemerintah Daerah, Alhamdulillah ternyata setelah sekian lama menunggu akhirnya bantuan itu datang juga,” (PI.1/DM.1)

Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling menentukan untuk keberhasilan program, seperti ulasan di atas bahwasanya program pembangunan prasarana penyediaan air bersih di wilayah penelitian ini adalah murni proyek, otomatis

semua biaya sudah dialokasikan sebelumnya termasuk biaya perencanaan, karena itu tanggungjawab untuk survei dan merencanakan diserahkan sepenuhnya kepada konsultan perencana.

Sumbang informasi ataupun pemikiran dari masyarakat lokal terkadang diabaikan, walaupun ada hanya terbatas menunjukkan dimana lokasi mata air, kondisi mata air sepanjang tahun, jalur pipa terdekat dan paling memungkinkan, selebihnya konsultant yang menggali sendiri. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

Kami hanya diminta tolong oleh konsultan perencana, untuk menunjukkan letak mata air dan jalur-jalur pipa yang sudah ada, katanya mau direhabilitasi (PI.2/DW.2).

Kebetulan sekali, saya tinggal dikebun pak, jadi waktu itu ada orang yang bertanya apa betul pipa yang melintas didalam kebun saya itu pipa air bersih yang berasal dari mata air diatas sana. (PI.3/DW.3).

Sewaktu konsultan datang didesa mereka hanya bertanya dimana letaknya mata air, selanjutnya mereka pergi sendiri melihat mata air yang dimaksud. (PI.1/DW.1)

Untuk pemilihan teknologi konsultant perencana tidak mengalami kesulitan ini dikarenakan proyek di dua desa lokasi penelitian merupakan proyek yang bertujuan untuk rehabilitasi dan peningkatan sehingga teknologi yang diterapkan di dua desa tersebut tinggal melanjutkan model yang sudah ada, yaitu dengan memanfaatkan beda ketinggian antar mata air dengan desa. Keberadaan mata air ditinggian di dua desa ini menjadikan teknologi sistem penyediaan air bersih di desa ini tidak memerlukan energi listrik agar air sampai dipermukiman penduduk. Sedangkan untuk pemilihan teknologi pendistribusian air kepada pelanggan ada perbedaan antara Desa Wawoosu dengan Desa Mataiwoi. Untuk Desa Wawoosu pendistribusian air kepada konsumen dengan menggunakan sistem Sambungan Rumah (SR) kemasing-masing rumah di seluruh desa, sehingga konsumen dapat langsung mendapatkan air dirumah masing-masing. Sementara di Desa Mataiwoi pendistribusian air kepada masyarakat menggunakan HU

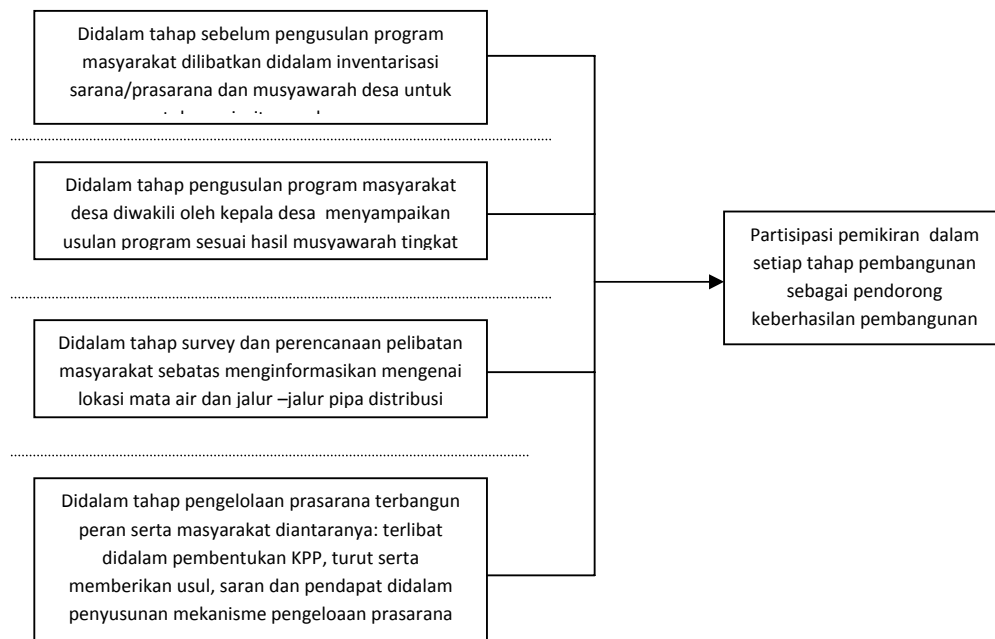
yang diletakkan ditempat-tempat tertentu yang dianggap strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mengambil air.

Selanjutnya adalah tahap pasca pembangunan atau tahap pemanfaatan prasarana yang telah berhasil dibangun. Bentuk partisipasi buah pikiran masyarakat dalam tahap pasca pembangunan atau pemanfaatan dari 2 (Dua) desa lokasi penelitian menunjukkan bahwa peran serta masyarakat relatif baik. Sebelum prasarana yang telah dibangun diserahkan kepada masyarakat desa setempat, pembentukan KPP merupakan sebuah keharusan sebagai syarat sebelum serahkannya prasarana terbangun oleh pemerintah daerah kepada masyarakat desa. Sehingga masyarakat desa setempat berinisiatif untuk membentuk KPP, keinginan masyarakat untuk membentuk KPP secepatnya selain keharusan juga karena masyarakat berkeinginan sesegera mungkin bisa menikmati air bersih dari prasarana yang telah berhasil dibangun, proses pembentukan KPP ini dilakukan didalam forum musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat dan terutamanya masyarakat desa, didalam forum musyawarah desa ini masyarakat diberi ruang dan waktu yang cukup menyampaikan usulan dan saran untuk membentuk kepengurusan KPP, mengenai mekanisme pengusulan dan pemilihan kepengurusan KPP, prinsip dari KPP sendiri adalah dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Setelah terbentuk KPP yang terdiri dari: Ketua, bendahara dan tenaga teknis. Musyawarah berlanjut untuk membahas mengenai tugas, tanggungjawab KPP didalam pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan ketika ada kerusakan didalam sistem prasarana air bersih serta hak-hak KPP. Terakhir musyawarah membahas mengenai biaya operasional dan mekanisme pembayaran, besaran iuran serta insentif atau honor dari pengurus KPP. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“kewajiban kami masyarakat Desa Wawoosu setelah selesainya pembangunan adalah membentuk Kelompok Pengguna Pemeliharaan (KPP, yang bertugas untuk mengkoordinir masyarakat melakukan pemeliharaan terhadap prasarana air bersih, anggota-anggotanya berasal dari masyarakat Desa Wawoosu sendiri dan berjumlah tiga orang terdiri dari Seorang ketua, bendahara an tenaga teknis” itu penyampaian dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum pak, (PI.2/DW.2).

Dari uraian mengenai sumbangsih pemikiran didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih dilokasi penelitian diatas dapat digambarkan melalui diagram dibawah ini:



Sumber : Hasil Analisis, 2010

DIAGRAM 4.1
PEMIKIRAN SEBAGAI PENDORONG
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN

Pada diagram dapat dijelaskan bahwa pemikiran sebagai pendorong keberhasilan pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih terbukti. Pembuktian ini didasari hasil observasi dan wawancara lapangan sebagai fakta untuk mendukung dan memperkuat kesimpulan bahwa sumbangsih pemikiran ini terjadi disemua tahapan, yaitu : tahap sebelum pengusulan program, tahap disaat pengusulan program, tahap pembangunan dan tahap pengelolaan prasarana air bersih di Desa Waworano dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.

4.1.2. Tenaga Dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Bentuk Partisipasi yang Paling Diminati Masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa tenaga sebagai salah satu bentuk partisipasi yang paling diminati oleh masyarakat desa Wawoosu dan desa Mataiwoi terutamanya didalam tahap pelaksanaan pembangunan fisik.

Tingginya keinginan masyarakat untuk turut bekerja didalam proyek penyediaan air bersih dikarenakan kontribusi tenaga tidak berkaitan dengan/ membutuhkan pendidikan tinggi dan keahlian khusus, apalagi hanya sebagai buruh kasar. Adapun jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh kontraktor pelaksana diantaranya: menggali dan menimbun jalur pipa, perbaikan bak penangkap (*intake*) dan sementara untuk pemasangan pipa dan sambungan rumah (SR) kontraktor mendatangkan tenaga kerja dari luar desa yang mempunyai keahlian dan pengalaman didalam pekerjaan

serupa. Tingginya minat masyarakat untuk turut bekerja disebabkan kondisi umum tingkat pendidikan masyarakat di dua desa lokasi penelitian relatif rendah, dengan rendahnya pendidikan kemampuan masyarakat pun menjadi minim dan tidak variatif yang menyebabkan pilihan lapangan pekerjaan terbatas.

Untuk lebih memperjelas perhatikan wawancara dibawah ini,

“Ya pak kami sangat bersyukur, walaupun hanya sebagai tenaga kasar kami diberi kesempatan untuk bekerja, mau diapa lagi bisanya hanya sebatas mencangkul pak. (TI.2/DW.2).

Dengan adanya proyek, masyarakat desa merasa terbantu pak, karena mereka tidak lagi keluar desa untuk mencari pekerjaan sampingan mengisi hari-hari mereka sambil menunggu masa panen (TI.1/DW.1)

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat di semua desa lokasi penelitian adalah bertani dan berkebun, sehingga didalam beraktifitas keseharian masyarakat lebih dominan menggunakan tenaga dibandingkan dengan pemikiran, kondisi ini menyebabkan keinginan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya tidak ada, yang menyebabkan keahlian dan keterampilan masyarakat tidak statis sehingga pilihan-pilihan pekerjaanpun untuk mengisi waktu menggangukannya menjadi terbatas. Dengan adanya proyek pembangunan prasarana air bersih di desa masyarakat merasa terbantu karena bisa turut bekerja walaupun hanya sebagai tenaga kasar apalagi waktu pelaksanaan proyek bertepatan dengan musim pasca tanam, sehingga masyarakat mempunyai waktu luang yang cukup untuk bekerja walaupun sebagai buruh kasar.

Dengan adanya upah kerja yang disesuaikan dengan standart minimum kabupaten merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, apalagi dengan bayaran yang relatif tinggi dibandingkan dengan penghasilan sehari-hari pada umumnya masyarakat, keadaan ini otomatis sangat membantu perekonomian masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan hidup sambil menunggu musim panen karena penghasilan masyarakat yang turut bekerja lebih besar dibandingkan dengan hasil berkebun.

Untuk lebih memperjelas perhatikan wawancara dibawah ini,

“Alhamdulillah pak ada proyek, ada yang bisa diharap untuk biaya hidup sementara sambil menunggu panen”. (TI.3/DW.3).

“Walaupun sedikit hasil dari proyek, tapi sangat membantu kami pak”. (TI.4/DM.2).

Dengan adanya proyek pembangunan sistem prasarana penyediaan air bersih didesa masyarakat seakan-akan berlomba untuk turut dipekerjakan walaupun hanya sebagai buruh kasar, sementara jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh kontraktor pelaksana hanya sebatas menggali jalur pipa, menimbun pipa dan membantu didalam pembangunan bangunan pelengkap seperti: hidrant umum dan bak penangkap air (*intake*), sedangkan untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian dan pengalaman kerja atau pekerjaan yang sangat spesifik seperti: menyambung pipa dan memasang sambungan rumah beserta meteran air biasanya kontraktor mendatangkan teknisi dari luar desa. kondisi ini tidak dipermasalahkan oleh masyarakat, yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa dipekerjakan, hal ini disebabkan tidak adanya pilihan/alternatif pekerjaan masyarakat petani pasca tanam sambil menunggu musim panen dan lagi hanya pekerjaan menggali dan menimbun yang bisa masyarakat kerjakan.



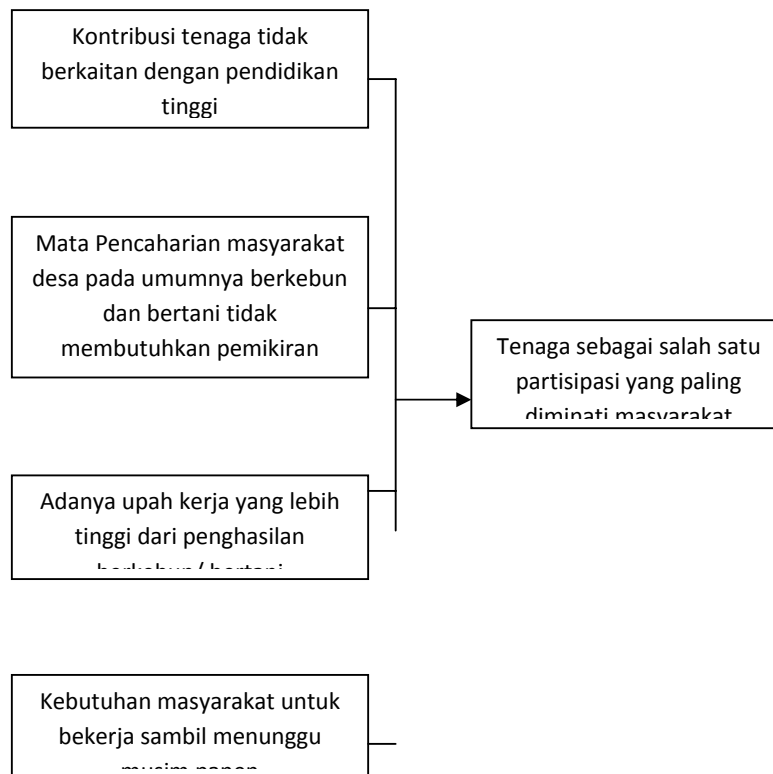
Sumber : Hasil Observasi lapangan 2009

GAMBAR 4.1

PEKERJAAN PENGGALIAN JALUR PIPA

Dari gambar 4.1 tersebut diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat berupa kontribusi tenaga didalam pekerjaan penggalian jalur pipa distribusi air bersih merupakan salah satu partisipasi yang paling diminati oleh masyarakat.

Dari uraian diatas dapat digambarkan melalui diagram dibawah ini:



Sumber : Hasil Analisis Penelitian, 2010

GAMBAR 4.2

TENAGA SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI YANG PALING DIMINATI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Dari Diagram diatas dapat dijelaskan bahwa tema yang diinterpretasikan adalah tenaga sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang paling diminati terutama di dalam pembangunan prasarana air bersih di Desa Waworano dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.

Kesimpulan bahwa partisipasi tenaga merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang paling diminati didalam pelaksanaan pembangunan didukung oleh fakta-fakta yang didapat dari hasil observasi dan wawancara, adapun fakta-fakta tersebut diantaranya:

1. Kontribusi tenaga tidak berkaitan dengan pendidikan.
2. Mata pencaharian masyarakat pada umumnya berkebun dan bertani tidak membutuhkan pendidikan tetapi tenaga.
3. Adanya upah kerja yang lebih tinggi dari penghasilan bertani/berkebun.
4. Kebutuhan masyarakat bekerja sambil menunggu musim panen.

4.1.3. Uang Sebagai Konsekwensi Pemakaian Air pada Tahap Pengelolaan

Hasil observasi dan wawancara di dua desa lokasi penelitian didapat bahwa masyarakatnya pada umumnya berkeinginan untuk turut berpartisipasi mengelola prasarana air bersih terbangun yang telah diserahkan secara penuh kepada masyarakat melalui KPP, dengan demikian tanggungjawab untuk mengelola agar prasarana tersebut terjaga keberlanjutan berada ditangan seluruh masyarakat desa dan KPP yang telah terbentuk. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah berupa iuran uang sebagai konsekwensi atas pemakaian air bersih disepakati di dalam musyawarah desa.

Masyarakat desa sadar keberadaan biaya operasional dan pemeliharaan merupakan faktor penting dalam menjamin keberlanjutan sistem penyediaan air bersih di perdesaan, karena selama ini dengan tidak adanya biaya operasional untuk pengelolaan prasarana menyebabkan prasarana yang sudah ada menjadi tidak terpelihara dan pada akhirnya mengalami kerusakan.

Tidak dianggarkannya biaya operasional dan biaya pemeliharaan dari instansi terkait menyebabkan masyarakat harus berinisiatif untuk mengumpulkan dana secara swadaya, dana yang terkumpul ini akan dijadikan biaya operasional, biaya pemeliharaan

dan perbaikan apabila ada salah satu fasilitas sistem penyediaan air bersih mengalami kerusakan. Dana ini berasal dari pembayaran pemakaian air bentuknya berupa iuran rutin perbulannya bagi setiap konsumen. Besaran iuran dan mekanisme pembayaran masing-masing desa bervariasi tergantung dari hasil kesepakatan masyarakat didalam musyawarah desa. Biaya operasional yang terkumpul ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan karena tidak adanya alokasi biaya dari instansi terkait untuk operasional, pemeliharaan dan perbaikan pasca pembangunan.

Berikut petikan wawancara dengan salah satu masyarakat desa:

“Kami sangat setuju pak dengan adanya iuran bulanan atas penggunaan air, apalagi sekarang ini kami tak perlu lagi jauh – jauh untuk ambil air karena air sudah sampai dirumah kami masing-masing”. (UI.3/DW.3).

“Seandainya air bisa langsung nyampai dirumah kami akan lebih tertib untuk bayar iuran bulanan kan tidak seberapa ji, tapi tidak apalah kami ambil air di HU walaupun agak jauh namun dibandingkan dengan sebelumnya ini lebih baik”. (UI.4/DM.3).

Desa Wawoosu besaran tarif yang dikenakan kepada setiap pelanggan disepakati sebesar Rp. 300,- perkubik, kesepakatan mengenai besaran iuran Rp. 300,- perkubik disebabkan karena sistem pendistribusian air di Desa Wawoosu kepada masyarakat adalah dengan menggunakan Sambungan Rumah (SR) dan telah dilengkapi juga dengan meteran air sehingga penggunaan air bersih oleh konsumen menjadi terkontrol. Tanggungjawab untuk menarik iuran bulanan dilakukan oleh KPP dengan mendatangi masing-masing rumah pelanggan, selama ini pembayaran iuran bulanan cukup lancar, bahkan ada sebagian masyarakat yang bersedia untuk menaikkan tarif apabila ada peningkatan pelayanan, tingginya kepedulian masyarakat yang diimplementasikan dengan tertib membayar iuran.

Berikut kutipan wawancara dengan salah satu warga pemanfaat air bersih.

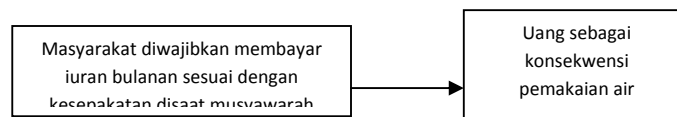
“tidak ada masalah pak kami harus membayar sebesar Rp. 300,- perkubik, kalau dulu sih kami mengambil air bersih dari HU apalagi agak jauh pak rumah saya dengan lokasi HU, tapi sekarang Alhamdulillah air bersih sudah sampai dirumah kami masing-masing”. (PTP.5/DW.5)

“syukur pak air sampai dirumah kami, jadi saya dak repot-repot lagi untuk ngambil air, apalagi cuman Rp. 300,- perkubik lebih dari itupun dengan senang hati saya akan bayar pak”. (PTP.5/DW.5)

Untuk Desa Mataiwoi masyarakat sudah sepakat mengenai besaran iuran sama besarnya yaitu Rp. 5.000,- setiap Rumah, kesepakatan ini diambil dikarenakan untuk pelayanan air bersih di Desa Mataiwoi masyarakat mengambil air dari Hidran Umum (HU), sehingga untuk pemenuhan kebutuhan air bersihnya setiap hari masyarakat pergi mendatangi HU, pada awalnya masyarakat pelanggan tertib melakukan pembayaran namun lama kelamaan mulai menunggak, salah satu alasannya adalah faktor lokasi HU yang dianggap tidak adil, karena ada masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan HU sehingga akses untuk mendapatkan air lebih mudah, tetapi tidak sedikit juga rumahnya yang jaraknya cukup jauh dari HU sehingga merasa kesulitan untuk mengambil air karena harus berjalan kaki cukup jauh. Untuk memperjelas penjelasan perhatikan kutipan wawancara dengan salah satu warga pemanfaat air bersih.

“pada awalnya kami sangat bersyukur dengan diperbaikinya prasarana air bersih didesa kami apalagi ketika kami tahu air sudah kembali mengalir sampai desa, kami setuju-setuju saja ketika dimusyawarah desa meyepakati beban iuran kami masing-masing rumah sebesar Rp. 5000,-, tapi akhir-akhir ini saya jadi malas bayar,gimana dak malas pak rumah saya agak jauh dihidran umum sementara bayarnya disamakan dengan yang dekat rumahnya dengan hidran umum, malahan akhir-akhir saya dengar-dengar air kadang mengalir kadang tidak pak”. (PTP.4/DM.2).

Dari uraian diatas dapat dijelaskan melalui diagram dibawah ini:



Sumber : Hasil Analisis, 2010

GAMBAR 4.3
UANG SEBAGAI KONSEKWENSI
PENGUNAAN AIR

Dari Diagram diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa berupa uang sebagai konsekwensi penggunaan air terjadi di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi walaupun ada perbedaan mengenai besaran iuran setiap bulannya.

4.2. Kajian Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana penyediaan Air Bersih

Dari hasil survei dan wawancara di dua desa lokasi penelitian didapatkan fakta adanya perbedaan kondisi prasarana air bersih antara di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi, kondisi prasarana di Desa Wawoosu dalam keadaan terawat dan tetap mampu melayani kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakat desa, sedangkan kondisi prasarana di Desa Mataiwoi kurang terawat sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang optimal karena terkadang air dari mata air tidak mengalir sehingga tidak bisa mengisi hidran umum sebagai tempat menampung air dan tempat masyarakat untuk mengambil air.

Perbedaan tingkat keberhasilan didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Pemilihan teknologi tepat guna
2. Ketersediaan dana pembangunan
3. Integritas Kelompok Pengguna Pemelihara (KPP).

4.2.1 Pemilihan Teknologi Tepat Guna Sebagai Pendorong Keberhasilan didalam Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih

Program pembangunan sistem penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi adalah murni proyek dengan pendanaan berasal dari dana pusat yaitu DAK, adalah murni proyek sehingga pelaksanaannya dilakukan secara kontraktual, yaitu mulai dari kegiatan survei dan perencanaan diserahkan sepenuhnya kepada konsultan perencana sampai kepada pelaksanaan pembangunan fisik diserahkan sepenuhnya kepada kontraktor. Pada umumnya program pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual bersifat *top down* sehingga seluruh tahapan pelaksanaan harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi terhadap teknologi sistem penyediaan air bersih di dua desa tersebut secara umum hampir sama yaitu menggunakan sistem pengolahan air bersih secara sederhana, pemilihan desain dengan menggunakan sistem yang sederhana dimaksudkan agar masyarakat desa tidak kesulitan untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan pasca diserahkan oleh pemerintah daerah.

Bak penangkap (intake) lokasi berada didekat mata air desain yang diterapkan di dua desa adalah sama (proto type), bak penangkap air ini di desain secara sederhana namun tetap tidak mengurangi fungsinya, fungsi dari bak penangkap adalah untuk menampung dan mengelola air, di dalam bak penangkap hanya dilengkapi dengan alat penyaring sederhana yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lokasi yaitu: ijuk dari pohon aren, pasir sungai dan kerikil, tujuan dari pengolahan air ini adalah untuk memisahkan kotoran yang berasal dari pohon-pohon disekitar mata air seperti: daun ranting-ranting/cabang pohon yang patah dan dari lumpur dan pasir yang terbawa aliran air. Diharapkan nantinya selain harganya murah juga mudah untuk mendapatkannya karena bahan-bahan yang dibutuhkan sudah tersedia di desa, masyarakat desa khususnya KPP akan dengan mudah melakukan pemeliharaan apabila sudah jenuh dengan banyaknya lumpur dipenyaringan serta melakukan pergantian bahan-bahan penyaring apabila sudah tidak lagi berfungsi.

Untuk bak penampung air berfungsi untuk menampung air yang dihasilkan dari bak penangkap, desain yang diterapkan adalah sama untuk semua desa (proto type), Desain bak penampung sangat sederhana yaitu berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang 1,2 meter dan tinggi 1 meter. Pemilihan lokasi bak penampung biasanya ditempat yang datar dan berada diketinggian dengan tujuan agar air bersih dapat mengalir secara gravitasi serta tidak terlalu jauh dari bak penangkap air.

Perbedaannya hanya terletak pada sistem pendistribusian air bersih kepada konsumen, untuk Desa Wawoosu teknologi sistem pendistribusian air bersih kepada masyarakat dengan menggunakan Sambungan Rumah (SR) yang dilengkapi meteran air, dengan sistem ini air bersih akan mengalir sampai kerumah-rumah penduduk. Sementara sistem pendistribusian air di Desa Mataiwoi hanya dengan menggunakan hidran umum yang berjumlah 4 (Empat) buah, pemilihan penempatan HU ini adalah lokasi yang dianggap strategis dan menyebar di seluruh wilayah desa sebagai tempat penampungan dan tempat pengambilan air oleh masyarakat.



Sumber : Hasil Observasi lapangan 2009

GAMBAR 4.5

PRASARANA AIR BERSIH DI DESA WAWOOSU



Sumber : Hasil Observasi lapangan 2009

GAMBAR 4.6

PRASARANA AIR BERSIH DI DESA MATAIWOI

Dari Gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa sistem distribusi air bersih kepada konsumen di Desa Wawoosu menggunakan sistem sambungan rumah (SR) secara langsung. Sedangkan Gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa sistem distribusi air bersih kepada konsumen di Desa Mataiwoi menggunakan hidran umum sebagai tempat menampung dan tempat masyarakat untuk mengambil air.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya survei dan perencanaan untuk pembangunan sistem penyediaan air bersih khususnya di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi sepenuhnya menjadi tanggungjawab Konsultan Perencana sebagai pelaksana sementara Dinas Pekerjaan Umum hanya sekedar mengarahkan, ketersediaan dan kecukupan dana yang menjadi masalah sehingga hasil perencanaan dimasing-masing desa terkadang tidak sama.

Untuk lebih memperjelas perhatikan kutipan wawancara dibawah ini:

“Tanggungjawab untuk melakukan survei dan perencanaan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Konawe Selatan untuk semua jenis proyek baik yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun dari Dana Alokasi Umum (DAU)

diserahkan sepenuhnya kepada Konsultan Perencana kami di Dinas Pekerjaan Umum hanya mengarahkan saja, dan mengapa hasil perencanaan di masing-masing desa terkadang berbeda antara satu dengan yang lain? Hal ini berhubungan dengan alokasi dana di masing-masing desa sasaran lokasi proyek, perlu saya sampaikan bahwa pengalokasian dana itu dilakukan jauh sebelum proses survei dan perencanaan dilakukan, sebenarnya disini pangkal masalahnya, kenapa, ya karena perencanaan dilapangan harus menyesuaikan dengan ketersediaan dana”. (PTP.2/1).

Pemilihan model teknologi sistem penyediaan air bersih sangat menentukan tingkat keberhasilan dari program ini seperti yang terjadi di Desa Wawoosu dengan menggunakan sistem pendistribusian sambungan rumah yang dilengkapi dengan meteran air menyebabkan penggunaan air oleh konsumen terkontrol sehingga efektifitas dan efisiensi adanya prasarana penyediaan dengan pemilihan teknologi ini bisa dirasakan bersama, dampaknya adalah tingkat ketertiban masyarakat untuk membayar sesuai dengan hasil kesepakatan bersama di musyawarah desa baik mengenai waktu pembayaran dan besaran iuran tetap tinggi, semangat KPP untuk bekerja menjalankan tanggungjawabnya tetap tinggi, walaupun tetap dibantu oleh seluruh masyarakat desa pada saat-saat tertentu untuk mengelola dengan memelihara dan menjaga keberlanjutan prasarana penyediaan air bersih. Hasilnya adalah tetap terpeliharanya prasarana air bersih ini adalah lancarnya air mengalirnya kepada masyarakat sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan air bersih terpelihara.

Untuk lebih jelasnya diatas perhatikan kutipan wawancara dibawah ini:

“tidak ada masalah pak kami harus membayar sebesar Rp. 300,- perkubik, kalau dulu sih kami mengambil air bersih dari HU apalagi agak jauh pak rumah saya dengan lokasi HU, tapi sekarang Alhamdulillah air bersih sudah sampai dirumah kami masing-masing”. (PTP.5/DW.5).

“syukur pak air sampai dirumah kami, jadi saya tak repot-repot lagi untuk mengambil air, apalagi cuma Rp. 300,- perkubik lebih dari itu pun dengan senang hati saya akan bayar pak”. (PTP.5/DW.5).

Dari hasil wawancara diatas nampak jelas masyarakat desa Wawoosu merasa puas dengan pemilihan dan penerapan sistem teknologi pendistribusian air bersih menggunakan sambungan rumah yang dilengkapi dengan meteran air.

Kondisi berbeda dengan yang terjadi di Desa Mataiwoi, sistem teknologi pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang menggunakan hidran umum menyebabkan pelayanan kurang optimal, dengan menggunakan hidran umum sebanyak 4 (empat) buah yang penempatannya menyebar ditempat-tempat strategis diseluruh desa untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat seluruh desa menjadi tidak efektif dan efisien lagi bagi sebagian masyarakat yang kebetulan lokasi rumahnya berjauhan dengan lokasi hidran umum, walaupun pada awal beroperasinya prasarana penyediaan air bersih antusias masyarakat untuk datang mandi dan mencuci serta mengambil air untuk kebutuhan masak dan minum cukup tinggi namun lama kelamaan menurun, masyarakat yang lokasi rumahnya jauh dari hidran umum kembali menggunakan air sumur untuk pemenuhan kebutuhan air sehari-hari. Keadaan ini berimbas kepada munculnya keengganan masyarakat untuk membayar iuran wajib bulanan sebesar Rp. 5.000,-, dampak lebih lanjut adalah berkurangnya kontribusi dana dari masyarakat untuk biaya operasional dan pemeliharaan sehingga KPP merasa kesulitan untuk mengatur dan mengalokasikan biaya pemeliharaan dan operasionalnya. Lama kelamaan KPPpun menjadi malas untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab mengelola prasarana penyediaan air bersih, akibatnya adalah prasarana menjadi tidak terawat terutama dibagian bak penangkap air yang sering tertimbun endapan lumpur sehingga fungsi bak penampung untuk menampung air sebelum dialirkan menjadi tidak maksimal, banyaknya sambungan-sambungan pipa distribusi yang mengalami kebocoran tidak lagi diperbaiki, hidran umum tidak lagi bersih sehingga pada akhirnya adalah tersendatnya aliran air dari bak penampung menuju hidran umum sehingga hidran umum terkadang tidak terisi, pada akhirnya adalah hampir seluruh masyarakat merasa enggan untuk membayar iuran wajib bulannya. Untuk lebih jelasnya perhatikan kutipan wawancara dengan salah satu warga pemanfaat air bersih.

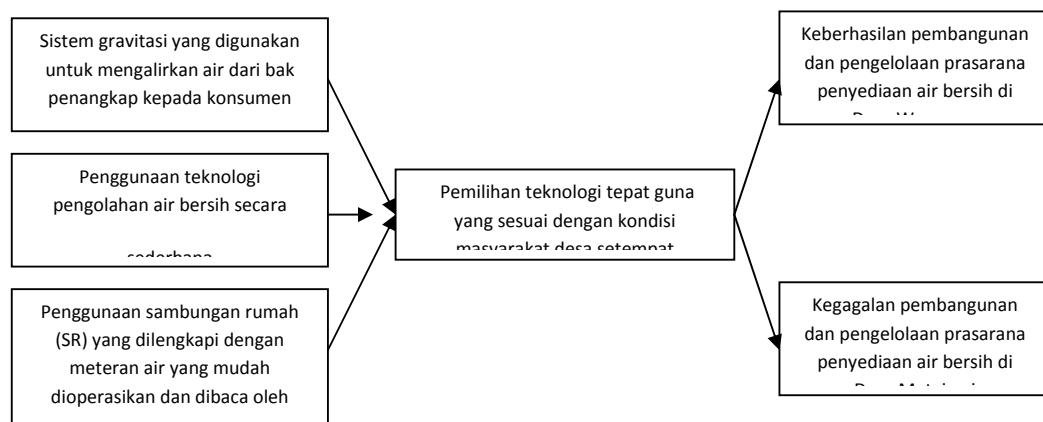
“pada awalnya kami sangat bersyukur dengan diperbaikinya prasarana air bersih didesa kami apalagi ketika kami tahu air sudah kembali mengalir sampai desa, kami setuju-setuju saja ketika dimusyawarah desa meyepakati beban iuran kami masing-masing rumah sebesar Rp. 5000,-, tapi akhir-akhir ini saya jadi malas bayar,gimana dak malas pak rumah saya agak jauh dihidran umum sementara

bayarnya disamakan dengan yang dekat rumahnya dengan hidran umum, malahan akhir-akhir saya dengar-dengar air kadang mengalir kadang tidak pak". (PTP.4/DM.2

"Sebenarnya yang saya harapkan sistem peneydiaan air bersih di Desa Mataiwoi tidak lagi menggunakan hidran umum, tetapi menggunakan sambungan rumah yang dilengkapi dengan meteran air sehingga masyarakat bisa mengontrol penggunaan airnya, apalagi debit air yang dikeluarkan mata air dari tahun ketahun bukannya bertambah tinggi tapi menurun", (IKP.1/DM.1)

Dari hasil wawancara diatas nampak jelas bahwa masyarakat Desa Mataiwoi merasa kurang puas dengan pemilihan dan penerapan sistem teknologi pendistribusian air bersih yang hanya menggunakan hidran umum untuk melayani masyarakat konsumen.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan melalui diagram dibawah ini:



Sumber : Hasil Analisis, 2010

DIAGRAM 4.7

PEMILIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA SEBAGAI PENDORONG KEBERHASILAN PENGLOLAAN PRASARANA

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi kondisi berbeda diantara Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi mengenai tingkat keberhasilannya terutama didalam pengelolaan prasarana air bersih, perbedaan tingkat keberhasilan didua desa tersebut diakibatkan kurang tepatnya pemilihan teknologi sistem penyediaan air bersih mulai dari bak penangkap (intake) yang dilengkapi dengan pengolahan air secara sederhana sampai kepada pendistribusian air bersih kepada konsumen, pada tahap pendistribusian air untuk Desa Wawoosu menggunakan sistem sambungan rumah dilengkapi dengan meteran air sedangkan Desa Mataiwoi hanya dengan hidran umum yang berjumlah 4 (empat) buah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan air bersih seluruh masyarakatnya .

4.2.2. Ketersediaan Dana Pembangunan

Kutipan wawancara tertutup dengan salah satu pengambil kebijakan khususnya bidang keciptakaryaan seksi air bersih dan air limbah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan:

“Tanggungjawab untuk melakukan survei dan perencanaan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Konawe Selatan untuk semua jenis proyek baik yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun dari Dana Alokasi Umum (DAU) diserahkan sepenuhnya kepada Konsultan Perencana kami di Dinas Pekerjaan Umum hanya mengarahkan saja, dan mengapa hasil perencanaan di masing-masing desa terkadang berbeda antara satu dengan yang lain? Hal ini berhubungan dengan alokasi dana di masing-masing desa sasaran lokasi proyek, perlu saya sampaikan bahwa pengalokasian dana itu dilakukan jauh sebelum proses survei dan perencanaan dilakukan, sebenarnya disini pangkal masalahnya, kenapa, ya karena perencanaan dilapangan harus menyesuaikan dengan ketersediaan dana”. (PTP.I/1).

Dari kutipan wawancara diatas dapat dijelaskan beberapa point penting, yaitu: Keterbatasan kesediaan dana pemerintah baik pusat maupun daerah untuk alokasi dana

pembangunan air bersih sehingga perencanaan pembangunan penyediaan air bersihpun harus menyesuaikan dengan ketersediaan dana.

Keterbatasan dana pemerintah pusat dan daerah untuk alokasi pembangunan prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat miskin merupakan masalah klasik bagi bangsa ini, malahan dari tahun ketahun kemampuan pendanaan tersebut semakin menurun sebagai dampak dari beban untuk menutupi anggaran rutin yang semakin meningkat.

Dengan keterbatasan dana tersebut terkadang proses perencanaan seperti dipaksakan yang penting target untuk membangun prasarana penyediaan air bersih terealisasi, sehingga banyak sekali hasil perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat setempat, hal ini diakibat karena desain/perencanaan harus menyesuaikan dengan anggaran dana yang sudah diplot sebelumnya, sehingga hasil perencanaan masing-masing desa berbeda antara satu dengan yang lain.

Untuk lebih jelasnya diatas perhatikan kutipan wawancara dibawah ini:

“Sebenarnya yang saya harapkan sistem penyediaan air bersih di Desa Mataiwoi tidak lagi menggunakan hidran umum lagi pak, tetapi menggunakan sambungan rumah yang dilengkapi dengan meteran air sehingga masyarakat bisa mengontrol penggunaan airnya, apalagi debit air yang dikeluarkan mata air dari tahun ketahun bukannya bertambah tinggi tapi menurun”, (PTP.I/DM.1)

Untuk lebih jelasnya diatas perhatikan kutipan wawancara dibawah ini:

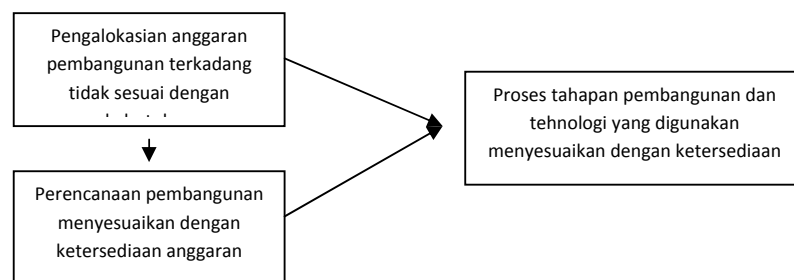


DIAGRAM 4.8

KETERSEDIAAN DANA PEMBANGUNAN

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan terutamanya pengelolaan hasil pembangunan oleh masyarakat, dengan dua fakta bahwa pengalokasian pendanaan untuk pembangunan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini bisa dijelaskan lebih lanjut bahwa dari sekian desa lokasi sasaran pembangunan prasarana penyediaan air bersih kondisi eksisting berbeda. Perbedaan ini terkait jarak antara desa dengan lokasi mata air, panjangnya desa dan jumlah jiwa/KK yang ada didesa, sehingga pendanaannyapun akan berbeda. Yang kedua adalah proses perencanaan yang harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran hal inipun dapat dipahami bahwa percuma direncanakan sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat pada akhirnya dana yang dipakai untuk membangun sesuai dengan hasil perencanaan tidak mencukupi.

4.2.3. Integritas Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP) Sebagai Kunci Keberhasilan dan Kegagalan Pengelolaan

Dari hasil observasi di dua desa lokasi penelitian didapat bahwa ujung tombak dari keberhasilan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih adalah KPP, karena KPPI lah yang bertanggungjawab untuk mengoperasikan dan memelihara semua fasilitas yang ada pada sistem penyediaan air bersih, mulai dari pembersihan bak penangkap air di mata air, membersihkan pipa distribusi dari kotoran-kotoran yang sempat masuk kedalam pipa sampai melakukan perbaikan-perbaikan apabila ada kerusakan entah itu di bak penangkap, Kebocoran pipa maupun kerusakan sambungan-sambungan rumah dan hidran umum.

Selain itu KPP juga bertanggungjawab untuk mengkoordinir iuran bulanan dari masyarakat pengguna, besaran iuran di dua desa berbeda, kalau di Desa Wawoosu

tergantung jumlah kubikasi pemakaian air oleh konsumen tapi kalau di Desa Mataiwoi besarnya rata yaitu Rp. 5.000,- setiap rumah. Dari hasil iuran bulanan tersebut KPP akan mengelolanya untuk dipergunakan sebagai biaya operasional, biaya pemeliharaan prasarana, biaya perbaikan apabila ada kerusakan dan untuk membayar honor dari KPP itu sendiri, mulai dari ketua, bendahara dan tenaga teknis.

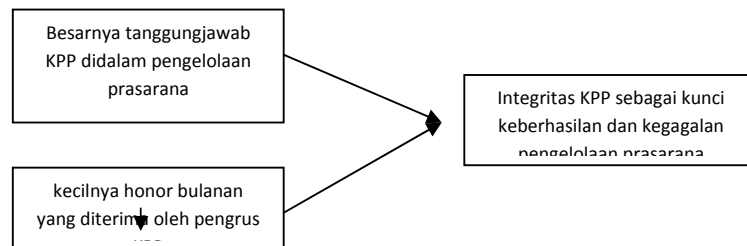
Begitu strategis dan pentingnya peran dari KPP mulai dari Ketua, bendahara dan tenaga teknisnya sehingga disaat proses pengusulan dan pemilihannya betul-betul harus dipilih dari anggota masyarakat yang memiliki komitmen kuat untuk bekerja dengan tulus dan ikhlas, memiliki waktu yang luang untuk mengoperasikan dan memelihara serta memiliki kemampuan teknis untuk melakukan perbaikan apabila ada prasarana mengalami kerusakan.

Untuk lebih jelasnya diatas perhatikan kutipan wawancara dibawah ini:

“saya sangat bersyukur pak, dengan adanya KPP, karena KPPlah yang selama ini mengoperasikan dan memelihara prasarana, terutamanya tenaga teknisnya karena kapanpun masyarakat butuh untuk memperbaiki dia selalu siap, padahal dari segi honor saya anggap tidak sebanding”. (IKP.1/DW.1).

“sebenarnya tidak sebanding antara honor yang kami terima yaitu sebesar Rp.200.000,- setiap bulan dengan beban tanggungjawab kami pak, tapi gimana lagi masyarakat sudah memilih dan kami sudah terlanjur menyanggupi dan lagian kami sekeluarga juga turut menikmati air bersih pak”. (UI.1/DW.2).

Dari hasil pengamatan dan diperkuat dengan hasil wawancara diatas dapatlah dijelaskan melalui diagram dibawah ini:



Sumber : Hasil Analisis, 2010

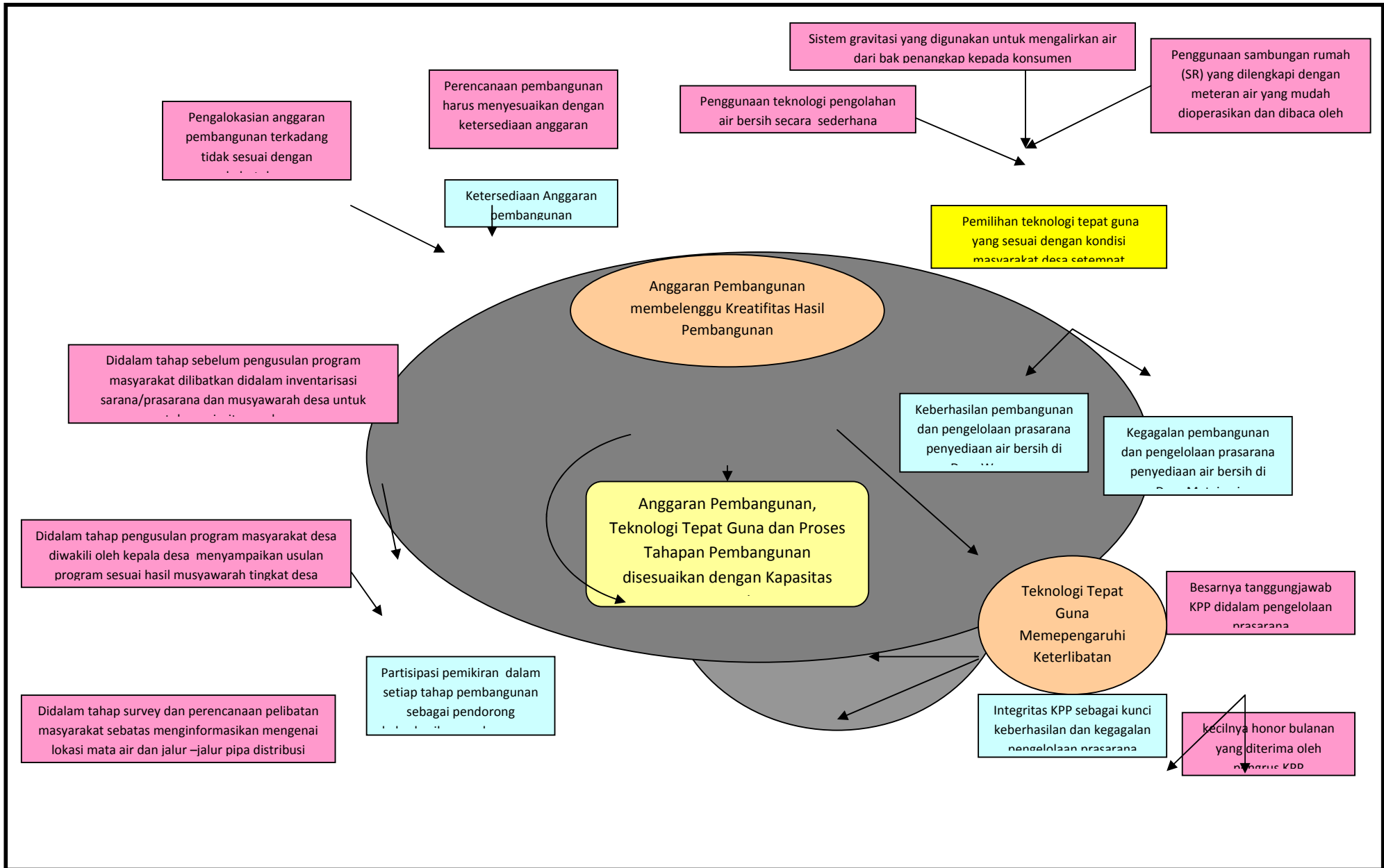
GAMBAR 4.9

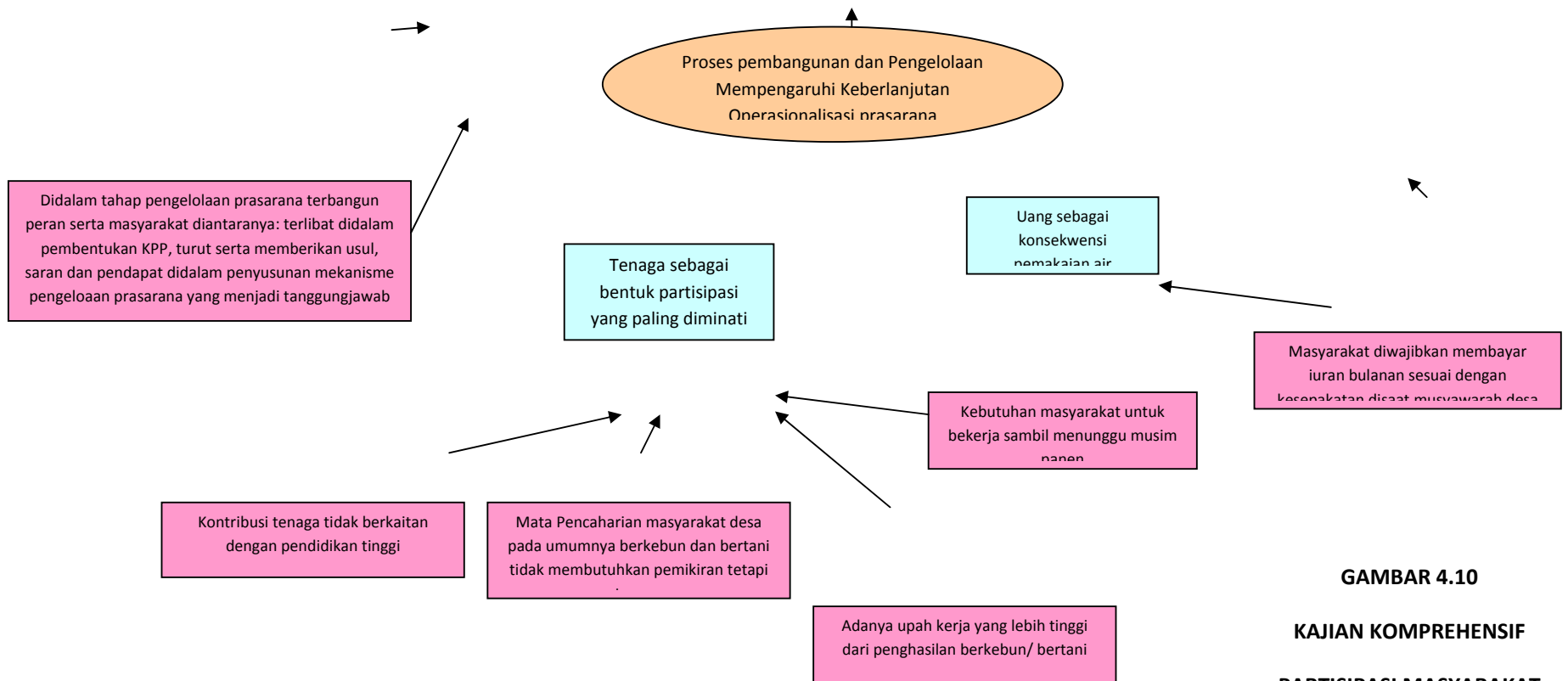
INTEGRITAS KPP SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN DAN KEGAGGALAN PENGELOLAAN

Dari Gambar diatas dapat disimpulkan bahwa integritas Kelompok Pengguna pemelihara (KPP) mulai dari ketua, bendahara dan tenaga teknisnya sangat menentukan terhadap keberhasilan/kegagalan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih didesa, hal ini didukung oleh dua fakta temuan dilapangan, yaitu: beban tanggung jawab dari KPP sedemikian besar, mulai dari pengoperasian prasarana, memelihara dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila ada kerusakan serta mengkordinir iuran wajib bulanan masyarakat desa, sementara honor yang diterimanya tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggungjawabnya. Dari dua fakta ini tidak salah rasanya apabila integritas dari masing-masing individu baik ketua, bendahara maupun anggota merupakan modal dasar mereka untuk bekerja demi pengabdianya kepada masyarakat tanpa menuntut imbalan yang harus seimbang dengan besarnya beban tanggungjawab yang mereka emban.

4.3 Kajian Komprehensif Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Air Bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi

Berdasarkan kajian dari beberapa tema tersebut diatas dapat dilakukan kajian komprehensif mengenai partisipasi masyarakat didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi. Kajian komprehensif tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada diagram dibawah ini:





Sumber: Analisis Penulis, 2010

GAMBAR 4.10

KAJIAN KOMPREHENSIF

PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR DESA

Dari gambar di depan dapat dilihat bahwa pada bagian tengah sebagai pusat diagram merupakan konsep dari keseluruhan diagram menerangkan bahwa: Anggaran Pembangunan, pemilihan teknologi tepat guna dan proses setiap tahapan pembangunan harus disesuaikan dengan kapasitas penduduk setempat yang menentukan keberhasilan dari partisipasi masyarakat didalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Konsep tersebut didukung oleh 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Anggaran Pembangunan yang Membelenggu Kreativitas Pembangunan

Anggaran pembangunan yang membelenggu kreatifitas pembangunan menduduki posisi yang paling penting dan sangat menentukan untuk keberhasilan dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih di Lokasi penelitian, hal ini didukung oleh beberapa alasan, yaitu:

- Pengalokasian anggaran pembangunan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan
- Perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

2. Teknologi Tepat Guna Mempengaruhi Keterlibatan Masyarakat

a. Keberhasilan pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih di Desa Wawoosu dikarenakan pemilihan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi masyarakat desa setempat, yang didukung oleh beberapa hal, yaitu:

- Pemanfaatan sistem gravitasi untuk mengalirkan air
- Penggunaan teknologi pengolahan air bersih secara sederhana
- Penggunaan Sambungan Rumah (SR) yang dilengkapi dengan meteran air yang mudah dibaca oleh masyarakat.

b. Kegagalan pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih di Desa Mataiwoi karena pemilihan teknologi tepat guna yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat desa setempat, yang didukung oleh beberapa hal, yaitu:

- Pemanfaatan sistem gravitasi untuk mengalirkan air
- Penggunaan teknologi pengolahan air bersih secara sederhana
- Penggunaan Hidran Umum sebagai tempat menampung dan tempat masyarakat mengambil air.

c. Integritas Kelompok Pengguna Pemelihara (KPP), dibuktikan oleh:

- Besarnya tanggungjawab KPP
 - Kecilnya honor bulanan yang diterima pengurus KPP.
3. Proses pembangunan dan Pengelolaan Mempengaruhi Keberlanjutan Operasional Prasarana, dibuktikan dengan:
- a. Partisipasi pemikiran pada setiap tahap pembangunan sebagai pendorong keberhasilan, dibuktikan dengan:
 - Didalam tahap sebelum pengusulan program, masyarakat dilibatkan didalam inventarisir dan musyawarah sarana/prasarana desa untuk menentukan prioritas usulan program.
 - Didalam tahap pengusulan program, masyarakat desa diwakili oleh kepala desa menyampaikan usulan mengenai program pembangunan sesuai hasil musyawarah desa.
 - Didalam tahap survei dan perencanaan, pelibatan masyarakat sebatas menginformasikan lokasi mata air dan jalur-jalur pipa air.
 - Didalam tahap pengelolaan prasarana terbangun peran serta masyarakat diantaranya: Pembentukan KPP, aktif didalam memberikan usul, saran dan pendapat didalam penyusunan mekanisme pengelolaan prasarana yang menjadi tanggungjawab KPP sebagai wakil masyarakat.
 - b. Tenaga sebagai bentuk partisipasi yang paling diminati masyarakat, dibuktikan dengan bukti berikut ini:
 - Kontribusi tenaga tidak berkaitan dengan pendidikan tinggi.
 - Mata pencaharian masyarakat desa pada umumnya bertani dan berkebun tidak membutuhkan pemikiran tetapi tenaga.
 - Adanya upah kerja yang lebih tinggi dari penghasilan berkebun/bertani.
 - Kebutuhan masyarakat untuk bekerja sambil menunggu musim panen.
 - c. Uang Sebagai Konsekwensi Pemakaian Air, dibuktikan dengan adanya kewajiban masyarakat untuk membayar iuran bulanan sesuai dengan kesepakatan pada saat musyawarah desa.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan melalui kajian komprehensif partisipasi masyarakat didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono sebagai berikut:

1. Keberhasilan Desa Wawoosu didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air disebabkan beberapa hal, sebagai berikut:
 - Ketersediaan anggaran pembangunan, walaupun anggaran/pendanaan ditetapkan sebelum dilakukannya perencanaan namun demikian hasil perencanaan yang dilakukan konsultan perencana sesuai dengan kondisi eksiting dan keinginan masyarakat Desa Wawoosu.
 - Pemilihan teknologi tepat guna mempengaruhi keterlibatan masyarakat. Dengan pemilihan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi eksiting dan keinginan masyarakat didalam pembangunan memungkinkan masyarakat dapat turut serta berpartisipasi didalam pelaksanaan pembangunan konstruksi serta didalam melakukan pemeliharaan dan perawatan hasil-hasil pembangunan
 - Proses pembangunan dan pengelolaan mempengaruhi keberlanjutan operasionalisasi prasarana terbangun, keterlibatan masyarakat didalam setiap tahapan proses pembangunan dan pengelolaan prasarana yang berhasil dibangun akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga partisipasi masyarakat terutamanya didalam pengelolaan prasarana terbangun yang muncul dengan dari kesadaran sendiri.
2. Kegagalan Desa Mataiwoi didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air disebabkan oleh:
 - Ketersediaan anggaran pembangunan, dengan telah ditetapkannya anggaran/pendanaan sebelum dilakukannya perencanaan menyebabkan perencanaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran sehingga hasil perencanaan kurang sesuai dengan kondisi eksiting dan harapan masyarakat.
 - Pemilihan teknologi tepat guna mempengaruhi keterlibatan masyarakat. Dengan pemilihan teknologi tepat guna yang kurang sesuai dengan kondisi eksiting dan keinginan masyarakat didalam pembangunan akan menimbulkan rasa kecewa didalam diri masyarakat sehingga timbul keengganan untuk turut berperan serta memelihara dan merawat prasarana yang telah dibangun.
 - Proses pembangunan dan pengelolaan mempengaruhi keberlanjutan operasionalisasi prasarana terbangun, keterlibatan masyarakat didalam setiap tahapan proses pembangunan dan pengelolaan prasarana yang berhasil dibangun akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga partisipasi masyarakat

terutamanya didalam pengelolaan prasarana terbangun yang muncul dengan dari kesadaran sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Program pembangunan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono merupakan program pemerintah pusat sebagai bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu, anggaran atau pendanaan program ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan melalui keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena program ini adalah murni proyek yang dilaksanakan secara kontraktual.

Partisipasi masyarakat berupa: sumbangsih pemikiran, sumbangsih tenaga dan uang terjadi didalam beberapa tahap yang mengiringi dan mewarnai mekanisme pembangunan dan pengelolaan hasil pembangunan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono. Tahapan – tahapan tersebut diantaranya: tahap sebelum pengusulan program pembangunan, tahap pengusulan pembangunan, tahap survei dan perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan konstruksi dan tahap pengelolaan hasil pembangunan. Untuk partisipasi pemikiran terjadi didalam beberapa tahap, diantaranya: tahap sebelum pengusulan program pembangunan, tahap pengusulan program pembangunan, tahap survei dan perencanaan dan tahapan pengelolaan hasil pembangunan. Partisipasi tenaga terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan konstruksi. Partisipasi uang terjadi pada tahap pengelolaan hasil pembangunan.

Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi merupakan dua desa dari empat desa diwilayah Kecamatan Kolono yang mendapatkan program bantuan pembangunan prasarana air bersih dari pemerintah pusat, walaupun lokasi dua desa tersebut relatif berdekatan, keduanya berada dijalur jalan poros kecamatan, mata pencaharaian

penduduknya mayoritas bertani dan berkebun namun tingkat keberhasilan didalam pengelolaan prasarana penyediaan air bersih yang telah berhasil dibangun tidak sama.

Keberhasilan Desa Wawoosu didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air disebabkan beberapa hal, yaitu:

- Ketersediaan anggaran pembangunan, walaupun anggaran/pendanaan yang ditetapkan sebelum dilakukannya perencanaan namun demikian hasil perencanaan yang dilakukan konsultan perencana sesuai dengan kondisi eksiting dan keinginan masyarakat Desa Wawoosu.
- Pemilihan teknologi tepat guna didalam pembangunan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu Kecamatan Kolono sangat mempengaruhi keterlibatan masyarakat. Dengan pemilihan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi eksiting dan kemampuan masyarakat. sehingga memungkinkan masyarakat dapat turut serta berpartisipasi didalam pelaksanaan pembangunan konstruksi terlebih lagi didalam tahap pengelolaan yaitu melakukan pemeliharaan dan perawatan hasil-hasil pembangunan.
- Proses pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu Kecamatan Kolono mempengaruhi keberlanjutan operasionalisasi prasarana terbangun. Keterlibatan masyarakat didalam setiap tahapan proses pembangunan dan pengelolaan prasarana yang berhasil dibangun akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga partisipasi masyarakat terutamanya didalam pengelolaan prasarana terbangun muncul dari kesadaran sendiri.

Kegagalan Desa Mataiwoi didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air disebabkan oleh:

- Ketersediaan anggaran pembangunan, dengan telah ditetapkannya anggaran/pendanaan sebelum dilakukannya perencanaan menyebabkan perencanaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran sehingga hasil perencanaan kurang sesuai dengan kondisi eksiting dan harapan masyarakat.
- Pemilihan teknologi tepat guna mempengaruhi keterlibatan masyarakat. Dengan pemilihan teknologi tepat guna yang kurang sesuai dengan kondisi eksiting dan kemampuan masyarakat Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono didalam pembangunan akan menimbulkan rasa kecewa didalam diri masyarakat

sehingga timbul keengganan untuk turut berperan serta memelihara dan merawat prasarana yang telah dibangun.

- Proses pembangunan dan pengelolaan mempengaruhi keberlanjutan operasionalisasi prasarana terbangun, keterlibatan masyarakat didalam setiap tahapan proses pembangunan dan pengelolaan prasarana yang berhasil dibangun akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga partisipasi masyarakat teurtamanya didalam pengelolaan prasarana terbangun yang muncul dengan dari kesadaran sendiri.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penjelasan diatas adalah keberhasilan dan kegagalan pembangunan dan pengelolaan hasil pembangunan prasarana penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono sangat dipengaruhi oleh: Ketersediaan Anggaran Pembangunan, Pemilihan Teknologi Tepat Guna dan Tahapan Proses Pembangunan dan Pengelolaan prasarana disesuaikan dengan kapasitas masyarakat setempat.

5.2 Rekomendasi

Untuk menindaklanjuti beberapa temuan penelitian mengenai partisipasi masyarakat didalam pembangunan dan pengelolaan prasaran penyediaan air bersih di Desa Wawoosu dan Desa Mataiwoi kecamatan Kolono, maka perlu adanya beberapa rekomendasi untuk disampaikan, diantaranya:

1. Pemilihan dan Penerapan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi eksiting dan tingkat pemahaman serta kemampuan masyarakat agar masyarakat mampu berperan serta didalam pelaksanaan pembangunan konstruksi dan didalam mengoperasikan dan memelihara hasil pembangunan, sehingga pembangunan prasarana penyediaan air bersih mencapai hasil optimal, yaitu secara: kualitas, kwanritas, terjangkau oleh masyarakat miskin didalam pembiayaannya dan keberlanjutan sesuai dengan tujuan didalam perencanaan.
2. Sebelum dilakukannya pengusulan dan penetapan mengenai alokasi biaya atau besaran biaya suatu program pembangunan di suatu daerah, hendaknya didahului dengan perencanaan awal yang tertuang didalam pradesain sehingga plotting anggaran sesuai dengan kebutuhan.

3. Hendaknya pemerintah pusat dapat menemukan konsep baru didalam pelaksanaan program bantuan penyediaan air bersih yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan konsep yang lebih partisipatif. Sehingga pelaksanaan program tersebut lebih fleksibel dan tidak terkesan mekanistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, 1996, *A Leader Of Citizen Partisipation Journal Of The Royal Town Planning Institute*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Bintarto, R, 1983, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Budihardjo, 2001, *Kota Berkelanjutan*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Bourne, 1984, *Internal Structure Of The City: Reading On Urban Form, Growth, and Policy*.
- Conyers, 1984, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Suatu Pengantar, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Grigg, 1998, *Infrastructure Engineering and Management*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Ibrahim, Jabal Tarik, 2003, *Sosiologi Pedesaan*, Malang, Penerbit Buku Universitas Muhamadiyah Malang.
- Iskandar, Santoso, 1994, *Sistem Perumahan Sosial Indonesia*, Jakarta, Center For Urban Studies.
- Kodoatie, 2002, *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Era Otonomi Daerah*, Jogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Penerbit LP3ES.
- Midgley, James, 1986. *Community Partisipation, Social Development and The State*, Mathuen, London
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mikkelsen, Britha 2003, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Noerbambang, Morimura, 1985, *Pengantar Plumbing*, Jakarta, PT. Dainppon Gita Karya Printing.
- Ndraha, Taliziduhu, 1980, *Partisipasi dalam Pembangunan*, Jakarta, LP3ES, Sentosa, Singgih, 1998.

- Panudju, 1999, *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Patton M.Q, 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*. Terjemahan Priyadi, Budi. Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, 2006, *Teknologi Penyediaan Air Bersih*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Simatupang, 1995, *Teori Sistem*, Jogjakarta, Andi Offset.
- Soetrisno, Alfonso, 2001, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar.
- Sastroputro, 1986, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Alumni.
- Salusu, J, 1998, *pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nin Profit*. Jakarta, Penerbitan Gramedia.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*, Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Sugiarto, et al, 2001, *Teknik Sampling*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tjokrowinoto, 1994, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar.

MAKALAH SEMINAR

- Manaf, Asnawi, 2009, *Perencanaan Tata Ruang Partisipasi dalam Program PengembanganLingkungan Permukiman Berbasis Komunitas: Tantangan, Kendala, dan Potensi*. Seminar Nasional Dies Emas Planologi ITB.

TESIS

- Yuliati, Rina, 2000, *Efektivitas Metode Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Limbah Perkotaan di Perumahan Mojosongo Surakarta*, Semarang, Magister Teknik Pembangunan Kota Undip.

TERBITAN TERBATAS

Bappenas, 2001, *Konsep Strategi Dan Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D)*, Jakarta, Sekretariat Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D)

BPS Kabupaten Konawe Selatan 2008., *Kabupaten Konawe Selatan dalam Angka Tahun 2008*.

PENGGODEAN HASIL WAWANCARA

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa hasil pengamatan maupun wawancara kemudian disatukan kedalam hasil wawancara. Untuk memudahkan penggunaan data wawancara ini dalam proses analisis, dilakukan pengkodean berdasarkan kisi-kisi penelitian dan unit-unit informasi yang didapat lapangan. Pengkodean tersebut adalah sebagai berikut:

[illegible]

		Kegagalan Pengelolaan	KDP
			IKP

TABEL REKAMAN HASIL WAWANCARA

- a. Nama : Heriyanto
- b. Desa : Wawoosu
- c. Kecamatan : Kolono
- d. Pekerjaan : Kepala Desa

No.	PERTANYAAN	KODE	JAWABAN
1.	Mekanisme Partisipasi Masyarakat didalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih	PI	
	1. Partisipasi pemikiran pada setiap tahapan pembangunan?	PI.1/DW.1	✓ Sebelum kami putuskan prasarana/sarana apa saja yang akan menjadi prioritas usulan di Musrenbang tingkat kecamatan, Kami perangkat desa dibantu tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat desa mencoba untuk menginventarisir mengenai kondisi prasarana/sarana yang ada didesa dan

			hasilnya akan dibawa didalam musyawarah desa untuk ditentukan mana yang akan menjadi prioritas usulan. ✓ Kami sudah beberapa kali mengusulkan kegiatan-kegiatan atau program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada setiap acara Musrenbang tingkat kecamatan, namun baru ditahun 2008 ini usulan kami terealisasi itupun kami ketahui ketika kontraktor pelaksanaanya datang ke Desa untuk melapor bahwa akan ada proyek rehabilitasi dan peningkatan prasarana penyediaan air bersih. ✓ Sewaktu konsultan datang didesa mereka hanya bertanya dimana letak mata air, selanjutnya mereka pergi sendiri melihat mata air yang dimaksud Dengan adanya proyek didesa kami, masyarakat desa merasa sangat terbantu karena tidak lagi keluar desa untuk mencari pekerjaan sampingan sambil menunggu masa panen Masyarakat sendiri yang menetapkan besaran iuran bulanan didalam musyawarah desa.
--	--	--	--

		TI.1/DW.1 UI.1/DW.1	
	2. Partisipasi tenaga didalam pelaksanaan proyek? 3. Partisipasi uang pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan		
2.	Kajian Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Pembangunan Dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih 1. Bagaimana menurut bapak mengenai pemilihan teknologi penyediaan air bersih di desa bapak? 2. Sejauh mana peranan Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP) didalam pengelolaan prasaran air bersih?	PTP.1/DW.1	Nah ini baru perencanaan yang bagus, masyarakat saya sangat senang dan bersyukur sekali air mengalir sampai dirumah mereka masing-masing.

		IKP.1/DW.1	Kami sangat bersyukur pak, dengan adanya KPP karena KPPlah selama ini yang mengoperasikan dan memelihara prasarana, utamanya tenaga teknisnya karena kapanpun masyarakat butuh untuk memperbaiki dia selalu siap, padahal dari segi honor saya anggap tidak sebanding.
--	--	------------	--

TABEL REKAMAN HASIL WAWANCARA

- a. Nama : Sholehuddin
 b. Desa : Mataiwoi
 c. Kecamatan : Kolono
 d. Pekerjaan : Kepala Desa

No.	PERTANYAAN	KODE	JAWABAN
1.	Mekanisme Partisipasi Masyarakat didalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih	PI	
	1. Partisipasi pemikiran pada setiap tahapan pembangunan?	PI.1/DM.1	Setelah Musrenbang tingkat Kecamatan Kolono, kami hanya menunggu pak, apakah usulan kami untuk merehabilitasi prasarana air bersih diakomodir oleh Pemerintah Daerah, Alhamdulillah ternyata setelah sekian lama menunggu akhirnya bantuan itu datang.
	2. Partisipasi tenaga didalam pelaksanaan proyek?	TI.1/DW.1	Seperti biasanya, setiap ada proyek didesa kami masyarakat desa minta diutamakan untuk dipekerjaan pak, yah tentunya dengan mengaharap bayaran. Baru kali ini masyarakat bersedia

	3. Partisipasi uang pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan	UI.1/DW.1	memberikan iuran bulanan pak, kalau dulu-dulunya mana pernah mau, tidak ngerti kenapa.
2.	Kajian Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Pembangunan Dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih 1. Bagaimana menurut bapak mengenai pemilihan teknologi penyediaan air bersih di desa bapak? 2. Sejauh mana peranan Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP) didalam pengelolaan prasaran air bersih?	PTP.1/DM.1 IKP.1/DW.1	Sebenarnya yang saya harapkan sistem penyediaan air bersih di Desa mataiwoi tidak lagi menggunakan hidran umum, tetapi menggunakan sambungan rumah yang dilengkapi dengqn meteran air sehingga masyarakat bisa mengontrol penggunaan airnya, apalagi debit air yang dikeluarkan mata air dari tahun ketahun bukannya bertambah tinggi tapi menurun. Saya tahu kalau ada KPP yang bertugas mengoperasikan dan memelihara prasarana air bersih di kami sewaktu dimusyawarah desa, awal-awalnya prasarana ini diserahterimakan kepada masyarakat KPP nampak rajin

			melaksanakan tugasnya.
--	--	--	------------------------

TABEL REKAMAN HASIL WAWANCARA

- a. Nama : Saala, SE, ST
- b. Desa : -
- c. Kecamatan : -
- d. Pekerjaan: Kepala Bidang Cipta Karya DPU Kab. Konawe Selatan

No.	PERTANYAAN	KODE	JAWABAN
1.	Mekanisme Partisipasi Masyarakat didalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih 1. Partisipasi pemikiran pada setiap tahapan pembangunan? 2. Partisipasi tenaga didalam pelaksanaan proyek? 3. Partisipasi uang pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan	PI	
2.	Kajian Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Pembangunan Dan		

	Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih 1. Bagaimana menurut bapak mengenai pemilihan teknologi penyediaan air bersih yang tidak sama di seluruh desa penerima bantuan Dana Alokasi Khusus	PTP.2/1	Tanggungjawab untuk melakukan survey dan perencanaan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Konawe Selatan untuk semua jenis proyek baik yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun dari Dana Alokasi Umum (DAU) diserahkan sepenuhnya kepada Konsultan Perencana kami di Dinas Pekerjaan Umum hanya mengarahkan saja, dan mengapa hasil perencanaan di masing-masing desa terkadang berbeda antara satu dengan yang lain? Hal ini berhubungan dengan alokasi dana di masing-masing desa sasaran lokasi proyek, perlu saya sampaikan bahwa pengalokasian dana itu dilakukan jauh sebelum proses survey dan perencanaan dilakukan, sebenarnya disini pangkal masalahnya, kenapa, ya karena perencanaan dilapangan harus menyesuaikan dengan ketersediaan dana Dari pengalaman selama beberapa tahun saya tangani proyek air bersih di kabupaten Konawe Selatan, antara program pemberdayaan masyarakat
--	--	----------------	---

	2. Sejauh mana peranan Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP) didalam pengelolaan prasaran air bersih?	IKP.1/1	dengan proyek yang dilaksanakan secara kontraktual didalam pemeliharaan kecenderungan lebih berhasil pada program pemberdayaan. Ini semua disebabkan masyarakat desa merasa dilibatkan dari awal proses sampai selesai sehingga timbul rasa memiliki dan kesadaran untuk memelihara prasarana yang berhasil dibangun
--	--	---------	--

TABEL REKAMAN HASIL WAWANCARA

- e. Nama : Hidayat
f. Desa : Wawoosu
g. Kecamatan : Kolono
h. Pekerjaan : Sekretaris Desa/ Ketua KPP

No.	PERTANYAAN	KODE	JAWABAN
1.	Mekanisme Partisipasi Masyarakat didalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih 1. Partisipasi pemikiran	PI	

	pada setiap tahapan pembangunan?	PI.2/DW.2	✓ Kewajiban kami masyarakat desa Wawoosu setelah selesainya pembangunan adalah membentuk Kelompok Pengguna Pemelihara (KPP) yang mempunyai tugas untuk mengkoordinir masyarakat melakukan pemeliharaan dan terhadap prasarana penyediaan air bersih, anggota-anggotanya berasal dari masyarakat desa wawoosu sendiri dan berjumlah tiga orang terdiri dari: Ketua, sekretaris dan tenaga teknis. ✓ Kami hanya diminta tolong oleh konsultan perencana, untuk menunjukkan letak mata air dan jalur-jalur pipa yang sudah ada, katanya mau direhabilitasi (Hidayat, Sekdes Desa Wawoosu). Ya pak, kami sangat bersyukur, walaupun hanya sebagai tenaga kasar yang penting kami diberi kesempatan untuk bekerja, mau diapa lagi bisanya hanya sebatas mencangkul pak. sebenarnya tidak sebanding
		TI.2/DW.2	

	2. Partisipasi tenaga didalam pelaksanaan proyek? 3. Partisipasi uang pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan	UI.1/DW.2	antara honor yang kami terima yaitu sebesar Rp.200.000,- setiap bulan dengan beban tanggungjawab kami pak, tapi gimana lagi masyarakat sudah memilih dan kami sudah terlanjur menyanggupi dan lagian kami sekeluarga juga turut menikmati air bersih pak
2.	Kajian Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Pembangunan Dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih 1. Bagaimana menurut bapak mengenai pemilihan teknologi penyediaan air bersih di desa bapak?	PTP.2/DM.2	Sebenarnya saya kurang paham mengenai teknik, apalagi berkaitan dengan pipa pak, namun dengan model penyaringan sederhana terutama dibak penangkapsetidaknya saya terutama tidak perlu susah-susah belajar apalagi bahan-bahannya semuanya tersedia didesa. Tapi mengenai cara penyambungan pipa dan perbaikan sambungan rumah saya serahkan kepada anggota teknis saya, karna kebetulan dia ikut membantu

	2. Sejauh mana peranan Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP) didalam pengelolaan prasaran air bersih?	IKP.2/DW.2	tenaga teknis yang didatangkan dari kota oleh kontraktor jadi dia agak berpengalaman pak. Kalau tidak KPP apa jadinya pak, masyarakatkan maunya enak cukup dengan membayar mereka anggap selesai tanggungjawab, kalupun mereka membantu misalnya untuk membersihkan bak penangkap dan bak pengumpul itupun kan hanya sebulan sekali.
--	---	-------------------	--

TABEL REKAMAN HASIL WAWANCARA

- i. Nama : Ibu Mirna
j. Desa : Mataiwoi
k. Kecamatan : Kolono
l. Pekerjaan : Petani

No.	PERTANYAAN	KODE	JAWABAN
1.	Mekanisme Partisipasi Masyarakat didalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih	PI	
	1. Partisipasi pemikiran pada setiap tahapan pembangunan?	PI.4/DM.2	Saya dak tau pak
	2. Partisipasi tenaga didalam pelaksanaan proyek?	TI.4/DM.2	Walaupun sedikit hasil dari proyek tapi sangat membantu kami pak.
	3. Partisipasi uang pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan	UI.4/DM.2	Seandainya air bisa langsung nyampai dirumah, kami akan lebih tertib untuk membayar

			iuran bulanan kan tidak seberapa jii, tapi tidak apalah kami ambil air diHU walaupun agak jauh namun dibandingkan dengan sebelumnya ini lebih baik.
2.	Kajian Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Pembangunan Dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih 1. Bagaimana menurut ibu mengenai pemilihan teknologi penyediaan air bersih di desa ibu?	PTP.4/DM.2 IKP.4/DM.2	pada awalnya kami sangat bersyukur dengan diperbaikinya prasarana air bersih didesa kami apalagi ketika kami tahu air sudah kembali mengalir sampai desa, kami setuju-setuju saja ketika dimusyawarah desa meyepakati beban iuran kami masing-masing rumah sebesar Rp. 5000,-, tapi akhir-akhir ini saya jadi malas bayar,gimana dak malas pak rumah saya agak jauh dihidran umum sementara bayarnya disamakan dengan yang dekat rumahnya dengan hidran umum, malahan akhir-akhir saya dengar-dengar air kadang mengalir kadang tidak pak pada awalnya KPP lumayan rajin pak menjalankan tugasnya mengoperasikan dan merawat, tapi akhir-akhir ini berkurang, gimana juga sebagian masyarakat mulai malas membayar iuran bulanan, apalagi untuk perbaikan

	2. Sejauh mana peranan Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP) didalam pengelolaan prasaran air bersih?		untuk honornya KPP saja dak cukup.
--	---	--	---

TABEL REKAMAN HASIL WAWANCARA

m. Nama : Purwanto
 n. Desa : Wawoosu
 o. Kecamatan : Kolono
 p. Pekerjaan : Petani

No.	PERTANYAAN	KODE	JAWABAN
1.	Mekanisme Partisipasi Masyarakat didalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih 1. Partisipasi pemikiran pada setiap tahapan pembangunan? 2. Partisipasi tenaga didalam pelaksanaan proyek?	PI PI.3/DW.3 TI.3/DW.3	Kebetulan sekali, saya tinggal dikebun pak, jadi waktu ada orang yang bertanya apa betul pipa yang melintas didalam kebun saya itu pipa air bersih yang berasal dari mata air diatas sana. Alhamdulillah ada proyek, ada yang bisa diharap untuk biaya hidup sementara sambil menunggu panen.

	3. Partisipasi uang pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan	UI.3/DW.3	Kami sangat setuju pak dengan adanya iuran bulanan atas penggunaan air, apalagi sekarang ini kami dak perlu lagi jauh-jauh untuk ambil air karena air sudah sampai dirumah kami masing-masing
2.	Kajian Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Pembangunan Dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih 1. Bagaimana menurut bapak mengenai pemilihan teknologi penyediaan air bersih di desa bapak? 2. Sejauh mana peranan Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP) didalam pengelolaan prasaran air bersih?	PTP.3/DM.3 IKP.2/DW.2	Sangat bagus pak, air bisa sampai dirumah, dengan menggunakan meteran air saya menjadi hati-hati menggunakan air. KPP sangat membantu kami pak, mereka itu rutin setiap bulan membersihkan bak penangkap dan bak penampung, kadang-kadang saya ikut serta pak.

TABEL REKAMAN HASIL WAWANCARA

- q. Nama : Ibu lasmi
 r. Desa : Mataiwoi
 s. Kecamatan : Kolono
 t. Pekerjaan : Petani

No.	PERTANYAAN	KODE	JAWABAN
1.	Mekanisme Partisipasi Masyarakat didalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih	PI	
	1. Partisipasi pemikiran pada setiap tahapan pembangunan?	PI.5/DW.5	Saya dak tau pak
	2. Partisipasi tenaga didalam pelaksanaan proyek?	TI.5/DW.5	Saya tidak ikut kerja pak, tapi suami saya ikut walaupun hanya menggali jalur pipa pak.
	3. Partisipasi uang pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan	UI.5/DW.5	Tidak ada masalah pak kami harus membayar sebesar Rp. 300,- perkubik, kalau dulu sih kami mengambil air brsih dari HU apalagi agak jauh pak rumah saya

			dengan lokasi HU, tapi sekarang Alhamdulillah air bersih sudah sampai dirumah kami masing-masing
2.	Kajian Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Pembangunan Dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih 1. Bagaimana menurut ibu mengenai pemilihan teknologi penyediaan air bersih di desa ibu?	PTP.5/DW.5	✓ Tidak ada masalah pak kami harus membayar sebesar Rp. 300,- perkubik, kalau dulu sih kami mengambil air brsih dari HU apalagi agak jauh pak rumah saya dengan lokasi HU, tapi sekarang Alhamdulillah air bersih sudah sampai dirumah kami masing-masing. ✓ syukur pak air sampai dirumah kami, jadi saya dak repot-repot lagi untuk ngambil airi, apalagi cuman Rp. 300,- perkubik lebih dari itupun dengan senang hati saya akan bayar pak. Sangat membantu sekali pak, kalau kami jujur saja tidak sanggup pak.
	2. Sejauh mana peranan Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP)	IKP.5/DW.25	

	didalam pengelolaan prasaran air bersih?		
--	---	--	--

